



BUPATI BANJAR

KATA PENGANTAR

Seraya mengucapkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT, dimana berkat segala rahmat, karunia-Nya juaiah segala tugas yang Kami emban selama ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Orientasi penyelenggaraan pembangunan yang berkembang saat sekarang menghendaki adanya arah dan sasaran yang jelas untuk dijadikan target pencapaian. Oleh karenanya dimunculkan istilah pemanfaatan segenap sumber daya, guna mencapai kinerja yang ditetapkan sebelumnya terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 merupakan kewajiban setiap daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Hal ini dimaksudkan agar prinsip perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan potensi daerah.

Mencermati perkembangan kemajuan pembangunan daerah hingga tahun 2013, diperlukan berbagai penyesuaian terhadap berbagai target indicator makro

pembangunan daerah serta kemajuan anggaran daerah yang menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimungkinkan untuk melakukan review terhadap dokumen RPJMD dalam bentuk revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat aktif dan turut berperan dalam proses penyusunan RPJMD 2011-2015 ini terutama kepada pihak DPRD Kabupaten Banjar, pihak akomodasi, Tim Penyusun, Unsur Masyarakat sehingga dokumen perencanaan ini dapat diselesaikan.

Kita berharap dokumen ini dapat menjadi acuan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah hingga tahun 2015, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan secara menyeluruh.

Martapura, Januari 2014

BUPATI BANJAR

PANGERAN H. KHAIRUL SALEH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	x

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Maksud dan Tujuan.....	4
	1.2.1 Maksud.....	5
	1.2.2 Tujuan.....	5
1.3	Landasan Hukum	8
1.4	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	11
1.5	Sistematika Penulisan.....	13

BAB 2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANJAR

2.1	Kodisi Geografis	17
2.2	Kependudukan.....	20
2.3	Kesejahteraan Masyarakat.....	25
2.4	Aspek Pelayanan Umum	45
2.5	Aspek Daya Saing Daerah.....	84
2.6	Pemerintahan	103
2.7	Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan	104
2.8	Lokasi Perkantoran.....	107
2.9	Kepegawaian Daerah	108

BAB 3 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1	Sosial Budaya Daerah.....	111
3.2	Perekonomian Daerah	123
3.3	Prasarana dan Sarana Daerah.....	136
3.4	Lingkungan Hidup	144
3.5	Struktur dan Pola Tata Ruang	146

3.6	Pemerintahan, Hukum dan Politik	148
-----	---------------------------------------	-----

BAB 4 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

4.1	Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	153
4.2	Arah Pengelolaan Belanja Daerah	159
4.3	Arah Pengelolaan Pembiayaan	163

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1	Dasar Filosofi.....	165
5.2	Visi	166
5.3	Misi.....	166
5.4	Tujuan dan Sasaran	167

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1	Strategi Umum	173
6.2	Strategi dan Arah Kebijakan	175

BAB 7 KEBIJAKAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1	Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah	185
7.2	Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Misi Pembangunan.....	192

BAB 8 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1	Indikasi Program dan Kegiatan Prioritas Menurut Misi	212
8.2	Kebutuhan Pendanaan Menurut Misi dan Urusan	223
8.3	Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Menurut Misi.....	225

BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

9.1	Indikator Program dan Kegiatan Menurut Misi	235
9.2	Landasan Hukum	267

BAB 10 Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi

10.1 Kaidah Pelaksanaan 275

DAFTAR TABEL

TABEL	HAL
2.1 Luas Wilayah Kabupaten Banjar Menurut Kecamatan Tahun 2009	18
2.2 Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009.....	23
2.3 Jumlah penduduk berdasarkan suku di wilayah Kabupaten Banjar	24
2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar 2005-2009	26
2.5 Tingkat Inflasi Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009	27
2.6 PDRB Perkapita Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009	28
2.7 Produksi Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009	29
2.8 Produksi Komoditas Perkebunan Rakyat di Kabupaten Banjar	31
2.9 Populasi ternak besar, ternak kecil ungags dan aneka ternak	32
2.10 Produksi Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009	33
2.11 Gini Rasio dan Distribusi Pendapatan	36
2.12 Angka melek huruf, Angka rata-rata lama sekolah, APM, dan APK serta Angka pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Banjar Tahun 2005 s/d 2009	37
2.13 Angka kelangsungan hidup bayi, Angka usia harapan hidup dan persentase balita gizi buruk di Kabupaten Banjar tahun 2005 s/d tahun 2009	38
2.14 Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan.....	39
2.15 Jumlah akseptor di Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009	40
2.16 Data Angka Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2010.....	40
2.17 Kesempatan Kerja di Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009.....	42
2.18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar Tahun 2005-2008.....	43
2.19 Jumlah Group/Gedung kesenian dan Club/Gedung Olahraga di Kabupaten Banjar	45
2.20 Jumlah Sarana dan Prasarana serta Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009	46
2.21 Data Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2009	48
2.22 Mutu Pendidikan di Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009	49
2.23 Keadaan sekolah agama di Kabupaten Banjar tahun 2010	51
2.24 Keadaan ruang kelas agama di Kabupaten Banjar 2010	52
2.25 Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan.....	53

2.26	Jumlah Volume Sampah yang Dapat Ditangani	55
2.27	Data luasan bukaan tambang batubara dari tahun 2005 s/d tahun 2009 ..	55
2.28	Jumlah Luasan Reklamasi Dan Revegetasi Tambang Batubara Tahun 2005-2009.....	56
2.29	Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Banjar Tahun 2010	57
2.30	Data kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dari tahun 2005-2009	58
2.31	Persebaran Lahan Kritis dan Sangat Kritis di Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan	59
2.32	Perkembangan Luas Kegiatan Rehabilitasi Lahan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.....	60
2.33	Perkembangan Kegiatan Reboisasi di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan	61
2.34	Jumlah Titik Panas di Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005-2009	62
2.35	Fasilitas Jalan dan Jembatan di Kabupaten Banjar Tahun 2005-2010.....	65
2.36	Prosentase Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar menurut Agama dan Keyakinan tahun 2009.....	67
2.37	Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Banjar	68
2.38	Jumlah TPA/TK Al Qur'an, Guru dan Santri di Kabupaten Banjar	69
2.39	Nilai Realisasi Investasi 2005-2009.....	74
2.40	Koperasi dan UKM di Kabupaten Banjar Tahun 2005 s/d 2009	75
2.41	Akte nikah dan KTP yang diterbitkan tahun 2005 s/d 2009	76
2.42	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjar Tahun 2010	77
2.43	Jumlah Anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Banjar.....	78
2.44	Jumlah akseptor di Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009	80
2.45	Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Banjar Tahun 2005 s/d 2009	82
2.46	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di Kabupaten Banjar Tahun 2005 s/d 2009	85
2.47	Rata-Rata Nilai Tukar Petani di Kabupaten Banjar Tahun 2005 s/d 2009...	85
2.48	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Banjar tahun 2005 s/d 2009.....	86
2.49	Produktivitas Total Daerah Kabupaten Banjar tahun 2005 s/d 2009.....	87
2.50	Rasio jumlah kendaraan dengan panjang jalan Kabupaten Banjar Tahun 2006-2008.....	88
2.51	Fasilitas Perbankan Umum di Kabupaten Banjar Tahun 2010	93
2.52	Fasilitas Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Banjar Tahun 2010	94
2.53	Data Ketersediaan Air Bersih di Kabupaten Banjar Tahun 2010	94
2.54	Data Pengguna Fasilitas Listrik.....	96

2.55	Jumlah Produk Hukum Daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar	99
2.56	Jumlah Surat Keputusan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar	99
2.57	Perkembangan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009.....	100
2.58	Data Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Banjar Tahun 2009	101
2.59	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (Jiwa) Tahun 2005-2009	102
2.60	Penduduk Usia Kerja (PUK), Penduduk Di Luar Usia Kerja (PDUK) dan Rasio Beban/Tanggungans Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009	102
2.61	Tabel jadwal waktu yang harus dipenuhi dalam penyusunan perencanaan	105
2.62	Tabel Daftar SKPD yang Perlu di relokasi.....	108
2.63	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan.....	109
3.1	Proyeksi Penduduk Kabupaten Banjar (Jiwa) Tahun 2011-2015	112
3.2	Proyeksi Pencari Kerja Yang Ditempatkan Tahun 2011-2015	113
3.3	Proyeksi Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015	115
3.4	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2015	124
3.5	Proyeksi Penanaman Modal Tahun 2011-2015	125
3.6	Proyeksi Sektor Koperasi Tahun 2011-2015	127
3.7	Proyeksi Jumlah Produksi Sektor Pertanian (Ton) Tahun 2011-2015	128
3.8	Proyeksi Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas (Ekor) Tahun 2011-2015	129
3.9	Target Pembangunan Perikanan dan Kelautan Tahun 2011-2015.....	133
4.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005–2010 (Rp. Juta)	154
4.2	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 – 2015 (Rp. Juta)	158
4.3	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005 – 2009	161
4.4	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 – 2015.....	163
4.5	Proyeksi APBD Kabupaten Banjar Tahun 2011 – 2015 (Rp. juta).....	164
8.1	Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Banjar	211
8.2	Indikasi Program Prioritas Misi Kesatu	212

8.3	Indikasi Program Prioritas Misi Kedua	213
8.4	Indikasi Program Prioritas Misi Ketiga	215
8.5	Indikasi Program Prioritas Misi Keempat	218
8.6	Indikasi Program Prioritas Misi Kelima	219
8.7	Kebutuhan Pendanaan Menurut Misi dan Program	223
8.8	Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kesatu (Memantapkan suasana kehidupan yang madani)	225
8.9	Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kedua (Memantapkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia)	226
8.10	Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Ketiga (Memantapkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan mendorong iklim investasi)	228
8.11	Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Keempat (Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan)	231
8.12	Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kelima (Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan prima)	232
9.1	Indikator Kinerja Program Misi Kesatu (Memantapkan suasana kehidupan yang madani)	236
9.2	Indikator Kinerja Program Misi Kedua (Memantapkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia)	237
9.3	Indikator Kinerja Program Misi Ketiga (Memantapkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan mendorong iklim investasi)	242
9.4	Indikator Kinerja Program Misi Keempat (Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan)	252
9.5	Indikator Kinerja Program Misi Kelima (Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan prima)	255
10.1	Program Utama Transisi	278

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		HAL
1.1	Gambar Proses Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015	7
2.1	Gambar Grafik Distribusi Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2009	21
2.2	Gambar Grafik Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar Tahun 2005-2010.....	22

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2006-2010 telah memberikan hasil yang positif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tergambar dari beberapa indikator, namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti terutama di dalam menghadapi tantangan daerah pada periode berikutnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Banjar yang terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2010. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 adalah tahapan lima (5) tahun kedua dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar tahun 2005-2025. RPJMD juga merupakan

pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara terpadu dan komprehensif, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari *top down* serta *bottom up*, yakni proses hasil rumusan antara pemerintah dan masyarakat.

Amanat pasal 19 pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ayat (2) mengatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sementara itu pasal 150 ayat (3) huruf c pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Terkait dengan hal ini, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan jangka waktu penetapannya paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik.

Tahun 2013 merupakan tahun ketiga pelaksanaan dari RPJMD 2011-2015 yang berarti setidaknya telah dua tahun pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar

Nomor 5 tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 pasal 155 bahwa dalam rangka menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah dan terjaganya konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW serta antara RKPD dan RPJMD, maka pemerintah Daerah telah melakukan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan, pelaksanaan rencana dan hasil rencana pembangunan daerah tersebut.

Selanjutnya untuk melihat sejauhmana pelaksanaan dari RPJMD tahun 2011-2015 di atas, maka berdasarkan pasal 274 (1), (2) dan (5), Pemerintah Daerah telah melakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD tahun 2010-2015 yang dilakukan melalui penilaian terhadap hasil pelaksanaan RPJMD tersebut yang dilaksanakan sekali yaitu pada tahun ketiga selama periode RPJMD tahun 2011-2015 dengan menggunakan evaluasi hasil RKPD selama tahun 2011-2012.

Hasil Evaluasi dimaksud meliputi indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut disimpulkan bahwa terjadi perubahan mendasar dalam indikator kinerja makro pembangunan daerah yang meliputi :

- a. Perubahan kondisi makro, nasional dan regional mengakibatkan perlunya menyesuaikan indikator pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita, pada akhir periode RPJMD;
- b. Akan dicapainya indikator indeks tingkat pengangguran terbuka dan indikator tingkat kemiskinan pada tahun 2013 ini, sehingga perlunya menetapkan target baru yang disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- c. Terjadinya peningkatan yang signifikan dalam realisasi PAD dan APBD pada tahun 2011-2013, sehingga meningkatnya sumber-sumber dana pembangunan yang diharapkan mampu menimbulkan percepatan hasil pelaksanaan dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2011-2015.

Berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi tersebut di atas, maka sesuai dengan pasal 282 (1) huruf c, perlu dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dan sesuai amanat pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 54 Tahun 2010, perlunya dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2011 sebagai dasar bagi Revisi RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015.

1.2 Maksud dan Tujuan

Revisi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 mempunyai maksud dan tujuan yang dijelaskan sebagai berikut:

1.2.1. Maksud

Revisi terhadap RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar selama periode 2011-2015 yang telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan, indikasi program prioritas dan indikator-indikator kinerja program yang akan dilaksanakan oleh SKPD-SKPD sampai tahun 2015. Perubahan dimaksud tetap menyajikan rumusan strategi, arah kebijakan program pembangunan yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu yang diharapkan terjadinya percepatan terwujudnya visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Banjar serta dengan memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah Kabupaten Banjar.

RPJMD Kabupaten Banjar juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menyesuaikan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus sebagai acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Banjar secara berjenjang.

1.2.2. Tujuan

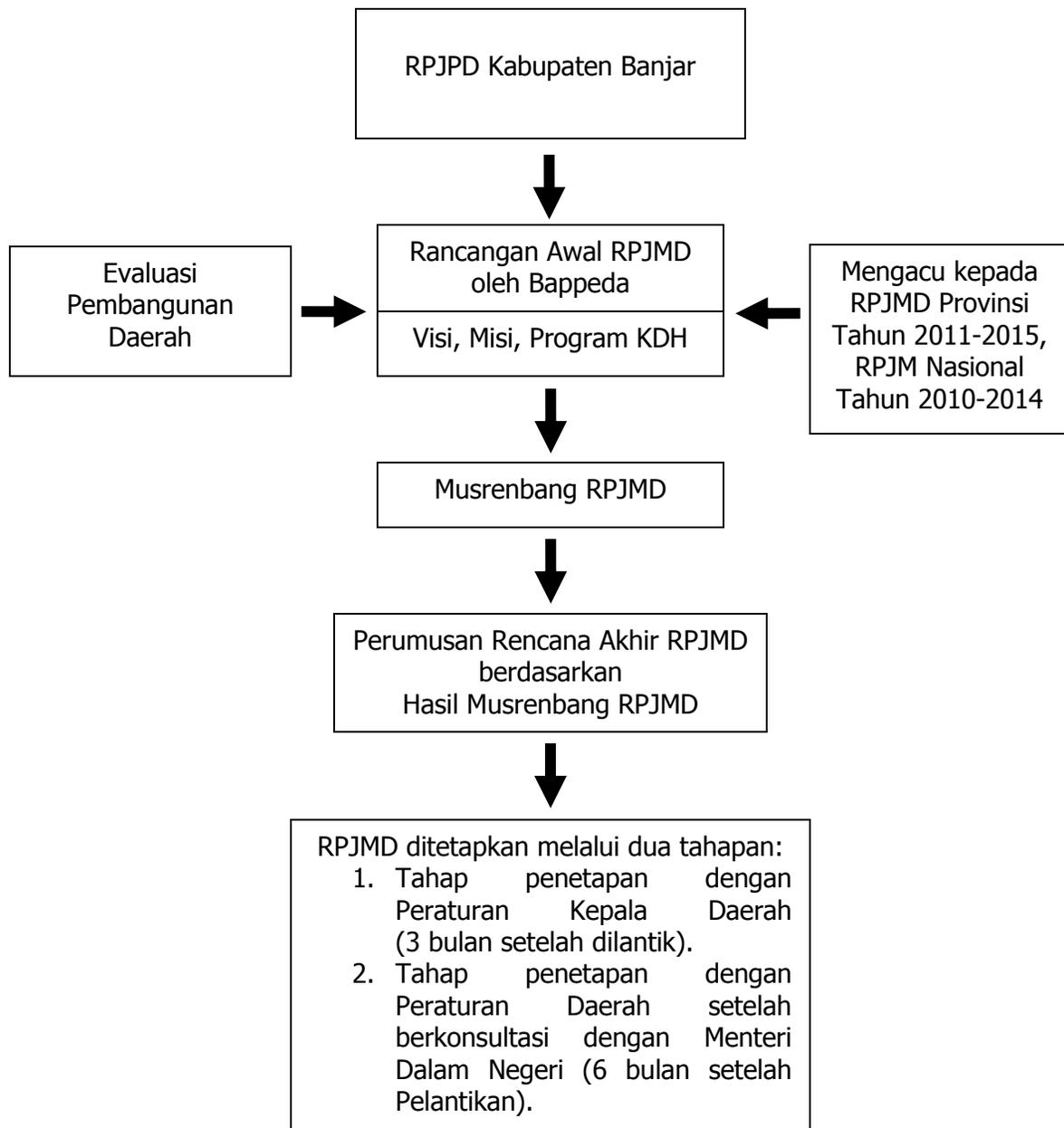
Tujuan Revisi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati Banjar ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang telah terinci,

terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

- 2) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Banjar, APBD Provinsi Kalimantan Selatan, APBN dan sumber dana lainnya.
- 3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar Pemerintah Kabupaten Banjar, dengan Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Pusat.
- 4) Menyediakan tolok ukur yang lebih realistis sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, digunakan untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
- 5) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan segenap komponen masyarakat.

Tahapan proses penyusunan, secara diagramatis dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015

Sumber :

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004
- Undang undang Nomor 32 Tahun 2004
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

1.3 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015, Peraturan Perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

- 1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4410);

- 6). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 10). Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- 11). Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 12). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 13). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 14). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 15). Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 16). Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- 17). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 18). Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

- 19). Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
- 20). Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peratusran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pemebentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.

1.4 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari manajemen pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

- 1). RPJMD dan RPJPD Kabupaten Banjar.

RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 merupakan RPJMD kedua dari tahapan pelaksanaan RPJP Kabupaten Banjar tahun 2005-2025. Oleh sebab itu dalam penyusunan RPJMD selain menjabarkan juga memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Banjar masa bakti tahun 2010-2015.

- 2). RPJMD dan RTRW Kabupaten Banjar.

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan pola dan struktur tata ruang yang sedang dalam proses ditetapkan pada RTRW Kabupaten Banjar.

3). RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis dari RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banjar.

4). RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Banjar yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Selanjutnya Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Banjar yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga tingkat Kabupaten.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Pendahuluan, berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dilakukannya perubahan atas RPJMD tahun 2011-2015, landasan hukum dan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.
2. Gambaran umum kondisi daerah, adalah penjelasan tentang:
 - Kondisi Geografis (uraian potensi pengembangan kawasan budidaya), letak & kondisi, topologi, geologi, hidrologi, klimatologi, dan penggunaan lahan.
 - Sosial Budaya Daerah meliputi Kependudukan, Agama, Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perpustakaan.
 - Perekonomian daerah berisikan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pendapatan perkapita, ketahanan pangan, ketimpangan kemakmuran dan pemerataan pendapatan, ketenagakerjaan, investasi dan kemiskinan.
 - Prasarana dan sarana darat berisikan mengenai data jalan dan jembatan, irigasi, air bersih, listrik, transportasi, informasi dan telekomunikasi.
 - Lingkungan hidup berisi uraian penanganan sampah, pertambangan, kehutanan, wilayah rawan bencana.
 - Kualitas Lingkungan Hidup.
 - Penataan Ruang.
 - Pemerintahan.

3. Analisis Isu-isu Strategis, berisi penjelasan permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi dalam pembangunan daerah.
4. Gambaran Pengelolaan Keuangan serta Kerangka Pendanaan, berisi penjelasan tentang Pendapatan Daerah, Pajak, Retribusi Daerah, Dana pertimbangan dan sumber pendapatan daerah lainnya, Belanja Daerah, baik Belanja Langsung maupun Tidak Langsung, Pembiayaan Daerah, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah (SILPA), Pinjaman Daerah dan Investasi serta Penyertaan Modal Daerah dan Neraca Daerah (tentang kekayaan/aset daerah, kewajiban dan ekuitas daerah). Tergambar juga realisasinya selama tahun 2011-2012.
5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisi penjelasan tentang Visi pembangunan, Misi pembangunan dan Agenda Pembangunan Daerah.
6. Sasaran dan Strategi Program Pembangunan Daerah, berisi penjelasan tentang sasaran dan strategi Pembangunan Daerah.
7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, memuat rumusan kebijakan umum dan arah kebijakan setiap misi dan program pembangunan mewujudkan misi pembangunan yang menjadi acuan SKPD dalam menyusun Renstra.
8. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan, memuat penjelasan tentang program prioritas, target capaian yang terukur, SKPD penanggung jawab, disertai kebutuhan/ kerangka pendanaan yang bersifat

indikatif menurut bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

9. Penetapan Indikator Kinerja Daerah.

10. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 2

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANJAR

2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Banjar terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berada pada 114° 30' 20" dan 115° 33' 37" Bujur Timur serta 2° 49' 55" dan 3° 43' 38" Lintang Selatan. Luas wilayahnya 4.668,50 Km² atau sekitar 12,20 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara administratif, Kabupaten Banjar berbatasan dengan:

- a. Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah Utara;
- b. Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu di sebelah Timur;
- c. Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru di sebelah Selatan, dan;
- d. Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin di sebelah Barat.

Berdasarkan data Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2009, Kabupaten Banjar terbagi ke dalam 19 wilayah Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Aranio yaitu 1.166,35 Km² (24,98 %), dan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Martapura Timur, yaitu 29,99 Km² (0,64 %). Adapun rincian data luas wilayah Kabupaten Banjar menurut kecamatan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Banjar Menurut Kecamatan Tahun 2009

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)	Persentase
		Desa	Kelurahan		
1.	Aluh-Aluh	19	0	82,48	1,77
2.	Beruntung Baru	12	0	61,42	1,32
3.	Gambut	12	2	129,30	2,77
4.	Kertak Hanyar	10	3	45,83	0,98
5.	Tatah Makmur	13	0	35,47	0,76
6.	Sungai Tabuk	20	1	147,30	3,16
7.	Martapura	19	7	42,03	0,90
8.	Martapura Timur	20	0	29,99	0,64
9.	Martapura Barat	13	0	149,38	3,20
10.	Astambul	22	0	216,50	4,64
11.	Karang Intan	26	0	215,35	4,61
12.	Aranio	12	0	1.166,35	24,98
13.	Sungai Pinang	11	0	458,65	9,82
14.	Paramasan	4	0	560,85	12,01
15.	Pengaron	12	0	433,25	9,28
16.	Sambung Makmur	7	0	134,65	2,88
17.	Mataraman	15	0	148,40	3,18
18.	Simpang Empat	26	0	453,30	9,71
19.	Telaga Bauntung	4	0	158,00	3,38
	Jumlah	277	13	4.668,50	100,00

Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi dan Geofisika Banjarbaru pada tahun 2010, suhu udara di Kabupaten Banjar rata-rata berkisar antara 22,3°C sampai 32,8°C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Mei (32,8°C) dan suhu minimum terjadi pada bulan Juni dan Juli (22,3°C). Selain itu, sebagai daerah tropis

maka kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar 40,0 % sampai 100,0 %, dengan kelembaban maksimum pada bulan Pebruari, Maret, April, Oktober, Nopember dan Desember serta minimum pada bulan September.

Curah hujan bulanan berkisar antara 54,4 – 554,3 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret, yaitu 554,3 mm, dan yang terendah terjadi pada bulan Mei, yaitu 54,4 mm. Hari hujannya 263 hari dengan hari hujan terbanyak pada bulan Maret yaitu 27 hari. Tekanan udara berkisar antara 1.008,2 mb - 1.014,8 mb. Sedangkan kecepatan angin, setiap bulannya berkisar antara 2 - 16 knot. Penyinaran dengan intensitas tertinggi terjadi pada bulan Mei dan September, yaitu 4,83 % dan terendah pada bulan Desember yaitu sekitar 2,17 %.

Ketinggian wilayah Kabupaten Banjar berkisar antara 0 – 1,878 meter dari permukaan laut (dpl), dimana 35 % berada di ketinggian 0-7 m dpl, 55,54% ada pada ketinggian 50 – 300 m dpl, sisanya 9,45 % lebih dari 300 m dpl. Rendahnya letak Kabupaten Banjar dari permukaan laut menyebabkan aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar. Akibatnya sebagian wilayah selalu tergenang (29,93 %) sebagian lagi (0,58 %) tergenang secara periodik.

Pada umumnya tanah di wilayah ini bertekstur halus (77,62 %) yaitu meliputi tanah liat, berlempung, berpasir dan berdebu. Sementara 14,93% bertekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, liat berpasir, sisanya 5,39% bertekstur kasar yaitu pasir berlempung, pasir berdebu.

Kedalaman efektif tanahnya sebagian besar lebih besar dari 90 cm (66,45 %), sementara kedalaman 60 – 90 cm meliputi 18,77 %, dan 30 – 60 cm hanya 14,83 %.

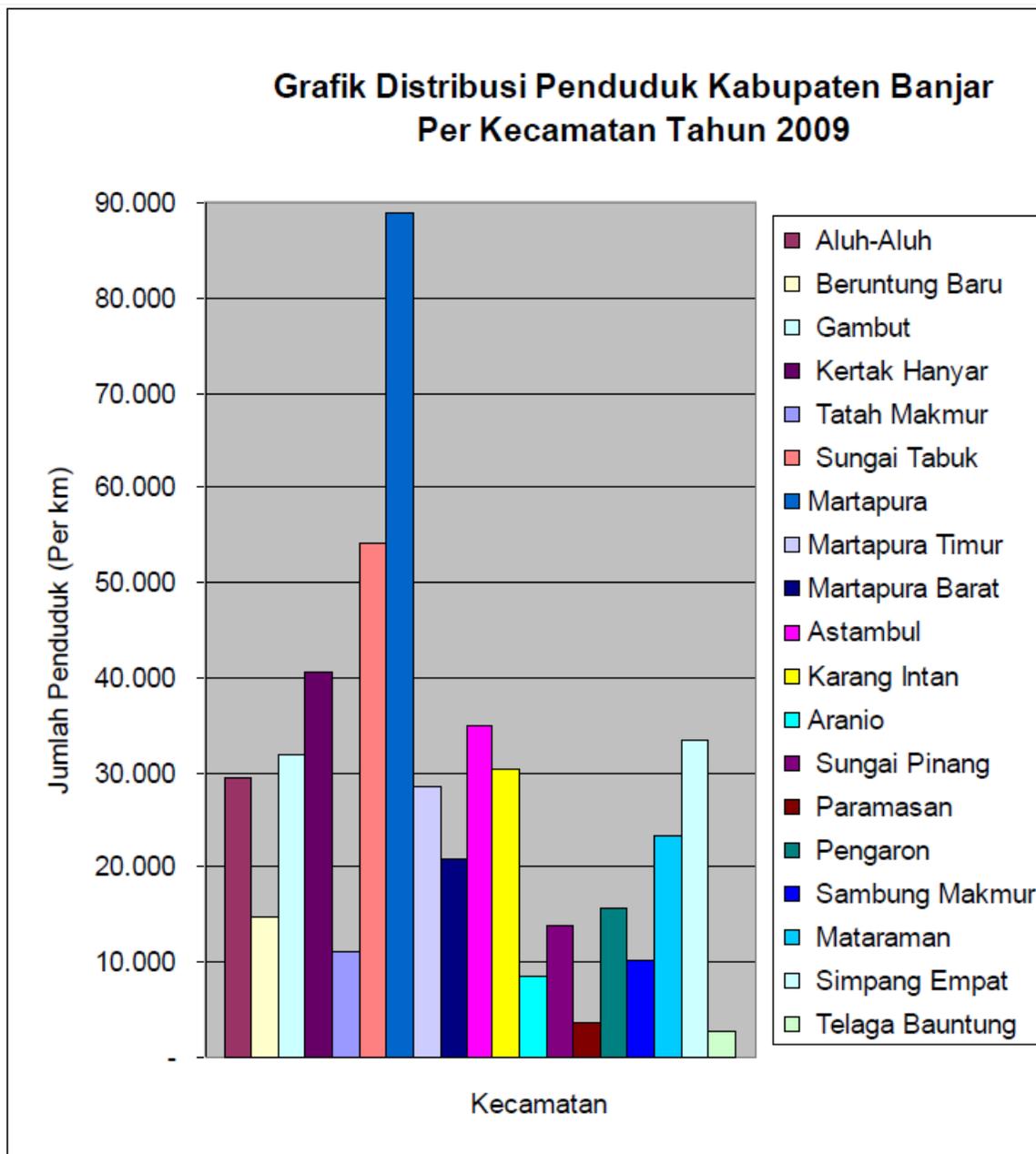
Menurut peta tanah eksplorasi Tahun 1981 skala 1 : 1.000.000 dari Lembaga Penelitian Bogor di wilayah Kabupaten Banjar dijumpai jenis tanah; tanah organosol, glei humus dengan bahan induk bahan aluvial dan fisiografi dataran meliputi 3,72 %. Tanah kompleks podsolik merah kuning dan laterit dengan bahan induk batuan baku dengan fisiografi dataran meliputi 14,29 %. Tanah latosol dengan bahan induk batuan beku dan fisiografi instrusi meliputi 24,84 %. Tanah kompleks podsolik merah kuning, latosol dengan batu induk endapan dan metamorf meliputi 28,57 %.

2.2 Kependudukan

Perkembangan penduduk Kabupaten Banjar tahun 2005 tercatat sebanyak 464.148 jiwa, sedangkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010 menunjukkan angka sebanyak 506.204 jiwa, ini berarti terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1,8 % per tahun.

Persoalan yang dihadapi pada bidang kependudukan terutama distribusi penduduk yang tidak merata, hal ini sangat dirasakan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat antara lain pelayanan dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur. Sejauh ini upaya yang dilakukan dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat seperti pemekaran kecamatan dan peningkatan fasilitas hingga

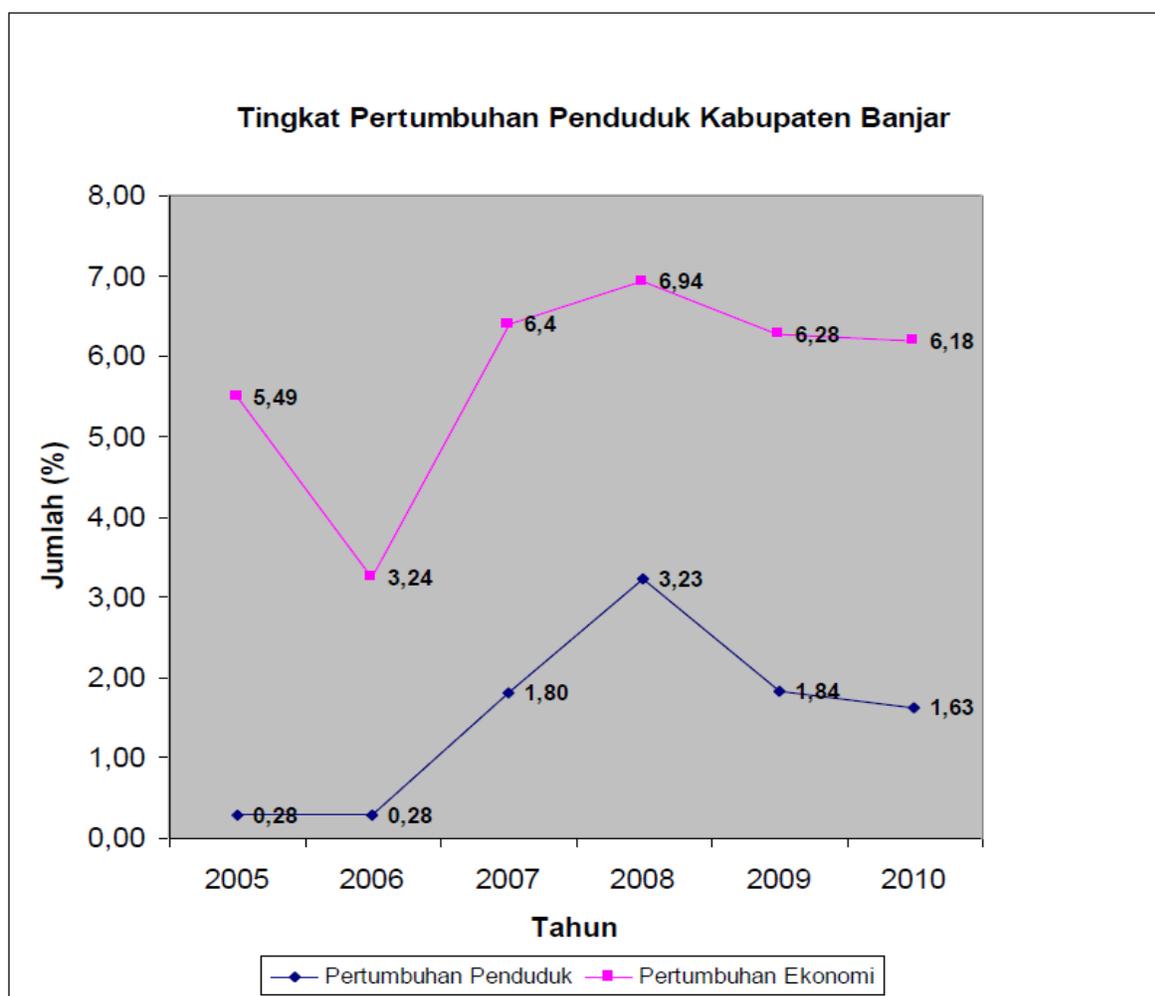
ke tingkat desa. Berikut sebaran penduduk di Kabupaten Banjar per kecamatan tahun 2009 sebagaimana termuat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Grafik Distribusi Penduduk Kab. Banjar Tahun 2009

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjar sebagaimana disebutkan di atas berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi

Kalimantan Selatan yaitu sekitar 1,98%. Namun pertumbuhan penduduk ini dimaknai bukan hanya harus berada di bawah laju pertumbuhan di tingkat provinsi maupun nasional, melainkan diharapkan berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi sehingga secara perkapita pertumbuhan ekonomi akan memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Secara faktual rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar tahun 2005 sampai dengan 2009 mencapai 6,18%. Berikut grafik yang menggambarkan perbandingan tingkat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2010 seperti pada gambar 2.2. di bawah ini:



Gambar 2.2. Grafik Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar Tahun 2005-2010

Adapun data mengenai kependudukan ditunjukkan oleh distribusi penduduk yang tidak merata pada beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar. Hal ini terlihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Aluh-Aluh	360	366	373	380	387
2.	Beruntung Baru	224	228	232	236	241
3.	Gambut	241	245	250	254	259
4.	Kertak Hanyar	534	544	553	563	573
5.	Tatah Makmur	534	544	553	563	573
6.	Sungai Tabuk	330	336	342	348	354
7.	Martapura	2.042	2.079	2.116	2.154	2.193
8.	Martapura Timur	887	903	919	936	953
9.	Martapura Barat	113	115	117	119	121
10.	Astambul	153	156	159	161	164
11.	Karang Intan	132	134	137	139	142
12.	Aranio	7	7	7	7	8
13.	Sungai Pinang	30	31	31	32	32
14.	Paramasan	6	6	6	6	6
15.	Pengaron	39	40	40	41	42
16.	Sambung Makmur	71	72	74	75	76
17.	Mataraman	149	152	154	157	160
18.	Simpang Empat	55	56	57	58	59

19.	Telaga Bauntung	55	56	57	58	59
	Jumlah	5.962	6.069	6.179	6.290	6.403

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2010

Berdasarkan data kepadatan penduduk Kabupaten Banjar di atas, maka tingkat kepadatan rata-rata adalah sebesar 337 jiwa/km dengan kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Martapura Kota yaitu sebesar 2.193 jiwa/km, sedangkan kepadatan terendah berada pada Kecamatan Paramasan yaitu sebesar 6 jiwa/km.

Sementara itu penduduk menurut suku yang mendiami wilayah Kabupaten Banjar: Suku Banjar sekitar 87,81%, Suku Jawa sekitar 7,24%, Suku Madura sekitar 3,17%, Suku Bukit sekitar 0,42% dan Suku Sunda sekitar 0,29%. Secara lengkap komposisi penduduk yang mendiami wilayah Kabupaten Banjar sebagaimana termuat dalam tabel 2.3. Meskipun komposisi penduduk yang cukup heterogen namun sejauh ini kehidupan sosial di masyarakat berlangsung dengan harmonis. Hal ini perlu juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk menjaga keharmonisan yang telah berlangsung.

Tabel 2.3. Jumlah penduduk berdasarkan suku di wilayah Kabupaten Banjar

No.	Suku	Jumlah (Jiwa)
1.	Banjar	361.692
2.	Jawa	29.805
3.	Bugis	828
4.	Madura	13.047
5.	Bukit	1.737
6.	Mandar	17

No.	Suku	Jumlah (Jiwa)
7.	Bakumpai	34
8.	Sunda	1.187
9.	Lainnya	3.554

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2010

2.3 Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Dalam lima tahun pelaksanaan RPJMD pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti dalam tabel 2.14 yang mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 5,49 % dan pada tahun 2009 menjadi 6,28 % terutama pada sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel, dan jasa-jasa. Rendahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 (3,24%) disebabkan oleh naiknya harga barang khususnya bahan kebutuhan pokok akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga tingkat konsumsi masyarakat menurun disebabkan daya beli masyarakat yang menurun. Rendahnya pertumbuhan ekonomi tahun 2006 ini juga disebabkan tingkat pertumbuhan sektor pertanian yang minus 1,82 persen akibat lahan pertanian mengalami banjir dan puso. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang disebabkan sebagian besar sektor mengalami penurunan diantaranya adalah sektor pertanian, pertambangan, listrik dan air bersih, pengangkutan dan komunikasi,

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa. Sedangkan apabila dilihat dari PDRB tanpa pertambangan, maka mengalami kenaikan dari 7,20 pada tahun 2008 menjadi 7,22 pada tahun 2009. Secara rinci masing-masing pertumbuhan antar sektor dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel. 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar 2005-2009

No.	Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Pertanian	3,02	- 1,82	3,71	6,79	3,97
2.	Pertambangan dan Penggalian	7,70	6,23	6,87	3,95	2,76
3.	Industri Pengolahan	6,63	5,29	6,73	6,30	8,89
4.	Listrik dan Air Bersih	5,90	2,17	3,45	7,88	3,56
5.	Bangunan	5,33	11,36	12,61	11,12	12,37
6.	Perdagangan, Restoran dan Hotel	6,80	3,68	7,02	6,64	8,83
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	3,33	6,32	3,99	10,82	8,13
8.	Keu, Persw. dan Jasa Perush.	3,97	6,42	20,17	9,55	7,19
9.	Jasa-jasa	7,54	7,08	4,63	8,77	6,93
PDRB tanpa pertambangan		4,79	2,76	6,07	7,20	7,22
PDRB dengan pertambangan		5,49	3,24	6,40	6,94	6,28

Sumber: PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2010

2.3.1.2 Laju Inflasi

Tingkat inflasi tahun 2006 mencapai 11,03, tingginya tingkat inflasi ini sangat memukul perekonomian masyarakat, dan tingkat konsumsi masyarakat juga menurun karena daya beli masyarakat yang menurun. Tahun 2007 tingkat inflasi mencapai 7,78, sedangkan untuk tahun 2008 tingkat inflasi juga tinggi yaitu

mencapai 11,62 yang disebabkan oleh kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Gambaran tentang perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Banjar tahun 2006-2008 dapat dilihat dari tabel 2.5. berikut ini.

Tabel 2.5. Tingkat Inflasi Kabupaten Banjar Tahun 2006-2008

No.	Akhir Periode Tahun Kalender	2006		2007		2008	
		Kab. Banjar	Nasional	Kab. Banjar	Nasional	Kab. Banjar	Nasional
1.	Januari	1,16	1,36	1,53	1,04	2,87	1,45
2.	Pebruari	0,52	0,58	0,49	0,62	0,51	0,65
3.	Maret	-0,36	0,03	1,24	0,24	0,57	0,95
4.	April	1,99	0,05	-0,28	-0,16	-0,17	0,57
5.	Mei	2,42	0,37	0,18	0,10	0,77	1,41
6.	Juni	1,62	0,45	-0,56	0,23	2,48	2,13
7.	Juli	0,23	0,45	0,40	0,72	1,12	1,37
8.	Agustus	-0,17	0,33	0,27	0,75	-0,13	0,51
9.	September	0,03	0,38	1,91	0,80	1,22	0,97
10.	Oktober	1,23	0,86	0,76	0,79	1,39	0,45
11.	November	2,05	0,34	0,46	0,18	0,49	0,12
12.	Desember	-0,16	1,21	1,15	1,10	-0,03	-0,04
	Jumlah	11,03	6,60	7,78	6,59	11,62	11,06

Sumber: Indikator Ekonomi Kabupaten Banjar Tahun 2009

2.3.1.3 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan rata-rata output yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun. Pendapatan per kapita Kabupaten Banjar sesuai tabel 2.6, dimana pada tahun 2005 sebesar 7.236.080 (harga berlaku) dengan

tingkat pertumbuhan sebesar 11,94 persen, sedang pendapatan per kapita (harga konstan) sebesar 5.599.767 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,79 %. Pada tahun 2009 pendapatan perkapita Kabupaten Banjar atas harga berlaku sebesar 12.285.825 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 11,57 sedang atas dasar harga konstan sebesar 6.417.637 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,35 %. Pertumbuhan PDRB ini masih berada di atas rata-rata Provinsi.

Tabel 2.6. PDRB Perkapita Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	PDRB Perkapita	Pertumbuhan (%)	PDRB Perkapita	Pertumbuhan (%)
2005	7.236.080	11,94	5.599.767	4,79
2006	8.431.539	16,06	5 612 389	1,53
2007	9.503 226	14,35	5 859 246	4,40
2008	11 011 957	15,88	6 150 046	4,96
2009	12 285 825	11,57	6 417 637	4,35

Sumber: PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2010

2.3.1.4 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi

berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya.

Berbagai program pembangunan bidang pertanian dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai swasembada pangan melalui sub sektor pertanian tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Data dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan menunjukkan bahwa produksi padi dari tahun 2005 s/d 2009 mengalami penurunan 7,59 persen. Hal itu disebabkan banyaknya petani yang mengalami gagal panen karena terjadinya banjir. Komoditi jagung dalam lima tahun ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2005 sebesar 900 ton menjadi 1.697 ton pada tahun 2009 atau terjadi kenaikan sebesar 88,5 persen, sedang kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar mengalami penurunan seperti yang digambarkan pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7. Produksi Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009

No.	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Padi Sawah	213.199	163.500	200.285	219.678	195.986
2.	Padi Ladang	26.403	26.550	24.599	32.532	25.419
3.	Padi	239.602	190.050	224.884	252.209	221.405
4.	Jagung	900	546	680	486	1.697
5.	Kedelai	0	0	0	2	1

No.	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2005	2006	2007	2008	2009
6.	Kacang Tanah	4.695	5.348	5.966	6.868	4.616
7.	Kacang Hijau	39	19	22	143	39
8.	Ubi Kayu	5.457	3.802	2.734	3.438	2.460
9.	Ubi Jalar	1.356	1.145	790	488	615

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Banjar Tahun 2010

Beberapa hasil produksi komoditas perkebunan yang cukup menonjol dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan cukup signifikan kontribusinya dalam produksi pertanian secara luas. Berkaitan dengan produksi ini maka karet sebagai komoditas perkebunan rakyat yang telah digeluti bertahun-tahun oleh masyarakat dan investor di bidang perkebunan menunjukkan peningkatan yang cukup baik, sehingga merupakan komoditas unggulan. Meskipun sering juga terjadi fluktuasi akibat harga pasar karet yang tidak stabil, namun komoditas karet dapat dijadikan andalan dalam upaya mengembangkan ekonomi rakyat di Kabupaten Banjar mengingat luasnya perkebunan karet yang terus berkembang. Rata-rata produksi komoditas karet di Kabupaten Banjar pada lima tahun terakhir 114.822,23 kwintal per tahun.

Upaya peningkatan komoditas karet di Kabupaten Banjar dilakukan melalui Program Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Berikut gambaran tentang Produksi Komoditas Perkebunan Rakyat di Kabupaten Banjar sebagaimana tabel 2.8.

Tabel 2.8. Produksi Komoditas Perkebunan Rakyat di Kabupaten Banjar

No.	KOMODITI	TAHUN PRODUKSI (KWINTAL)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Kelapa Dalam	11,142.3	11,432.2	19,140.3	19,744.7	25,953.3
2.	Sagu	10,374.0	11,514.2	11,515.8	11,671.0	13,378.2
3.	Karet	105,134.	110,456.	108,023.0	122,754.	127,743.
4.	Kopi	3,241.0	3,619.0	4,767.9	4,895.7	5,050.1
5.	Cengkeh	144.0	148.8	148.8	190.7	189.2
6.	Lada	1,184.0	1,093.4	1,093.4	1,308.0	1,340.9
7.	Kemiri	1,361.0	1,423.7	1,423.9	3,318.4	3,652.9
8.	Aren	2,975.0	3,178.7	3,178.7	3,127.9	3,687.3
9.	Jambu Mete	386.1	325.0	325.1	331.6	303.9
10.	Kelapa Sawit	-	-	-	-	2,394.6
11.	Pinang	-	-	123.7	173.7	431.7
12.	Kapuk	14.0	14.4	14.4	27.6	22.4
13.	Kenanga	-	16.2	16.2	30.6	81.6
14.	Kayu Manis	-	-	-	105.0	210.0
15.	Purun	3.5	3.5	93.5	99.0	180.0
16.	Nilam	-	-	-	-	26.2
	Jumlah	135,95	247,22	149,864.	167,77	184,64

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Banjar Tahun 2010

Produksi peternakan sebagai salah satu komoditas yang memberikan sumbangan dalam menjamin ketersediaan pangan khususnya sumber protein hewani sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Oleh karena itu program penyebaran dan pengembangan ternak perlu terus ditingkatkan, sehingga harapan swasembada sapi potong ke depannya bisa tercapai. Data yang diperoleh dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan menunjukkan bahwa populasi ternak besar yang meliputi sapi, kerbau dan kuda dalam lima tahun ini ada kecenderungan mengalami penurunan. Populasi unggas khususnya ayam petelur

dan pedaging setiap tahun mengalami peningkatan, sedang ayam buras terus mengalami penurunan selama lima tahun ini.

Produksi peternakan khususnya daging secara keseluruhan mengalami kenaikan selama lima tahun ini, meskipun produksi daging sapi mengalami penurunan namun daging dari unggas mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Akan tetapi bila dihubungkan dengan kebutuhan akan daging sapi di Kabupaten Banjar masih terdapat kekurangan produksi daging sapi.

Tabel 2.9. Populasi ternak besar, ternak kecil, unggas dan aneka ternak

No.	Jenis ternak	2005	2006	2007	2008	2009
A. Ternak besar:						
	1. Sapi	15.169	19.608	17.212	17.340	17.072
	2. Kerbau	1.426	1.428	1.397	1.435	1.342
	3. Kuda	600	592	578	435	192
B. Ternak Kecil:						
	1. Kambing	8.786	9.532	10.384	10.415	12.969
	2. Domba	11	11	11	12	12
C. Unggas:						
	1. Ayam petelur	131.200	198.532	227.254	273.000	343.276
	2. Ayam pedaging	3.875.000	3.808.809	3.949.998	3.789.388	6.379.542
	3. Ayam buras	1.608.087	1.728.966	1.486.718	837.552	652.245
	4. Itik	229.000	295.905	384.584	204.316	244.983

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Banjar Tahun 2010

Produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Produksi perikanan di Kabupaten Banjar selama lima tahun masih di dominasi perikanan tangkap yaitu 59,41 persen dari jumlah produksi sebesar 32.983,50 ton pada tahun 2009. Meskipun demikian perikanan budidaya selama lima tahun ini mengalami peningkatan sangat pesat dari

2.548,90 ton pada tahun 2005 menjadi 13.385,5 ton pada tahun 2009 atau sebesar 425,31 persen. Dari pertumbuhan produksi perikanan budidaya, budidaya kolam memiliki pertumbuhan paling pesat seperti terlihat pada tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10. Produksi Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009

Produksi Perikanan	Produksi (Ton)				
	2005	2006	2007	2008	2009
a. Budidaya	2.548,90	3.875,50	9.607,60	12.506,50	13.385,50
- Tambak	6,00	6,30	6,50	8,50	11,60
- Kolam	646,00	2.419,00	6.897,50	8.962,00	9.012,10
- Karamba	1.761,30	1.115,40	505,00	678,50	1.153,00
- Mina Padi	13,20	13,60	9,40	11,60	0,00
- Jaring Apung	122,40	321,20	2.189,30	2.846,00	3.208,80
b. Tangkap	15.463,80	17.035,80	18.095,37	18.095,34	19.598,00
- Laut	6.301,10	7.048,40	8.105,65	8.105,62	14.213,00
- Perairan Umum	9.162,70	9.987,40	9.989,72	9.989,72	5.385,00
Jumlah	18.012,70	20.911,30	27.702,90	30.601,80	32.983,50

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar Tahun 2010

Potensi perikanan di Kabupaten Banjar sampai dengan saat sekarang hanya sebagian yang masih dapat dikembangkan. Mencermati keperluan akan konsumsi penduduk terhadap protein hewani yang dapat dipenuhi dari sumber daya perikanan, menjadikan Kabupaten Banjar sebagai daerah yang sangat potensial untuk memenuhi keperluan dimaksud. Hal ini sebagaimana beberapa daerah yang dapat dikembangkan menjadi kawasan minapolitan dan pengembangan wilayah

pesisir yang banyak memberi harapan bagi perkembangan perekonomian masyarakat di bidang perikanan.

Wilayah pesisir merupakan daerah yang strategis untuk dikembangkan karena daerah ini merupakan peralihan antara ekosistem darat dan laut, memiliki potensi sumber daya pesisir, laut dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya (baik jenis maupun jumlahnya). Dengan kondisi strategis dan kekayaan sumber daya yang sangat besar tersebut, dapat memicu keinginan berbagai pihak terkait (stakeholder) seperti instansi Pemerintah, Dunia usaha/swasta dan masyarakat untuk meregulasi dan memanfaatkannya. Bidang kelautan dan perikanan merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang berperan penting dalam penyediaan pangan dan gizi, penyumbang devisa melalui ekspor penciptaan dan peningkatan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama pembudidaya/nelayan.

Lokasi yang menjadi andalan untuk perikanan tangkap adalah Kecamatan Aluh-aluh yang mempunyai wilayah pesisir satu-satunya di Kabupaten Banjar dengan luas perairan laut sebesar 34,99 Km dan panjang garis pantai/sungai 26,36 Km. Dari 19 desa di Kecamatan Aluh-Aluh terdapat 12 Desa pantai/pesisir yang dikembangkan untuk potensi perikanan laut.

Disamping potensi perikanan tangkap berupa kawasan pesisir sebagaimana dijelaskan di atas, Kabupaten Banjar juga memiliki kawasan minapolitan. Kawasan minapolitan di Kabupaten Banjar merupakan pengembangan kegiatan budidaya

perikanan air tawar yang berada dan berbatasan langsung dengan Sungai Martapura dan Jalan Martapura Lama di sebelah utara, kemudian Kota Banjarbaru di sebelah Selatan, Kota Martapura di sebelah Timur dan Desa-desa pertanian di Kecamatan Martapura Barat dan Kecamatan Sungai Tabuk di sebelah Barat. Melihat kondisi demikian kawasan ini dikelilingi dan berbatasan langsung dengan jalur transportasi darat dan sungai, pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kegiatan pusat kota pemerintahan, jasa dan perdagangan serta kegiatan budidaya pertanian lahan basah.

2.3.1.5 Ketimpangan Kemakmuran dan Pemerataan Pendapatan

Ketimpangan kemakmuran dan kesenjangan pendapatan suatu daerah biasa diukur dengan menggunakan indikator angka "gini ratio". Ketimpangan dikategorikan rendah apabila masuk dalam kisaran $0 < \text{gini ratio} < 0,35$. Kesenjangan kemakmuran (Pendapatan) di Kabupaten Banjar masih dapat dikatakan rendah karena hasil perhitungan gini ratio Tahun 2009 adalah 0,27 sementara dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang Tahun 2009 sebesar 0,28.

Pemerataan pendapatan di Kabupaten Banjar, sebagaimana tergambar pada tabel mengenai Gini ratio dan distribusi pendapatan di bawah ini dimana tahun 2005 sebesar 23,58 persen, 2006 sebesar 21,53 persen, sedangkan tahun 2007 sebesar 22,77 persen dan tahun 2008 sebesar 20,93 persen. Tahun 2009 sebesar 23,34 persen, ini berarti bahwa pendapatan di Kabupaten Banjar 21,53 s/d 23,34 persennya dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dan apabila

dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan maka Kabupaten Banjar masih lebih baik seperti terlihat pada tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11. Gini Rasio dan Distribusi Pendapatan

Tahun	Pendapatan yang dinikmati oleh yang berpenghasilan			
	Gini Rasio		40 Persen lebih rendah	
	Prov. KalSel	Kab. Banjar	Prov. KalSel	Kab. Banjar
2005	0,32	0,26	20,99	23,58
2006	0,31	0,29	22,24	21,53
2007	0,28	0,26	23,75	22,77
2008	0,25	0,24	22,87	20,93
2009	0,28	0,27	21,94	23,34

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010

2.3.2 Kesejahteraan Sosial

2.3.2.1 Pendidikan

Perubahan paradigma pembangunan pada pembangunan manusia terus dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hal itu dapat dilihat dari komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menaikkan anggaran pendidikan sehingga dapat mencapai 20 persen dari total anggaran (APBD) tahun bersangkutan. Kinerja bidang pendidikan dapat terlihat dari data pada tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12. Angka melek huruf, Angka rata-rata lama sekolah, APM, dan APK serta Angka Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Banjar Tahun 2005 s/d 2009

No.	Pendidikan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Angka Melek Huruf	96,00	76,18	79,44	95,99	96,02
2.	Angka rata-rata lama sekolah	5,30	7,10	7,10	7,10	7,16
3.	Angka Partisipasi Murni					
	- SD	98,00	89,01	90,27	93,47	95,12
	- SMP	59,56	64,40	70,73	71,05	81,27
	- SMA	10,54	32,08	32,36	35,50	74,92
4.	Angka Partisipasi Kasar					
	- SD	116,50	105,15	106,25	109,20	115,73
	- SMP	73,11	75,52	83,73	89,67	95,80
	- SMA	14,08	45,00	48,34	56,41	61,78
5.	Angka Pendidikan yang ditamatkan	2,76	2,83	3,21	3,57	3,63

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2010

2.3.2.2 Kesehatan

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kesehatan (Indeks Kesehatan) yang diukur dari angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup dan presentase balita gizi buruk. Data mengenai bidang kesehatan menunjukkan bahwa kelangsungan hidup bayi masih memerlukan penanganan yang lebih optimal dalam persalinan terhadap ibu yang melahirkan.

Angka usia harapan hidup penduduk Kabupaten Banjar menunjukkan peningkatan dari tahun 2005 adalah 63,5 dan pada tahun 2009 mencapai 64,93. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Sedangkan persentase balita gizi buruk juga mengalami penurunan dari tahun ke

tahun. Untuk tahun 2005 persentase balita gizi buruk mencapai 0,04, sedangkan pada tahun 2009 turun menjadi 0,01 . Hal ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir persentasi balita gizi buruk terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Perkembangan bidang kesehatan ini menunjukkan bahwa, penanganan permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banjar memerlukan dukungan program strategis yang dapat berkontribusi positif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berikut ini termuat data Usia Harapan Hidup, angka kelangsungan hidup bayi dan balita gizi buruk pada tabel 2.13.

Tabel 2.13. Angka kelangsungan hidup bayi, Angka usia harapan hidup dan persentase balita gizi buruk di Kabupaten Banjar tahun 2005 s/d tahun 2009.

No.	Kesehatan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	55	55	56	55	55
2.	Angka Usia Harapan Hidup	63,5	64,0	64,04	64,62	64,93
3.	Persentase Balita Gizi Buruk	0,04	0,13	0,05	0,04	0,01

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2010

Pembangunan bidang kesehatan dapat dilaksanakan secara maksimal jika didukung oleh ketersediaan fasilitas pokok dan penunjang penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang kesehatan. Hal ini dirasakan sangat berpengaruh mengingat pada beberapa permasalahan yang telah disampaikan terdahulu seperti distribusi penduduk yang tidak merata dan luasnya cakupan pelayanan yang harus dilakukan memerlukan suatu upaya khusus untuk memberikan pelayanan publik

termasuk di bidang kesehatan. Berikut data mengenai sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banjar pada tabel 2.14:

Tabel 2.14. Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan

No.	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
A.	Fasilitas Kesehatan:					
1.	Rumah Sakit	3	3	3	3	3
2.	Puskesmas Rawat Inap	3	3	3	3	3
3.	Puskesmas	22	22	22	22	20
4.	Puskesmas Pembantu	71	70	70	70	69
5.	Puskesmas Keliling	89	28	28	27	24
6.	Puskesmasdes	-	-	51	95	285
7.	Posyandu	411	440	440	478	496
B.	Tenaga Kesehatan					
1.	Paramedis dan Non Medis:					
	1. Dinas Kesehatan	-	49	49	49	33
	2. Rumah Sakit	-	187	187	273	237
	3. Gudang Farmasi	-	6	6	8	8
	4. Puskesmas	473	562	562	592	621
	5. Lainnya	-	-	-	-	5
2.	Bidan Desa	180	196	196	241	278
3.	Tenaga Kesehatan dan Spesialis :					
	a. Dinas Kesehatan	2	2	2	2	3
	b. Rumah Sakit	17	17	17	19	19
	c. Puskesmas	32	55	55	36	50

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2005-2009

Program keluarga berencana di Kabupaten Banjar menunjukkan hasil yang menggembirakan, hal itu bisa dilihat dari data peserta KB aktif dan akseptor selama lima tahun ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Gambaran dimaksud ditunjukkan pada terjadinya penambahan akseptor baru. Data mengenai jumlah akseptor termuat dalam tabel 2.15 di bawah ini, dimana pada tahun 2005 jumlah akseptor sebanyak 60.565 akseptor dengan akseptor baru sebanyak 12.107

akseptor, pada tahun 2009 jumlah akseptor aktif bertambah menjadi 72.928 akseptor dengan akseptor baru sebanyak 22.838 akseptor.

Tabel 2.15. Jumlah akseptor di Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009

No.	Aksesor	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah akseptor aktif	60.565	61.611	63.983	69.842	72.928
2.	Aksesor baru	12.107	16.295	17.676	18.196	22.838

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Banjar Tahun 2010

2.3.2.3 Kemiskinan

Banyak program pemberdayaan telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Banjar yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.16 mengenai angka kemiskinan berikut:

Tabel 2.16. Data Angka Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2010

No.	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	23.800	22.671	19.986	17.756	18.177
2.	RT Sasaran	34.142	34.676	34.029	31.651	31.651

No.	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
3.	% Penduduk Miskin	5,18	4,82	4,24	3,68	3,69
4.	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita Bln)	116.596	132.029	142.893	164.654	202.784

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banjar Tahun 2010

2.3.2.4 Kesempatan Kerja

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Banjar tahun 2005 sebesar 225.325 jiwa dengan tingkat kesempatan kerja sebesar 208.647 jiwa atau 92,60 persen. Pada tahun 2006 jumlah angkatan kerja sebesar 232.836 jiwa dengan tingkat kesempatan kerja tercatat sebesar 215.544 jiwa atau 92,57 persen. Ini berarti tingkat pengangguran di Kabupaten Banjar pada tahun 2006 sebesar

17.292 jiwa atau 7,43 persen dan pada tahun 2009 tingkat angkatan kerja ini menjadi 223.393 jiwa dengan tingkat pengangguran sebesar 9.255 jiwa. Berarti pengangguran di Kabupaten Banjar mengalami penurunan hingga angka 4,15 %. Penurunan angka pengangguran ini merupakan salah satu indikasi yang positif bahwa kegiatan perekonomian di Kabupaten Banjar berkembang dengan baik. Gambaran tentang kesempatan kerja selama tahun 2005-2009 termuat pada tabel 2.17 berikut ini.

Tabel 2.17. Kesempatan Kerja di Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009

No.	Kegiatan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Bekerja	208.647	215.544	193.306	202.183	214.138
2.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	92,60	92,57	93,37	95,12	95,85
3.	Mencari Pekerjaan	16.678	17.292	13.734	9.255	9.255
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,40	7,43	6,63	4,88	4,15
	Total	225.325	232.836	207.040	280.969	223.393

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2010

2.3.2.5 Kesempatan Kerja

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup 3 (tiga) bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah oleh UNDP dibagi ke dalam tiga golongan yaitu: rendah (kurang dari 50), sedang/menengah bawah (50- 65,99), menengah atas (antara 66 - 79,99) dan tinggi (80 ke atas).

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan untuk wilayah Kabupaten Banjar, indeks pembangunan manusia yang telah dicapai pada tahun 2005 adalah 68,00 dan pada tahun 2008 telah mencapai 70,16. Hal ini menunjukkan satu perkembangan yang cukup baik dimana sesuai dengan kriteria dan tingkatan status pembangunan manusia menurut ukuran UNDP yang telah dirumuskan di atas dimana capaian pada tahun 2005 sampai dengan 2008 tersebut berada pada tingkatan status menengah atas antara 66 sampai dengan 79,99. Data historis yang telah dicapai dari tahun 2005-2008 tersebut secara rinci dimuat pada tabel 2.18.

Tabel 2.18. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar Tahun 2005-2008

No.	Tahun	IPM
1.	2005	68,00
2.	2006	68,97
3.	2007	69,43
4.	2008	70,16

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar Tahun 2008

2.3.3 Seni Budaya dan Olah Raga

Kebudayaan menjadi identitas suatu daerah. Bagian terbesar penduduk yang ada di Kabupaten Banjar adalah etnis Banjar, serta etnis Dayak. Perkembangan kebudayaan dimaksud sangat ditentukan oleh interaksi tiga pilar utama yaitu: 1). nilai-nilai seni budaya yang berlaku di masyarakat; 2). kegiatan yang dilakukan oleh pemangku seni budaya atau tokoh adat; dan 3). peran pemerintah daerah.

Terbentuknya Lembaga Adat dan Kekerabatan Kesultanan Banjar (LAKKB) menjadi pilar keempat guna membangun interaksi seni budaya Banjar.

Pelestarian nilai-nilai budaya sangat perlu dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya melalui pagelaran seni, festival tari dan pertunjukan seni budaya lainnya, namun perlu dipadukan dengan bidang lainnya melalui kurikulum pendidikan, literatur atau buku yang menjadi rujukan budaya Banjar sehingga pelestarian dan pengembangan seni budaya ini dapat berlangsung secara baik dan berakar di masyarakat.

Pembangunan bidang kebudayaan ini diharapkan dapat menjadi satu kekuatan di masyarakat luas dalam pelestarian nilai-nilai luhur dalam perilaku kehidupan masyarakat dan menjadi satu modal kekuatan pembangunan.

Pengembangan dan pelestarian seni budaya dan olah raga terus diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar melalui pembinaan serta peran aktif dalam menyelenggaraan berbagai event/kegiatan kesenian khususnya kesenian daerah dan olah raga baik yang dilakukan di daerah maupun luar daerah. Perkembangan kesenian bisa dilihat dari jumlah group kesenian yang ada di Kabupaten Banjar tahun 2005 sebanyak 313 group menjadi 397 group pada tahun 2009. Sedangkan perkembangan olah raga dapat dilihat dari jumlah club olah raga yang terdaftar pada tahun 2005 sebanyak 23 club menjadi 27 club, dengan 14 gedung olah raga pada tahun 2005 menjadi 18 gedung olah raga pada tahun 2009 yang dibangun oleh pemerintah maupun masyarakat.

Tabel 2.19. Jumlah Group/Gedung Kesenian dan Club/Gedung Olahraga di Kabupaten Banjar

Uraian	Jumlah			
	2006	2007	2008	2009
Grup Kesenian	338	368	374	397
Gedung Kesenian	-	-	-	-
Club Olah Raga	27	27	27	27
Gedung Olah Raga	15	16	17	18

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab. Banjar Tahun 2010

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Ruang lingkup aspek pelayanan umum ini mencakup pelayanan dasar berupa pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum. Penyelenggaraan aspek pelayanan umum ini dimaksudkan untuk memberikan akses yang lebih baik kepada publik.

Secara terinci pada bagian selanjutnya akan dijelaskan berupa eksisting dari beberapa bidang yang termasuk ke dalam aspek pelayanan umum ini sehingga memberikan gambaran keperluan dasar untuk disediakan pada periode pembangunan 5 tahun selanjutnya.

2.4.1 Pelayanan Dasar

2.4.1.1 Pendidikan

2.4.1.1.1 Pendidikan Umum

Pembangunan bidang pendidikan terus dipacu khususnya pendidikan dasar melalui program-program: peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur, pendidikan anak usia dini, Wajib Belajar (WAJAR) pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta program manajemen pelayanan pendidikan.

Keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Banjar, periode 2005 – 2010 dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Rasio-Rasio Sekolah serta Guru pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana digambarkan pada tabel 2.20 berikut ini :

Tabel 2.20. Jumlah Sarana dan Prasarana serta Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
A.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan					
	Gedung Sekolah:					
	• SD Negeri	346	350	350	356	358
	• SD Swasta	2	3	3	3	3
	• SMP Negeri	3	39	39	53	60
	• SMP Swasta	4	4	4	6	6
	• SMA Negeri	6	7	7	7	9
	• SMA Swasta	5	5	5	5	4
	• SMK Negeri	2	2	2	3	4
	• SMK Swasta	5	1	1	1	1
	Ruang kelas:					
	• SD Negeri	1.967	2.209	2.051	2.121	2.159
	• SD Swasta	10	15	10	19	17
	• SMP Negeri	236	231	289	286	292
	• SMP Swasta	19	24	24	34	34
	• SMA Negeri	65	71	68	78	84
	• SMA Swasta	29	27	28	33	30
	• SMK Negeri	23	29	29	33	36
	• SMK Swasta	7	8	8	10	10

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
	Guru:					
	• SD Negeri	3.052	3.415	3.415	2.985	3.501
	• SD Swasta	15	26	26	36	24
	• SMP Negeri	700	808	808	909	1.070
	• SMP Swasta	72	76	76	110	143
	• SMA Negeri	176	221	221	234	260
	• SMA Swasta	100	100	100	113	100
	• SMK Negeri	80	84	84	92	130
	• SMK Swasta	29	31	31	29	27
B.	Mutu Pendidikan Dasar					
	1. Angka partisipasi sekolah	108,17	108,17	112,01	113,61	115,73
	2. Ratio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1,05	1,05	1,06	1,08	1,09
	3. Ratio guru/murid	7,41	7,41	7,46	7,78	11,81
	4. Ratio guru/murid per kelas rata-rata	5,27	5,27	5,10	5,59	6,26
	5. Ratio siswa/sekolah SD	127	125	125	128	125
	6. Ratio siswa/kelas SD	22	20	20	21	46
	7. Jumlah murid SD Negeri	43.875	43.991	43.991	45.512	46.045
	8. Jumlah murid SD Swasta	199	267	267	301	317
	9. Jumlah murid SMP Negeri	5.179	6.126	6.126	7.049	8.835
	10. Jumlah murid SMP Swasta	580	836	836	1.058	974
C.	Mutu Pendidikan Menengah					
	1. Angka partisipasi sekolah	78,04	78,04	89,67	82,46	82,75
	2. Ratio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	0,54	0,54	0,42	0,39	0,48
	3. Ratio guru/murid	12,24	12,24	9,24	8,34	8,35
	4. Ratio guru/murid per kelas rata-rata	3,58	3,58	2,97	2,71	2,76
	5. Ratio siswa/sekolah SMP	823	162	162	137	146
	6. Ratio siswa/sekolah SMA	216	303	303	294	229
	7. Ratio siswa/kelas SMP	23	27	27	25	65
	8. Ratio siswa/kelas SMA	31	34	34	31	70
	9. Jumlah murid SMA Negeri	2.222	2.466	2.466	2.635	2.794
	10. Jumlah murid SMA Swasta	823	878	878	748	709
	11. Jumlah murid SMK Negeri	838	876	876	968	1.366
	12. Jumlah murid SMK Swasta	334	329	329	346	354

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2005-2009

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kabupaten Banjar merupakan pilar utama dalam prioritas pembangunan daerah. Terkait erat dengan persoalan luas

wilayah dan distribusi penduduk yang tidak merata menjadikan upaya peningkatan pelayanan pendidikan ini perlu dilakukan satu langkah percepatan. Sejak tahun 2008 pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD dapat direalisasikan. Pada tahun 2010 proporsi anggaran pendidikan sudah berkisar lebih dari 30% dari APBD Kabupaten Banjar.

Prioritas kegiatan di bidang pendidikan lebih ditekankan pada peningkatan fasilitas pendidikan baik di tingkat dasar maupun menengah. Termasuk dalam bagian ini adalah peningkatan mutu tenaga pendidik melalui peningkatan kompetensi guru sehingga secara bertahap dapat memenuhi standar pelayanan pendidikan.

Tabel 2.21. Data Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2009

No	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas (%)			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1.	SD	53,10	30,92	0	15,98
2.	SLTP	80	17,06	-	2,94
3.	SLTA	86,56	9,22	-	4,22

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2009

Dengan adanya program-program seperti telah disebutkan di atas, kinerja yang dicapai Pemerintah Kabupaten Banjar pada jenjang Pendidikan Dasar yaitu Angka Partisipasi Sekolah cukup menggembirakan, dimana sampai pada tahun 2009 sudah mencapai 115,73. Untuk ratio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tergambar pada tahun 2009 mencapai angka 1,09. Sementara itu

pada jenjang pendidikan menengah pada tahun 2009 sebesar 0,48. Hal ini menggambarkan perlunya meningkatkan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, karena peserta didik lulusan SD kebanyakan melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi.

Untuk penambahan tenaga pengajar terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar yang ditunjukkan dengan data ratio guru/murid pada jenjang pendidikan dasar pada tahun 2009 mencapai 11,81 dan pendidikan menengah pada tahun yang sama mencapai 8,35. Berdasarkan data di atas maka pembangunan pendidikan di Kabupaten Banjar diperlukan untuk memenuhi pada rasio-rasio ideal indikator pendidikan.

Tabel 2.22. Mutu Pendidikan di Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2005	2006	2007	2008	2009
1.	Angka Kelulusan:						
	a. SD/MI/SDLB	Persen	99,12	99,27	99,31	99,37	99,46
	b. SLTP/MTs/SMPLB	Persen	97,21	93,96	94,28	89,43	92,70
	c. SMU/MA/SMK/PLB	Persen	98,80	97,63	92,80	91,20	93,63
2.	Angka Putus Sekolah:						
	a. SD/MI/SDLB	Persen	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6
	b. SLTP/MTs/SMPLB	Persen	1,40	2,12	1,38	1,55	1,12
	c. SMU/MA/SMK/PLB	Persen	2,10	1,37	3,11	1,82	1,79
3.	Jumlah Prestasi Siswa dalam Olimpiade / Kejuaraan Tingkat Nasional:						
	a. SD/MI/SDLB	-	-	-	-	-	-
	b. SLTP/MTs/SMPLB	-	-	-	-	-	2(MTQ)
	c. SMU/MA/SMK/PLB	-	-	-	-	-	1

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2010

Gambaran mengenai mutu pendidikan dapat dilihat dari beberapa hal meliputi angka kelulusan, angka putus sekolah termasuk prestasi yang dipakai oleh murid dalam berbagai lomba dan nilai kelulusan. Sejauh ini perkembangan prestasi yang dicapai belum terlalu banyak dan masih harus ditingkatkan. Sementara itu untuk tingkat kelulusan dari tahun 2007 untuk tingkat SD/MI/SDLB mencapai angka 99,31 % kemudian pada tahun 2009 meningkat tipis menjadi 99,46 %, tingkat SLTP/MTs/SMPLB mencapai angka 94,28 % kemudian pada tahun 2009 menurun menjadi 92,70%, tingkat SMU/MA/SMK/PLB mencapai angka 92,80 % kemudian pada tahun 2009 dapat ditingkatkan menjadi 93,63 %. Berdasarkan perkembangan angka kelulusan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kelulusan yang dicapai baik dari tingkat SD, SLTP maupun SLTA rata-rata meningkat namun untuk perkembangan selanjutnya perhatian lebih diarahkan kepada upaya kelulusan tingkat SLTP dan SLTA seiring dengan upaya peningkatan kualitas kelulusan yang ditetapkan sesuai standar nasional.

Sementara itu untuk angka putus sekolah untuk tingkat SD pada tahun 2007 sebesar 1,8 % dan pada tahun 2009 dapat diturunkan menjadi 1,6%. Sementara itu untuk angka putus sekolah untuk tingkat SLTP pada tahun 2007 sebesar 1,38 % dan pada tahun 2009 dapat diturunkan menjadi 1,12%. Sedangkan angka putus sekolah untuk tingkat SLTA pada tahun 2007 sebesar 3,11% dan pada tahun 2009 turun menjadi 1,79 %. Penurunan angka putus sekolah tersebut terus diupayakan melalui partisipasi masyarakat yang lebih meningkat serta memahami akan pentingnya pendidikan bagi anak didik.

2.4.1.1.2 Pendidikan Agama

Pembangunan pendidikan tidaklah bisa dipisahkan dari peran pendidikan agama dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Sebagai daerah agamis, maka pendidikan agama berbasis santri menjadi bagian penting yang ikut memberikan andilnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa, mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Secara umum penyelenggaraan pendidikan agama di Kabupaten Banjar cukup meningkat dari tahun ke tahun walaupun masih terdapat beberapa fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan baik ringan maupun rusak berat. Data sekolah, murid dan guru bidang pendidikan agama dapat dilihat pada tabel 2.23. berikut:

Tabel. 2.23. Keadaan sekolah agama di Kabupaten Banjar tahun 2010

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah			
		Sekolah	Murid	Ruang Kelas	Guru
1.	Raudhatul Atfal				
	Swasta	43	1.904		178
2.	Madrasah Ibtidaiyah				
	Negeri	20	4.478	179	265
	Swasta	88	10.242	532	1.112
3.	Madrasah Tsanawiyah				
	Negeri	9	2.818	67	209
	Swasta	46	5.324	168	664
4.	Madrasah Aliyah				
	Negeri	5	2.213	42	151
	Swasta	19	2.406	59	365

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Tahun 2010

Sedangkan keadaan ruang kelas sekolah agama di Kabupaten Banjar tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2.24. di bawah ini.

Tabel 2.24. Keadaan ruang kelas sekolah agama di Kabupaten Banjar 2010

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah			Jumlah kelas menurut kondisi					
		Sekolah	Murid	Kelas	Baik	%	Rusak Ringan	%	Rusak Berat	%
1.	Raudathul Atfal	43	1.904	81	68	83,95	12	14,8	1	1,24
2.	Madrasah Ibtidaiyah									
	Negeri	20	4.263	171	85	49,71	50	29,24	36	21,05
	Swasta	92	13.348	616	290	47,07	222	36,04	104	16,8
3.	Madrasah Tsanawiyah									
	Negeri	7	1.045	83	29	35	27	32,5	27	32,5
	Swasta	62	4.244	157	92	58,6	52	33,12	13	8,28
4.	Madrasah Aliyah									
	Negeri	5	1.453	35	23	65,71	10	28,57	2	5,71
	Swasta	19	2.130	65	44	67,69	14	21,54	7	10,77

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Tahun 2010

2.4.1.2 Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan dapat dilaksanakan secara maksimal jika didukung oleh ketersediaan fasilitas pokok dan penunjang penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang kesehatan. Hal ini dirasakan sangat berpengaruh mengingat beberapa permasalahan yang telah disampaikan terdahulu, seperti distribusi penduduk yang tidak merata dan luasnya cakupan pelayanan yang harus dilakukan memerlukan suatu upaya khusus untuk memberikan pelayanan publik termasuk di bidang kesehatan. Berikut data mengenai prasarana dan sarana kesehatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banjar, seperti pada tabel 2.25.

Tabel 2.25. Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan

No.	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
A.	Fasilitas Kesehatan:					
1.	Rumah Sakit	3	3	3	3	3
2.	Puskesmas Rawat Inap	3	3	3	3	3
3.	Puskesmas	22	22	22	22	20
4.	Puskesmas Pembantu	71	70	70	70	69
5.	Puskesmas Keliling	89	28	28	27	24
6.	Puskesmasdes	-	-	51	95	285
7.	Posyandu	411	440	440	478	496
B.	Tenaga Kesehatan					
1.	Paramedis dan Non Medis:					
	a. Dinas Kesehatan	-	49	49	49	33
	b. Rumah Sakit	-	187	187	273	237
	c. Gudang Farmasi	-	6	6	8	8
	d. Puskesmas	473	562	562	592	621
	e. Lainnya	-	-	-	-	5
2.	Bidan Desa	180	196	196	241	278
3.	Tenaga Kesehatan dan Spesialis :					
	a. Dinas Kesehatan	2	2	2	2	3
	b. Rumah Sakit	17	17	17	19	19
	c. Puskesmas	32	55	55	36	50

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2005-2009

2.4.1.3 Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang memerlukan dukungan dari semua pihak. Hal ini memerlukan optimalisasi Pengaturan kebijakan dan perlindungan serta pemanfaatan sumber daya alam agar tidak merusak lingkungan dan perlunya upaya-upaya pemulihan dampak buruk akibat aktivitas pembangunan.

2.4.1.3.1 Penanganan Sampah

Seiring dengan penambahan penduduk yang terus meningkat produksi sampah terus meningkat pula. Produksi sampah Kota Martapura tahun 2005 kurang

lebih 54.460,73 m³ per tahun namun baru bisa ditangani sebanyak 40.431,60 m³ atau 74,24 persen, selanjutnya tahun 2009 jumlah produksi sampah Kota Martapura sebanyak 77.278,76 m³ yang tertangani baru 71,05 persen atau 54.910,80 m³.

Fakta empirik di atas menunjukkan bahwa pengelolaan kebersihan di Kabupaten Banjar menghadapi banyak tekanan terutama akibat pertambahan jumlah penduduk dan pola konsumsi yang semakin tinggi. Hal ini berakibat kepada bertambahnya permasalahan pelayanan publik yang dilaksanakan, seperti bertambahnya timbunan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Tambahan lagi diperparah dengan masih dipertahankannya paradigma lama di dalam pengelolaan sampah yang masih mengandalkan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan; kesemuanya membutuhkan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu.

TPA yang sekarang ini berada di Desa Padang Panjang Kecamatan Karang Intan, luas keseluruhan 16,5 Ha dan sudah beroperasi dimulai tahun 2002 hingga sekarang. Setiap hari TPA sudah menangani 90% volume sampah yang masuk ke TPA yang mencapai 250 m³ per hari. Untuk itulah ke depan diharapkan ada suatu metode yang tepat untuk pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat sebagai "pioneer" untuk mengatasi permasalahan sampah.

Untuk menangani produksi sampah yang terus meningkat Pemerintah Kabupaten Banjar telah melakukan upaya-upaya seperti penambahan mobil dump truck, amrol dan kontainer untuk ditempatkan pada daerah-daerah yang padat penduduknya. Kebutuhan TPS/kontainer di Kota Martapura terus mengalami

peningkatan dari 31 TPS/kontainer tahun 2005 menjadi 41 kontainer pada tahun 2009, namun pemerintah daerah baru bisa menyediakan 32 kontainer pada tahun 2009.

Tabel 2.26. Jumlah Volume Sampah yang Dapat Ditangani

No.	Tahun	Volume sampah yang ditangani		
		Target	Realisasi	%
1.	2005	54.460,75	40.431,60	74,20
2.	2006	54.460,75	41.367,60	75,95
3.	2007	56.985,01	42.962,40	75,39
4.	2008	76.186,18	54.151,19	71,08
5.	2009	77.278,78	54.910,80	71,05

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banjar Tahun 2010

2.4.1.3.2 Pertambangan

Perhatian Pemerintah terhadap kelestarian lingkungan hidup ditunjukkan melalui berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan pembinaan terhadap usaha pertambangan. Selama periode tahun 2005 sampai dengan 2009 pada luasan bukaan tambang seluas 1.929,99 hektar telah dilakukan kegiatan reklamasi dan revegetasi sebanyak 828,81 hektar.

Tabel 2.27. Data luasan bukaan tambang batubara dari tahun 2005 s/d tahun 2009

No.	Uraian	Jumlah (Ha)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	IUP KP	131,30	233,10	299,48	426,68	521,07

No.	Uraian	Jumlah (Ha)				
		2005	2006	2007	2008	2009
2.	PKP2B	1.194,32	1.233,38	1.275,10	1.322,87	1.408,92
Jumlah		1.325,62	1.466,48	1.574,58	1.749,55	1.929,99

Sumber: Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar Tahunn 2010

Dalam rangka melakukan pembinaan usaha pertambangan telah diterapkan pemulihan kondisi lahan terhadap kegiatan eksploitasi yang telah dilakukan. Usaha ini dijalankan sesuai dengan ketentuan yang mengatur perlunya pelestarian sumber daya alam terlebih terhadap lahan eks usaha pertambangan.

Tabel 2.28. Jumlah Luasan Reklamasi Dan Revegetasi Tambang Batubara Tahun 2005-2009

No	Uraian	Tahun (Hektar)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	IUP KP	60	60	60	154,31	218,81
2	PKP2B	38	111	226	325	610
Jumlah		38	111	286	479,31	828,81

Sumber: Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar Tahun 2010

2.4.1.3.3 Kehutanan

Pembangunan kehutanan tetap memprioritaskan peningkatan fungsi hutan melalui peningkatan kualitas hutan, sehingga fungsi hutan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan sebagai penyangga kehidupan bagi masyarakat. Keberadaan kawasan hutan di Kabupaten Banjar memerlukan upaya pembinaan dan pengendalian sehingga dapat berfungsi maksimal sebagai

penyangga kehidupan masyarakat. Data luas kawasan hutan pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2.29. berikut:

Tabel 2.29. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Banjar Tahun 2010

No.	Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1.	Kawasan Lindung	43.127.917
2.	Kawasan Hutan Produksi:	
	• Terbatas	24.546.602
	• Tetap	84.655,663
	• Konversi	2.100.479
3.	Kawasan Hutan Konservasi	96.827.986
	Jumlah	251.258.647

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar Tahun 2010

Menjaga kelestarian lingkungan menjadi satu upaya nyata yang harus dilakukan guna kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Salah satu hal yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan adalah keberadaan hutan yang harus mendapat perlindungan dalam perkembangan akhir-akhir ini, dimana menjadi satu hal yang mengkhawatirkan jika terjadi kerusakan hutan berdampak pada musibah berupa bencana banjir dan sebagainya.

Dalam rangka menjaga kelestarian hutan, juga perlu dilakukan upaya penanaman khususnya pada lahan kritis. Data menunjukkan bahwa di Kabupaten Banjar terdapat cukup luas lahan kritis. Pada tahun 2003 terdapat 121.052 Ha lahan kritis dan pada tahun 2008 adalah seluas 120.953 Ha.

Terhadap lahan kritis tersebut sudah semestinya dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Berikut mengenai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dari tahun 2005 – 2009 dapat dilihat pada tabel 2.30 di bawah ini.

Tabel 2.30. Data Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dari tahun 2005-2009.

Kegiatan	Tahun (Hektar)				
	2005	2006	2007	2008	2009
Reboisasi (Ha)	975	25	0	265	10
Hutan Rakyat (Ha)	175	0	25	50	-

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar Tahun 2010

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, adalah dengan mengoptimalkan penurunan jumlah lahan kritis yang ada di Kabupaten Banjar. Melalui upaya ini diharapkan akan menjadi satu hal positif bagi generasi yang akan datang, mengingat keberadaan hutan yang mendatangkan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat terutama bagi iklim dan kondisi lingkungan hidup.

Perkembangan luas lahan kritis yang ada di Kabupaten Banjar, secara sebaran terlihat pada tabel 2.31. Secara jelas terlihat betapa penting upaya untuk melakukan penanaman dan pemulihan dan peningkatan kondisi lahan yang telah menurun kondisinya.

**Tabel 2.31. Persebaran Lahan Kritis dan Sangat Kritis di Kab. Banjar
Provinsi Kalimantan Selatan**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Di dalam Kawasan Hutan:	
	Kritis (Ha)	95.460,50
	Agak Kritis (Ha)	61.540,10
	Potensial Kritis (Ha)	65.297,0
	Tidak Kritis	2.603,0
	Sangat Kritis	7.015,3
2.	Di luar Kawasan Hutan:	
	Kritis (Ha)	15.473,7
	Agak Kritis (Ha)	92.269,6
	Potensial Kritis (Ha)	97.793,2
	Tidak Kritis	6.833,1
	Sangat Kritis	3.003,5

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar Tahun 2010

Beberapa upaya nyata yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, dalam rangka memperbaiki kondisi kawasan hutan dan lahan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah dengan upaya rehabilitasi lahan.

Adapun data yang berhasil dihimpun berkaitan dengan upaya rehabilitasi lahan ini, menjadi satu langkah yang sangat baik dan mencerminkan besarnya kepedulian Pemerintah dan Masyarakat terhadap perlunya menjaga kualitas lingkungan hidup.

Tabel 2.32. Perkembangan Luas Kegiatan Rehabilitasi Lahan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Tahun	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Keterangan
1.	2002	130 Ha	80 Ha	Sumber dana DAK-DR
2.	2003	1,832 Ha	172 Ha	DAK-DR, APBN (HTS)
3.	2004	1,729 Ha	352 Ha	DAK-DR, Gerhan
4.	2005	1,125 Ha	100 Ha	DAK-DR, Gerhan
5.	2006	25 Ha	-	APBD II
6.	2007	46 Ha	-	APBD II
7.	2008	372 Ha	-	DAK-DR, DAK HUT/DBH-DR
8.	2009	10 Ha	-	APBD II
	Jumlah	5,274 Ha	704 Ha	

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar Tahun 2010

Disamping upaya rehabilitasi lahan, juga telah dilakukan reboisasi terhadap kawasan hutan pada beberapa lokasi yang ada di wilayah Kabupaten Banjar. Upaya reboisasi ini merupakan satu wujud nyata dari kesadaran Pemerintah dan Masyarakat terhadap arti penting dari keberadaan kawasan hutan yang menjadi paru-paru bumi, yang menjadi satu penyangga kehidupan dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan masyarakat dalam satu daerah yang memiliki kawasan hutan.

Berbagai lokasi dan besarnya pembiayaan dalam upaya pembangunan bidang kehutanan ditunjukkan pada sebaran kegiatan reboisasi di beberapa lokasi kecamatan sebagaimana termuat pada tabel 2.33 berikut ini.

Tabel 2.33. Perkembangan Kegiatan Reboisasi di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Tahun	Luas (Ha)	Lokasi	Jenis Tanaman	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	2002	60	-	Karet, mahoni, jati, petai	DAK-DR
2.	2003	1.370	Kec. Pengaron, S.Pinang, Simpang Empat	Jati, mahoni, karet, petai, sungkai	DAK-DR, Gerhan, APBN (HTS)
3.	2004	925	Kec. Pengaron, S. Pinang	Jati, mahoni, karet	DAK-DR, Gerhan
4.	2005	975	Kec. Pengaron, S. Pinang	Jati, mahoni, karet	DAK-DR, Gerhan
5.	2006	25	Kec. Sei. Pinang	Jati, mahoni, karet	APBD II (Kabupaten)
6.	2007	-	-	-	-
7.	2008	265	Kec. Paramasan, S. Pinang.	Jati, mahoni, karet	DAK-DR, DAK Bid Hut (DBHDR)
8.	2009	10	Kec. S.Pinang	Mahoni, karet	APBD II (Kabupaten)

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar Tahun 2010

2.4.1.3.4 Wilayah Rawan Bencana

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Rawan bencana merupakan satu kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu.

Kabupaten Banjar merupakan daerah yang secara rutin menghadapi persoalan bencana berupa banjir, kebakaran hutan dan lahan. Secara periodik tahunan sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Banjar mengalami kebanjiran.

Di samping musibah banjir, pada musim kemarau di Kabupaten Banjar juga menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Tercatat pada tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2009 Kabupaten Banjar terdapat titik panas terbanyak diantara 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini tentunya memerlukan satu perhatian khusus dalam penanganan permasalahan dimaksud. Berikut gambaran jumlah titik panas mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sebagaimana termuat pada tabel 2.34 di bawah ini.

Tabel 2.34. Jumlah Titik Panas di Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2009

Tahun	Jumlah Titik Panas		%
	Kabupaten Banjar	Provinsi Kalimantan Selatan	
2005	147	686	21,4
2006	1.128	5.813	19,4
2007	146	1.165	12,5
2008	19	203	9,4
2009	215	1.258	17,1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banjar Tahun 2010

2.4.1.3.5 Kualitas lingkungan hidup

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang berpengaruh

terhadap alam itu sendiri, kesejahteraan manusia serta keberadaan makhluk hidup lain.

Pentingnya persoalan lingkungan hidup ini, sehingga diperlukan suatu usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan upaya sistematis dan terpadu guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi berbagai aspek mulai dari perencanaan hingga pengawasan termasuk penegakkan hukum.

Pencemaran udara yang terjadi di Kabupaten Banjar lebih banyak disebabkan oleh pemakaian bahan bakar oleh kendaraan yang bergerak. Sektor transportasi merupakan sumber utama pencemaran udara yang dominan khususnya kendaraan bermotor untuk transportasi darat. Untuk itulah diperlukan pengkajian agar parameter kebisingan rata-rata tidak melebihi dari standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Tingkat Kebisingan).

Selain itu untuk kualitas air agar tidak melebihi ambang baku mutu untuk TSS, BOD5, COD, Fenol dan Minyak/Lemak, raksa, Ecoli dan colifien.

2.4.1.4 Sarana dan Prasarana Umum

2.4.1.4.1 Jalan dan Jembatan

Pembangunan infrastruktur terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mobilitas barang dari pusat-pusat produksi ke tempat konsumen. Data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Banjar dari panjang jalan Kabupaten mencapai 721,73 Km pada tahun 2005 kondisi jalan cukup baik mencapai 98,88 Km, tahun 2006 meningkat menjadi 124,55 Km, tahun 2007 dan 2008 kondisi jalan yang baik mencapai 153,20 Km, sedang tahun 2009 menjadi 360,60 Km.

Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2006 melaksanakan pembangunan infrastruktur berupa jalan desa mencapai 177,23 Km dari panjang jalan mencapai 1.132,14 Km dan tahun 2007 panjang jalan yang diperbaiki mencapai 102,00 Km, sedang tahun 2008 pembangunan yang dilaksanakan sepanjang 135,20 Km.

Pembangunan infrastruktur jembatan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar yaitu tahun 2005 sebanyak 47 buah yang terdiri dari 1 buah jembatan kabupaten dan 46 buah jembatan desa, tahun 2006 sebanyak 56 buah yang terdiri dari 28 buah jembatan kabupaten dan 28 buah jembatan desa, tahun 2007 jembatan kabupaten sebanyak 11 buah dan 13 buah jembatan desa sedang pada tahun 2008 pembangunan jembatan sebanyak 22 buah yang terdiri dari 16 buah jembatan kabupaten dan 6 buah jembatan desa dan tahun 2009 pembangunan jembatan kabupaten sebanyak 72 buah dan jembatan desa sebanyak 10 buah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah benar-benar mempunyai komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pengembang wilayahnya.

Tabel 2.25. Fasilitas Jalan dan Jembatan di Kabupaten Banjar Tahun 2005-2010

No.	Uraian Kegiatan	Volume Per Tahun Anggaran						Total Penanganan	Panjang Ruas Jalan/ Jembatan
		2005	2006	2007	2008	2009	2010		
1.	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Kabupaten	28,60	62,70	26,00	50,10	37,66	35,17	240,23	726,28
2.	Pemeliharaan rutin Jalan Kabupaten	79,13	97,98	25,80	72,56	96,92	115,50	487,89	726,28
3.	Jembatan Kabupaten	1,00	28,00	11,00	16,00	16,00	8,00	80,00	290,00
4.	Perbaikan Jalan Poros Desa	78,90	177,23	102,00	135,20	461,72	91,63	584,96	1.132,14
5.	Jembatan Desa	46,00	28,00	13,00	6,00	10,00	32,00	135,00	590,00
6.	Titian Ulin	0,00	1.620,00	980,00	1.395,00	840,00	100,00	4.935,00	13.000,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2010

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjar khususnya jalan dan jembatan, dilaksanakan secara maksimal dengan memanfaatkan sumber pendanaan yang tersedia. Sebagaimana beberapa kali diungkapkan pada bagian terdahulu bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Banjar terdiri dari daerah rawa yang memerlukan perlakuan khusus dalam membangun infrastruktur berupa jalan. Di samping itu besarnya cakupan wilayah yang harus ditangani tentu saja memerlukan biaya yang cukup besar.

Hingga tahun 2009 kondisi jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Banjar dimana hanya 63% dalam kondisi baik dan jembatan kabupaten hanya 69% dalam kondisi baik, sedangkan untuk kondisi jalan desa dimana hanya 45% dalam kondisi baik dan jembatan desa hanya 56% dalam kondisi baik. Dengan demikian maka jumlah penambahan panjang jalan dan jembatan hingga tahun 2009, terdiri dari jalan kabupaten yang dibangun sepanjang 747,58 Km, jalan desa yang dibangun

sepanjang 1,132.14 Km, jembatan kabupaten yang dibangun sebanyak 290 unit, jembatan desa yang dibangun sebanyak 590 unit.

2.4.1.4.2 Irigasi

Kawasan Sub DAS Riam Kanan bagian terbesar berada di wilayah Kabupaten Banjar, kawasan ini dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian, perikanan, transportasi air, juga dimanfaatkan untuk energi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Ir. Pangeran M. Noor sejak tahun 1972 dan juga menjadi bahan baku pembuatan air mineral kemasan.

Guna memaksimalkan potensi perairan yang dimiliki, diantaranya dioptimalkan untuk pengembangan jaringan irigasi guna mendukung upaya masyarakat di bidang pertanian dalam arti luas.

Pembangunan saluran irigasi untuk mendukung pembangunan sektor pertanian khususnya swasembada beras terus dilakukan. Data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa rehabilitasi saluran irigasi tahun 2005 sepanjang 44.250 meter, pada tahun 2006 sepanjang 55.713 meter, tahun 2007 sepanjang 85.980 meter dan tahun 2008 sepanjang 94.780 meter sedang tahun 2009 sepanjang 33.281 meter. Selain itu pemerintah Kabupaten Banjar juga melaksanakan pembangunan /perbaikan tanggul.

2.4.1.4.3 Tempat Ibadah

Pembangunan kehidupan beragama dan budaya daerah merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Hal ini karena Kabupaten Banjar dengan suasana kehidupan yang religius memerlukan pembangunan yang

mengedepankan peningkatan keagamaan dan social budaya. Oleh karena itu pembangunan keagamaan yang dilaksanakan harus mampu mengimbangi pembangunan fisik sehingga suasana religius tetap terjaga. Demikian pula dengan tetap terpeliharanya kerukunan internal umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah, terjalin dengan baik.

Data tahun 2009 menunjukkan jumlah pemeluk agama dan keyakinan masing-masing meliputi Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Animisme. Mayoritas penduduk Kabupaten Banjar memeluk agama Islam, sekitar 99,74% dari penduduk Kabupaten Banjar. Kondisi demikian menjadikan agama dan budaya yang bernuansa keislaman mewarnai kehidupan sosial di masyarakat. Kota Martapura sendiri sebagai ibukota Kabupaten Banjar dijuluki Kota Serambi Mekah. Berikut jumlah dan prosentase penduduk menurut agama dan keyakinan di Kabupaten Banjar sebagaimana termuat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36. Prosentase Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar menurut Agama dan Keyakinan Tahun 2009

No.	Agama dan Keyakinan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Prosentase (%)
1.	Islam	496.784	99,74
2.	Kristen Protestan	466	0,09
3.	Kristen Katolik	214	0,04
4.	Hindu	88	0,02
5.	Budha dan Animisme	536	0,11

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2009

Permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan beragama adalah masih perlu meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama ke dalam kehidupan bermasyarakat. Secara substansial kehidupan beragama ditunjukkan dengan adanya pesan-pesan universal, seperti melawan kezaliman dan penindasan, menegakkan keadilan, memberikan keselamatan, dan kedamaian. Dengan demikian, kehidupan beragama menjadi lebih santun, toleran, dan damai.

Gambaran tentang peningkatan dan pengamalan ajaran agama tergambar dari data pertumbuhan tempat ibadah seperti pada tabel 2.37.

Tabel 2.37. Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Banjar

No.	Tempat Ibadah	Jumlah				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Masjid	315	315	324	329	329
2.	Musholla	953	953	915	987	987

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2005-2009

Data tahun 2009 di Kabupaten Banjar untuk jumlah masjid adalah sebanyak 329 buah, sedangkan jumlah musholla/langgar sebanyak 987 buah. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan masjid dan musholla/langgar dalam lima tahun terakhir.

Untuk pembangunan pendidikan keagamaan pada anak-anak usia dini dilaksanakan melalui pembangunan TPA/TK Al-Qur'an, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama bisa ditanamkan pada anak-anak sejak usia dini. Keseriusan Pemerintah Kabupaten Banjar terhadap pendidikan agama ini terlihat

dengan pembangunan Gedung IQRA, pemberian bantuan honor untuk guru madrasah dan TK Al-Qur'an serta bantuan dana untuk perbaikan prasarana dan sarana pendidikan keagamaan. Selain didukung penuh oleh pemerintah, pendidikan keagamaan ini juga dilaksanakan oleh masyarakat maupun lembaga keagamaan secara swadaya. Data TPA/TK Al Qur'an dapat dilihat seperti pada tabel 2.38. berikut ini.

Tabel 2.38. Jumlah TPA/TK Al Qur'an, Guru dan Santri di Kabupaten Banjar

No.	Data	Jumlah				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	TPA/TK Al-Qur'an	353	362	374	385	392
2.	Guru/Ustadz/Ustadzah	1.851	1.858	1.863	1.872	1.877
3.	Santri	21.052	21.014	21.001	20.852	19.400

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Tahun 2010

Selain tergambar dari data pertumbuhan tempat peribadatan dan pembinaan terhadap Taman Pendidikan Alquran serta lembaga keagamaan lainnya sebagaimana tersebut di atas, perhatian Pemerintah Daerah terhadap kehidupan beragama juga tergambar dari alokasi anggaran Pemerintah Daerah pada tahun 2010 mencapai lebih dari 20 milyar rupiah.

2.4.1.5 Penataan Ruang

Penyelenggaraan kegiatan tata ruang dalam pembangunan daerah kabupaten Banjar ditekankan pada pendekatan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu, hal ini menjadi satu rumusan yang diinginkan melalui revisi materi ke ruangan yang

dilakukan pada tahun 2008 terhadap perkembangan pemanfaatan ruang yang telah dilakukan dalam kurun waktu keberadaan Perda Tata Ruang sejak tahun 2003.

Rencana Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Lindung, Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna menyukseskan sistem pembangunan yang berkelanjutan.

Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Adapun sasaran yang ingin di capai dalam pengelolaan kawasan lindung adalah:

1. Meningkatkan fungsi lindung terhadap air, iklim (hidrologi), tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah budaya bangsa.
2. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan guna pembangunan berkelanjutan mengacu pada Keppres Nomor 57 tahun 1989, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Kawasan Lindung yang ditetapkan terdiri dari tiga sub kawasan utama yaitu:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya yang terdiri dari:
 - Kawasan Hutan Lindung

- Kawasan Bergambut
- b. Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari:
- Sempadan Sungai
 - Kawasan Sekitar Danau/Waduk
- c. Kawasan suaka alam dan cagar alam terdiri:
- Taman Hutan Raya
 - Kawasan Cagar Alam

Kriteria umum untuk penetapan tiap kawasan atau sub kawasan lindung di atas, secara umum didasarkan pada faktor-faktor fisik dasar yang didalamnya tercakup lereng, jenis tanah, curah hujan elevasi, hidrologi, serta keberadaan flora dan fauna yang harus dilindungi.

Berdasarkan Peta Padu Serasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 1996, yang kemudian direvisi tahun 1998, alokasi Kawasan Penggunaan Ruang Kawasan Lindung di Kabupaten Banjar adalah sebesar 32% atau seluas 165.889 Ha dari luas seluruh Kabupaten Banjar. Kawasan Lindung di Kabupaten Banjar terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya seluas 55.886 Ha, yang terdiri dari Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Bergambut.
- b. Kawasan perlindungan setempat seluas 2.073 Ha, yang terdiri dari Sempadan Sungai dan Kawasan Sekitar Danau atau Waduk.
- c. Kawasan Cagar Alam dan Cagar Budaya seluas 107.850 Ha, yang terdiri Cagar Alam dan Taman Hutan Raya.

Adapun sebaran daripada Kawasan Lindung adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan Hutan Lindung yang meliputi Kawasan Hutan Lindung yang berada di Kecamatan Aranio, Simpang Empat, Pengaron, dan Sungai Pinang.
- b. Kawasan Bergambut berada di sebelah Utara yaitu di Kecamatan Simpang Empat dan Astambul serta Mataraman.
- c. Sempadan Sungai terdapat di Sepanjang Sungai, terutama sungai-sungai besar yaitu Martapura, Riam Kanan dan Riam Kiwa selain itu terdapat sungai-sungai lain yaitu: Mangaok, Paluangan, Hanjawa dan Maluka. Pada sungai-sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dari sisi kanan dan kiri sungai, sedangkan pada anak sungai sekurang-kurangnya 50 meter disisi kanan dan kiri sungai. Kawasan sekitar Danau atau Waduk terdapat Waduk Riam Kanan di Kecamatan Aranio dengan lebar yang proporsional dengan kondisi fisik danau/waduk antara 50 –100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat dan tangkapan air hujan di sekitar waduk terdapat di Kecamatan Aranio dan Pengaron sepanjang Sungai Riam Kanan dan Riam Kiwa.

Kawasan Suaka Alam yaitu berupa Kawasan Taman Hutan Raya yang terdapat di sekitar Waduk Riam Kanan (Kecamatan Aranio). Sedangkan Kawasan Cagar Alam terdapat di Kecamatan Gambut.

2.4.1.6 Perhubungan

Pelayanan umum yang berkaitan dengan bidang perhubungan adalah pelayanan izin trayek untuk angkutan, pada tahun 2006 tercatat sebanyak 469 izin dan pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 400 izin, sedang pada tahun

2008 mengalami kenaikan menjadi 482 izin. selain itu pelayanan terhadap angkutan umum juga berupa uji kir kendaraan angkutan umum, dimana pada tahun 2006 sebanyak 2.231 unit, dan pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 1.064 unit atau 47,69 % menjadi 3.295 unit, sedang tahun 2008 terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 162 unit atau 4,91% sehingga menjadi 3.457 unit.

2.4.2 Pelayanan Penunjang

2.4.2.1 Penanaman modal

Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Kabupaten Banjar memerlukan sejumlah dana dalam bentuk investasi. Berbagai permasalahan umum yang dihadapi dalam bidang investasi meliputi pelayanan birokrasi yang perlu ditingkatkan, di samping itu juga ketersediaan infrastruktur yang masih perlu dioptimalkan, serta informasi potensi investasi bagi investor yang dapat menjadi bahan pertimbangan yang layak bagi mereka untuk melakukan investasi. Informasi mengenai peluang investasi memerlukan koordinasi antar sektor, mengingat hal ini menyangkut banyak aspek. Berbagai aspek dimaksud meliputi aspek peruntukan ruang dan lahan, aspek perizinan, keamanan dan ketertiban, serta infrastruktur wilayah.

Perkembangan nilai realisasi investasi di Kabupaten Banjar dalam periode tahun 2005 – 2009 seperti pada tabel 2.39 berikut.

Tabel 2.39. Nilai Realisasi Investasi 2005-2009

Tahun	Investasi (RP)	Tumbuh (%)
2005	547.393.540.000	7,05
2006	588.911.823.000	7,73
2007	638.248.426.000	8,56
2008	696.544.600.000	9,13
2009	765.781.133.240	9,94

Sumber: Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010

Memperhatikan tabel 2.39 di atas, tergambar bahwa Kabupaten Banjar dengan trend pertumbuhan investasi yang terus meningkat masih merupakan daerah yang menjanjikan bagi investor. Oleh karena itu kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Banjar hendaknya dapat memacu pertumbuhan investasi tersebut dengan membuat regulasi dan pra kondisi yang dapat memancing masuknya investasi.

2.4.2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Data koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa keberadaan koperasi yang aktif pada Tahun 2005 adalah sebanyak 90 buah dan tahun 2009 menjadi 105 buah. Hal ini menunjukkan bahwa dari jumlah koperasi yang ada masih tetap menjadi salah satu kekuatan perekonomian di daerah.

Jumlah UMKM di Kabupaten Banjar tahun 2006 sebesar 1.328 buah dan tahun 2009 jumlahnya menjadi 1.701 buah. Perkembangan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ditunjukkan oleh keberadaan jumlah UMKM dalam lima tahun

terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebagaimana termuat pada tabel 2.40 di bawah ini.

Tabel 2.40. Koperasi dan UKM di Kabupaten Banjar Tahun 2005 s/d 2009

No.	Koperasi dan UMKM	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Koperasi aktif	90	89	84	99	105
2.	Jumah UKM non BPR/LKM UKM	-	1.328	1.447	1.641	1.701

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banjar Tahun 2010

2.4.2.3 Kependudukan dan Catatan Sipil

Kegiatan kependudukan diarahkan pada upaya penataan data kependudukan; penyediaan sistem informasi kependudukan; peningkatan pelayanan kegiatan kependudukan dan catatan sipil, dan penyiapan data kependudukan guna menunjang Pemilu 2009 dan Pemilukada 2010. Pelaksanaan kegiatan Kependudukan dan Catatan Sipil dengan sistem SIMDUK yang kemudian diperbaharui dengan sistem SIAK secara online di seluruh kecamatan, dimaksudkan guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus pemerintah daerah memiliki data kependudukan yang up to date setiap saat. Hal ini ditunjang pula dengan pelaksanaan pelayanan KTP gratis yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2006 Tanggal 1 Juli 2006 tentang KTP Gratis. Kebijakan ini diambil agar masyarakat semakin sadar untuk memiliki KTP.

Demikian pula halnya dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akte kelahiran bagi anak-anak, misalnya dalam rangka melanjutkan pendidikan, hal ini menimbulkan peningkatan dalam penerbitan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Data pada tabel 2.41 berikut ini menyajikan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memiliki akte nikah, akte kelahiran dan KTP dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009:

Tabel 2.41. Akte nikah dan KTP yang diterbitkan tahun 2005 s/d 2009

Tahun	Akte Nikah diterbitkan	Jumlah Akta diterbitkan	% Akta dari bayi lahir	Jumlah KTP diterbitkan	% KTP dari penduduk
2005	4.344	6.247	0,47	41.162	13,11
2006	3.764	5.931	1,30	60.148	13,15
2007	5.005	8.592	1,86	70.210	47,90
2008	6.224	8.007	0,016	12.319	0,026
2009	6.315	12.848	2,62	23.578	6,62

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari tahun 2005 – 2009 terjadi penurunan jumlah KTP yang diterbitkan, sedang akte kelahiran yang diterbitkan mengalami kenaikan. Pada tahun 2005 jumlah KTP yang diterbitkan sebanyak 41.162 lembar, tahun 2006 jumlah KTP yang diterbitkan sebanyak 60.148 lembar dan tahun 2007 sebanyak 70.210 lembar yang berarti mengalami kenaikan, sedang tahun 2008 jumlah KTP yang diterbitkan mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi 12.319 lembar atau menurun 57.891 lembar dan tahun 2009 terjadi kenaikan kembali menjadi 23.578 lembar.

Sedangkan akte kelahiran yang diterbitkan pada tahun 2005 sebanyak 6.247 lembar, tahun 2006 sebanyak 5.931 lembar dan meningkat menjadi 8.592 lembar

pada tahun 2007 sedang tahun 2008 akte kelahiran yang diterbitkan sebanyak 8.007 lembar dan tahun 2009 sebanyak 12.848 lembar.

Data pernikahan yang tercatat di Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjar pada tahun 2005 sampai tahun 2009 terus mengalami peningkatan yakni sebanyak 4.344 pasangan pada tahun 2005 dan sebanyak 6.315 pasangan pada tahun 2009.

2.4.2.4 Ketenagakerjaan

Data tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Banjar terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2005 sebesar 53,89 persen meningkat menjadi 74,05 persen tahun 2006, tahun 2007 sebesar 78,99 persen, sedang tahun 2008 tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan menjadi 75,65 persen, sedang tahun 2009 terjadi kenaikan lagi menjadi 79,69 persen.

Gambaran tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut sebagaimana pada tabel 2.42 berikut.

Tabel 2.42. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjar Tahun 2010

Tahun	Prosentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
2005	53,89
2006	74,05
2007	78,99
2008	75,65
2009	79,69
2010	76,75

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2010

Angka sengketa antara pengusaha dan pekerja dalam tiga tahun ini terus mengalami peningkatan. Dari data yang diperoleh pada Dinas Nakertrans Kabupaten Banjar, menunjukkan bahwa pada tahun 2006 angka sengketa antara pengusaha dan pekerja hanya satu kejadian, namun pada tahun 2007 meningkat menjadi empat kejadian dan pada tahun 2008 menjadi 10 kejadian.

2.4.2.5 Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Pemberdayaan perempuan dimaksudkan untuk mencapai optimalisasi usaha dalam rangka mendorong peran wanita dalam pembangunan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran ini meliputi sosialisasi kesetaraan gender dan pembinaan terhadap perempuan melalui kelompok-kelompok binaan seperti kelompok Dasawisma, PKK dan sebagainya. Melalui berbagai kegiatan ini kaum perempuan khususnya ibu-ibu dapat lebih berperan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Perempuan juga dapat berkiprah di lembaga legislatif DPRD Kabupaten Banjar seperti terlihat dalam tabel 2.43 berikut:

Tabel 2.43. Jumlah Anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Banjar

Uraian	Th. 1999 – 2004	Th. 2004-2009	Th. 2009 – 2014
Laki – Laki	37 (92,50 %)	35 (87,50 %)	32 (80 %)
Perempuan	3 (7,50 %)	5 (12,50 %)	8 (20 %)
Jumlah	40 (100 %)	40 (100 %)	40 (100 %)

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa peran perempuan di lembaga legislatif DPRD Kabupaten Banjar setiap periode semakin meningkat dari 7,50% pada periode tahun 1999 – 2004, 12,50 % pada periode tahun 2004 – 2009 dan mencapai 20 % pada periode tahun 2009 – 2014.

Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas, sehingga berpengaruh pula dalam pengitegrasian konsep ini kedalam program pembangunan yang akan dilaksanakan. Terkait dengan persoalan ini, ke depan tentu saja perlunya suatu program guna meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui komunikasi dan informasi serta edukasi terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

2.4.2.6 Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

Program keluarga berencana di Kabupaten Banjar menunjukkan hasil yang menggembirakan, hal itu bisa dilihat dari data peserta KB aktif dan akseptor selama lima tahun ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Hal ini terutama ditunjukkan dengan terjadinya penambahan akseptor baru. Data mengenai akseptor ini menunjukkan, bahwa pada tahun 2005 jumlah akseptor sebanyak 60.565 akseptor dengan akseptor baru sebanyak 12.107 akseptor, pada tahun 2009 jumlah akseptor aktif bertambah menjadi 72.928 akseptor dengan akseptor baru sebanyak 22.838 akseptor, sebagaimana dimuat pada tabel 2.44. berikut:

Tabel 2.44. Jumlah akseptor di Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009

No.	Aseptor	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah akseptor aktif	60.565	61.611	63.983	69.842	72.928
2.	Aseptor baru	12.107	16.295	17.676	18.196	22.838

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2010

2.4.2.7 Komunikasi dan Informatika

Kegiatan komunikasi dan informasi diarahkan pada upaya peningkatan dan perluasan jangkauan informasi; pembinaan jaringan kemitraan dengan pers, media elektronik, kelompok informasi masyarakat, media komunikasi tradisional dan penerbitan umum; serta peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan. Keberadaan wartel/ warnet yang sampai ke pedesaan sangat membantu dalam kelancaran komunikasi dan arus informasi yang semakin menglobal dewasa ini. Hal ini ditandai dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi dimana Pemerintah Daerah harus mengantisipasi melalui suatu kebijakan untuk mengendalikan pemanfaatan teknologi informasi ini.

Pelaksanaan kelancaran komunikasi dan informatika dimaksudkan untuk menciptakan komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat melalui penyebaran informasi daerah seperti surat kabar nasional / lokal, siaran televisi dan radio nasional/ lokal, baik yang dilaksanakan sendiri maupun dengan menjalin kemitraan dengan pihak lain.

Untuk itu dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa, serta mendorong kerjasama informasi dengan media massa. Kegiatan – kegiatan tersebut antara lain penyebarluasan informasi dengan surat kabar harian, tabloid, majalah, TV dan radio.

2.4.2.8 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa antara lain melakukan pelatihan kepada kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti memberikan pelatihan kepada petugas dan pendamping Komunitas Adat Terpencil (KAT), mendukung keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Keluarga Muda Mandiri (KMM), dan Karang Taruna Indonesia (KTI), serta pemberian pelatihan-pelatihan kepada mantan siswa Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan sebagainya.

Upaya pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui Program Desa Binaan dengan menjadikan beberapa desa secara bertahap sebagai lokasi binaan. Inti dari sasaran yang ingin dicapai dari program desa binaan adalah memadukan berbagai kegiatan seluruh bidang pembangunan yang berlokasi di desa agar tercapai secara maksimal dan terintegrasi. Pada tahun 2008 dilakukan pembinaan terhadap 17 desa dengan lokasi masing-masing kecamatan 1 desa. Pada tahun 2009 ditambah dengan mengalokasikan masing- masing 3 desa ditiap kecamatan sehingga jumlah desa binaan menjadi 57 desa. Selanjutnya pada tahun 2010

masing-masing kecamatan yang memiliki desa lebih dari 4 dilakukan pembinaan sejumlah 5 desa dengan jumlah 85 desa.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan juga di bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang ada di desa. Sejak tahun 2008 telah dilakukan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni dengan memberikan bantuan modal awal pada setiap desa untuk dapat dikelola sebagai usaha perekonomian di perdesaan.

2.4.2.9 Perpustakaan

Untuk meningkatkan minat baca masyarakat maka pemerintah Kabupaten Banjar telah menyediakan perpustakaan yang cukup representatif. Hal ini terlihat dari keberadaan perpustakaan daerah dengan jumlah pengunjung yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 jumlah pengunjung mencapai 4.920 orang dan pada tahun 2009 terjadi kenaikan mencapai 6.904 orang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa program penyediaan koleksi perpustakaan cukup menggugah minat baca masyarakat Kabupaten Banjar.

Tabel 2.45. Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Banjar Tahun 2005 s/d 2009

No.	Perpustakaan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	4.920	5.269	6.839	5.920	6.904
2.	Jumlah Koleksi Buku/Jurnal	6.008	6.037	6.065	6.110	6.200
3.	Jumlah Anggota	1.250	1.290	1.325	1.402	1.470

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010

Data di atas menunjukkan bahwa program pengembangan minat baca masyarakat cukup optimal dan perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

2.4.2.10 Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat penting dilaksanakan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan aman, keberhasilannya dapat dilihat dari tingkat kejadian kriminalitas.

Data jumlah personil SatPol PP sebagai pelaksana penyelenggaraan keamanan dan ketertiban tersebut pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 sebanyak 109 orang, sedang pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 100 orang.

Sedangkan Pos Kamling sebagai tempat penyelenggaraan keamanan di desa jumlahnya pada tahun 2005 dan 2006 sebanyak 775 buah, tahun 2007 sebanyak 787 buah sedangkan tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 776 buah dan tahun 2009 terjadi penurunan menjadi 532 buah.

2.4.2.11 Pemuda dan Olah Raga

Pembinaan pemuda selama ini berjalan cukup baik. Terdapat beberapa prestasi yang diraih di tingkat nasional, terutama terkait dengan bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan potensi pemuda yang patut untuk terus dikembangkan dalam

menghadapi sempitnya lapangan kerja dewasa ini, menuntut kemandirian pemuda untuk berwirausaha.

Sementara itu di bidang olahraga masih perlu peningkatan kesadaran berolahraga dikalangan masyarakat luas, perlunya peningkatan pembibitan di bidang olahraga guna penemuan bibit berprestasi serta membudayakan olahraga di masyarakat. Permasalahan yang dihadapi adalah masih kurangnya kemandirian sosial dan ekonomi pemuda kurangnya pembibitan olahraga yang berakibat pada minimnya prestasi.

2.5 Aspek Daya Saing Daerah

2.5.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

2.5.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah meningkatnya kemandirian daerah yang ditunjukkan oleh kemampuan daerah dalam meningkatkan perekonomiannya. Kabupaten Banjar dalam melaksanakan pembangunan ekonomi menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan, hal itu ditunjukkan dengan tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita yang terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, yakni pada tahun 2005 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar Rp. 620.700,-, tahun 2006 sebesar Rp. 625.000,- , tahun 2007 sebesar Rp. 634.600,- , tahun 2008 sebesar Rp.639.840,- dan tahun 2009 sebesar Rp. 641.640,-.

Tabel 2.46. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di Kabupaten Banjar Tahun 2005 s/d 2009

No.	Tahun	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Rp)
1.	2005	620.700
2.	2006	625.000
3.	2007	634.600
4.	2008	639.840
5.	2009	641.640

Sumber: PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009

2.5.1.2 Nilai Tukar Petani

Semakin meningkatnya nilai tukar petani menunjukkan semakin membaiknya pendapatan masyarakat Kabupaten Banjar, karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Banjar berusaha di sektor pertanian. Dari data yang diperoleh seperti pada tabel 2.47 menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar petani terus mengalami peningkatan, dimana tahun 2005 sebesar 82,08 persen, tahun 2006 menjadi 90,24 persen, tahun 2007 sebesar 94,65 persen, tahun 2008 sebesar 97,54 persen, dan pada tahun 2009 terjadi kenaikan lagi menjadi 100,40 persen.

Tabel 2.47. Rata-Rata Nilai Tukar Petani di Kabupaten Banjar Tahun 2005 s/d 2009

No.	Tahun	Rata-rata nilai tukar petani (%)
1.	2005	82,08
2.	2006	90,24
3.	2007	94,65

No.	Tahun	Rata-rata nilai tukar petani (%)
4.	2008	97,54
5.	2009	100,40

Sumber: PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009

2.5.1.3 Pengeluaran Konsumsi non Pangan per Kapita

Keberhasilan pembangunan ekonomi juga ditunjukkan oleh pengeluaran konsumsi non pangan per kapita yang terus mengalami peningkatan, dari tahun 2005 sebesar 34,06 persen, tahun 2006 sebesar 34,06 persen, tahun 2007 sebesar 40,30 persen, dan tahun 2008 konsumsi non pangan per kapita sebesar 46,44 sedang tahun 2009 konsumsi non pangan per kapita sebesar 41,12 persen ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh masyarakat kabupaten Banjar dipergunakan untuk konsumsi diluar kebutuhan primernya. Artinya bahwa semakin tinggi pengeluaran konsumsi non pangan masyarakat maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.48. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Banjar tahun 2005 s/d 2009

No.	Tahun	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (%)
1.	2005	34,06
2.	2006	34,06
3.	2007	40,30
4.	2008	46,44
5.	2009	41,12

Sumber: PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009

2.5.1.4 Produktivitas Total Daerah

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah adalah nilai pendapatan domestik regional bruto (PDRB), dimana nilai PDRB mencerminkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi/perusahaan selama satu tahun dan ini berarti produktivitas yang dihasilkan oleh seluruh sektor bisa diketahui. Produktivitas daerah Kabupaten Banjar pada tahun 2005 adalah sebesar 13.367.790, menjadi sebesar 28.576.829 pada tahun 2009. Dari data tersebut menunjukkan bahwa produktivitas total daerah terus mengalami peningkatan sebesar 113,77 persen selama lima tahun, namun kondisi ini belum bisa memperlihatkan kondisi riil yang ada di masyarakat karena ada beberapa sektor yang memberikan kontribusi cukup besar namun tidak menyentuh masyarakat banyak. Dari tiga sektor unit produksi yang menghasilkan produktivitas total daerah, sektor primer (pertanian dan pertambangan) memberikan kontribusi paling kecil, namun demikian tenaga kerja yang terserap cukup besar, khususnya dari sektor pertanian. Produktivitas Total Daerah digambarkan pada tabel 2.49 berikut:

Tabel 2.49. Produktivitas Total Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005 s/d 2009

No.	Sektor	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Primer	8.824.451	14.078.470	18.465.460	18.203.960	18.175.350
2	Sekunder	18.464.021	16.419.300	22.204.660	27.158.230	30.695.500

No.	Sektor	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
3	Tersier	14.630.404	18.182.970	24.347.490	48.081.460	47.368.100
	Total	13.367.790	18.139.908	23.489.074	26.636.579	28.576.829

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banjar Tahun 2010

2.5.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.5.2.1 Aksesibilitas Daerah

Kemudahan dalam aksesibilitas daerah dapat ditunjukkan oleh rasio jumlah kendaraan dengan panjang jalan yang ada di Kabupaten Banjar, yaitu pada tahun 2006 rasio jumlah kendaraan dibandingkan dengan panjang jalan adalah 0,168 dan pada tahun 2007 rasionya 0,134 sedangkan pada tahun 2008 sebesar 0,115. Menurunnya (membaiknya) rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menunjukkan mobilitas barang dan orang di Kabupaten Banjar cukup lancar. Hal ini dapat diartikan bahwa penyediaan jalan yang dapat di akses menunjukkan peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan volume kendaraan sehingga rasio antara jalan dan kendaraan semakin menurun sebagaimana termuat pada tabel 2.50 di bawah.

Tabel 2.50. Rasio jumlah kendaraan dengan panjang jalan Kabupaten Banjar Tahun 2006-2008

No.	Tahun	Rasio jumlah kendaraan dengan panjang jalan
1.	2006	0,168
2.	2007	0,134
3.	2008	0,115

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banjar Tahun 2010

2.5.2.2 Penataan Wilayah

Mengingat bahwa Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar, merupakan bagian Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang sekaligus bagian integral dari Pembangunan Nasional, perlu dipelihara keserasian dan keselarasan antara Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional. Untuk potensi dan prioritas daerah, di Kabupaten Banjar diusahakan juga terpeliharanya laju pembangunan antar wilayah, sehingga dapat memperkecil perbedaan tingkat pertumbuhan antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Untuk bagian wilayah yang masih terbelakang dan kurang berkembang, perlu diberikan prioritas pengembangan dan motivasi pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wilayahnya.

Tujuan yang hendak dicapai melalui penataan Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) tersebut adalah:

1. Mengusahakan pemerataan pembangunan yang serasi di dalam suatu sub SWP agar perbedaan tingkat kemakmuran antara wilayah yang maju dengan wilayah yang masih terbelakang dapat diperkecil.
2. Mengusahakan dan mengarahkan kegiatan pembangunan daerah atau wilayah sesuai dengan kondisi dan potensi serta fungsi yang terdapat di setiap sub SWP.
3. Mengembangkan hubungan ekonomi antar Sub SWP secara saling menguntungkan sehingga terjalin interaksi yang harmonis dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan politik/ keamanan sehingga terwujud struktur

ekonomi regional yang kuat dan mampu menunjang kesatuan ekonomi nasional yang kokoh.

4. Mempertajam prioritas pembangunan sehingga memungkinkan terjangkaunya wilayah-wilayah minus, kawasan kritis dan pantai oleh kegiatan pembangunan, antara lain melalui program-program khusus dengan memerhatikan sepenuhnya upaya penyelamatan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk menunjang kebijaksanaan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) maka kebijaksanaan spasial Kabupaten Banjar dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) dan pusat-pusatnya sebagai berikut:

1. SSWP I meliputi Kecamatan Martapura, Martapura Barat, Martapura Timur, Astambul, Aranio dan Karang Intan dengan pusat di Martapura.
2. SSWP II meliputi Kecamatan Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, Tatah Makmur, Aluh-Aluh, Beruntung Baru. dan Gambut dengan pusat di Gambut.
3. SSWP III meliputi Kecamatan Sungai Pinang, Paramasan, Simpang Empat, Telaga Bauntung, Pengaron, Sambung Makmur, dan Mataraman dengan pusat di Simpang Empat.

Kebijaksanaan Pembangunan Daerah berdasarkan pendekatan tata ruang/perwilayahan (spasial) yang tercermin dalam sistem perwilayahan Pembangunan, perlu ditingkatkan dan dipertajam serta diefektifkan pelaksanaannya di masa yang akan datang terutama mengenai sub-sub Wilayah Pembangunan (SSWP) yang merupakan bagian dari Satuan Wilayah Pembangunan (SWP).

Kebijaksanaan yang ditempuh dalam pembangunan nasional dan regional mempunyai dampak terhadap perkembangan sektoral di daerah yang pada dasarnya juga menjadi landasan penentuan kebijaksanaan tersebut. Pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan yang ditempuh mempunyai arti luas yang cukup besar kaitannya dengan pembangunan kota, terutama kota-kota yang menjadi pusat pengembangannya. Dengan demikian, hal ini perlu dibahas dan dianalisis mengenai sejauhmana pengaruh kebijaksanaan yang ada terhadap kebijaksanaan sektoral kota-kota di wilayah Kabupaten Banjar.

Sektor-sektor pokok yang akan dikembangkan di daerah mempunyai mekanisme pertimbangan dan dampak yang ditimbulkannya bagi setiap wilayah masing-masing yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengembangan sektor pertanian dapat menimbulkan kaitan ke depan dan ke belakang (*forward and backward linkage*). Kaitan ke depan adalah rangsangan ke arah berkembangnya agrobisnis, yaitu sektor perdagangan dan industri, sedangkan kaitan ke belakang adalah peningkatan produksi pertanian secara lebih besar lagi (*ekstensifikasi dan intensifikasi*).

Untuk memperkuat dorongan ke arah depan perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, demikian pula perlu penyesuaian antara karakteristik pengembangan pertanian dengan pola pengembangan sektor perdagangan dan industri.

Pembangunan industri di masa kini adalah untuk menciptakan struktur ekonomi yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier. Memperluas

lapangan kerja dan mendorong kesempatan berusaha dengan memanfaatkan sumberdaya manusia. Meningkatkan pembinaan terhadap industri kecil dan kerajinan rakyat di bidang teknologi, permodalan dan pemasaran. Pengembangan industri ini diarahkan untuk ekspor dan kebutuhan dalam negeri, serta untuk meningkatkan ekspor non migas. Pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan lebih banyak dititikberatkan pada pengembangan manusianya. Akan tetapi pengembangan tingkat kemampuan manusianya itu sendiri mempunyai dampak yang paling penting terhadap keikutsertaannya dalam pembangunan maupun pemeliharaan lingkungan. Peningkatan sektor ini mempunyai pengaruh terbesar sebagai pendorong bagi terlaksananya pengembangan sektor-sektor lain yang tersebut di atas.

- b. Pengembangan sektor pemerintahan berkaitan dengan koordinasi dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan, mengarah pada pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah. Sektor pemerintahan pada dasarnya menyangkut kegiatan politik, hukum, penerangan/ media massa, serta peningkatan kemampuan aparat pemerintahan yang terlibat alam pembangunan.

2.5.2.3 Fasilitas Bank dan Non Bank

Perbankan merupakan faktor yang sangat berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah karena kemudahan dalam mengakses modal sangat mempengaruhi pergerakan sektor riil di daerah.

Kegiatan perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan dapat menciptakan uang giral serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah.

Di Kabupaten Banjar terdapat sejumlah fasilitas perbankan umum seperti ditunjukkan pada tabel 2.51 meliputi :

Tabel 2.51. Fasilitas Perbankan Umum di Kabupaten Banjar Tahun 2010.

No.	Nama Lembaga Perbankan
1.	Bank Nasional Indonesia (BNI 46)
2.	Bank Rakyat Indonesia (BRI)
3.	Bank Kalsel
4.	Bank Syariah Mandiri
5.	Bank Danamon Syariah
6.	Bank Mega Syariah
7.	Bank Muamalat Indonesia
8.	Bank Danamon Simpan Pinjam

Sumber: Bank Indonesia Regional Kalimantan Selatan Tahun 2010

Disamping lembaga perbankan umum dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Banjar terdapat empat unit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tersebar di wilayah kecamatan di Kabupaten Banjar sebagaimana termuat pada tabel 2.52.

Tabel 2.52. Fasilitas Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Banjar Tahun 2010.

No.	Bank Perkreditan Rakyat
1.	PD. BPR Sungai Tabuk
2.	PD. BPR Simpang Empat
3.	PD. BPR Astambul
4.	PD. BPR Martapura
5.	BPR Swasta

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010

2.5.2.4 Ketersediaan Air Bersih

Peningkatan jumlah penduduk dan keragaman kegiatan masyarakat menyebabkan peningkatan kebutuhan air. Sumber air selama ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Banjar sebagian besar menggunakan air sumur, air sungai dan air PDAM. Kebutuhan air untuk rumah tangga setiap tahun mengalami peningkatan. Data/ informasi yang diperoleh dari PDAM Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2005 sebanyak 17.715 rumah tangga dan mengalami kenaikan sebesar 51,42 persen atau menjadi 26.825 rumah tangga pada tahun 2009.

Tabel 2.53. Data Ketersediaan Air Bersih di Kabupaten Banjar Tahun 2010

No.	Tahun	Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	
		Jumlah	Ratio
1.	2005	17.715	17,87
2.	2006	19.340	14,80

No.	Tahun	Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	
		Jumlah	Ratio
3.	2007	21.115	15,80
4.	2008	22.921	17,80
5.	2009	26.825	20,37

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2010

Dalam rangka memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat terutama melalui keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), menggunakan sumber air baku, DAS Riam Kanan, Sungai Martapura dan irigasi serta sumber air tanah.

2.5.2.5 Fasilitas Listrik dan Telpon

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka secara otomatis jumlah permintaan akan perumahan terus bertambah, dengan demikian permintaan fasilitas listrik juga semakin meningkat. Sebagaimana terlihat pada tabel bahwa jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik pada tahun 2005 sebanyak 37.548 RT, meningkat menjadi 40.820 RT pada Tahun

2009. Rendahnya kenaikan penggunaan listrik ini disebabkan oleh keterbatasan daya listrik yang dimiliki oleh PLN, sehingga permintaan masyarakat terhadap fasilitas listrik tidak bisa terpenuhi.

Keterbatasan kapasitas listrik juga dirasakan oleh masyarakat perdesaan. Dari jumlah kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Banjar sebanyak 290 Kelurahan/desa, sampai tahun 2010 masih terdapat 17 desa yang belum terjangkau oleh jaringan listrik.

Tabel 2.54 Data Pengguna Fasilitas Listrik

No.	Tahun	Rumah Tangga yang menggunakan listrik	
		Jumlah	Ratio
1.	2005	37.548	32,90
2.	2006	35.556	27,20
3.	2007	36.581	27,40
4.	2008	37.450	29,10
5.	2009	40.820	31,00

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2005-2010

2.5.3 Iklim Berinvestasi

2.5.3.1 Kemudahan Perizinan

Kemudahan dalam perizinan merupakan salah satu faktor yang menjadi perhatian para pengusaha/investor untuk berinvestasi di Kabupaten Banjar. Untuk itu pemerintah Kabupaten Banjar terus melakukan pembenahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masalah perizinan. Untuk mempermudah pelayanan perizinan tersebut pada tahun 2007 pemerintah Kabupaten Banjar mengeluarkan kebijakan pelayanan satu pintu dengan membentuk lembaga pelayanan satu pintu yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan pada tahun 2009 lembaga tersebut menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Banjar.

Waktu penyelesaian perizinan untuk 27 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan antara 5 hari sampai dengan 14 hari, untuk pelayanan perizinan yang memerlukan peninjauan kelengkapan waktu penyelesaian selama 14 hari.

2.5.3.2 Pengenaan Pajak Daerah

Pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Banjar ada 6 jenis, meliputi : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak hiburan dan keramaian umum, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak penerangan jalan umum dan (6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C. Sedang retribusi yang dipungut sebanyak 18 jenis yaitu :

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil
4. Retribusi pasar
5. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
6. Retribusi penggantian biaya cetak peta
7. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
8. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
9. Retribusi terminal
10. Retribusi tempat parkir khusus
11. Retribusi rumah potong hewan
12. Retribusi tempat pendaratan kapal
13. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
14. Retribusi penjualan produk usaha daerah
15. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
16. Retribusi izin gangguan

17. Retribusi izin trayek dan

18. Retribusi izin PHHI hasil kayu di luar kawasan hutan dan hasil kayu perkebunan.

2.5.3.3 Peraturan Daerah

Penyusunan peraturan daerah merupakan suatu kegiatan yang banyak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat oleh karenanya penyusunan kebijakan ini dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dengan DPRD yang menjadi representasi keinginan masyarakat. Peraturan daerah ini terkait erat dengan aspek hukum.

Aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan salah satu hal penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang akuntabel, bersih dan berwibawa. Pembangunan hukum pada dasarnya terkait dengan pembentukan peraturan, penegakan hukum dan budaya hukum. Pembentukan peraturan terkait dengan penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah yang berpihak kepada masyarakat.

Penegakan hukum belum sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal ini merupakan tantangan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Banjar untuk bersikap secara profesional dan lebih responsif agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik. Di bidang budaya hukum, lemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Di samping itu, kurangnya sosialisasi peraturan pada masyarakat maupun aparatur pemerintah menimbulkan kesalahpahaman. Akibatnya

dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum menjadi hilang sehingga berpotensi memunculkan anarkisme. Dalam periode 2005-2009 berbagai jenis produk hukum dapat dilihat pada tabel 2.55 berikut:

Tabel 2.55. Jumlah Produk Hukum Daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar

No.	Jenis Produk Hukum Daerah	Jumlah				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Keputusan Bupati	729	800	863	737	610
2.	Peraturan Bupati	26	29	31	56	62
3.	Peraturan Daerah	13	21	17	24	16

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010

Selain produk hukum sebagaimana tersebut pada tabel di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar sebagai partner Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga menghasilkan beberapa produk hukum sebagaimana tabel 2.56 berikut.

Tabel 2.56. Jumlah Surat Keputusan yang dihasilkan DPRD Kabupaten Banjar

No.	Jenis Surat Keputusan	Jumlah (SK)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Surat Keputusan DPRD	22	22	14	24	18
2.	Surat Keputusan Pimpinan DPRD	3	3	2	8	8

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2010

2.5.3.4 Status Desa

Guna mengoptimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan mendekatkan pusat pelayanan kepada masyarakat. Persoalan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan dengan wilayah yang luas dan ditambah dengan distribusi penduduk yang tidak merata memerlukan suatu strategi dan pendekatan khusus.

Dalam rangka mendekatkan pusat pelayanan dimaksud, pada periode 2005-2009 telah dilakukan beberapa kali pemekaran wilayah kecamatan. Hal ini tidak lain dimaksudkan adalah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping pemekaran kecamatan, juga ditempuh peningkatan status desa menjadi kelurahan serta melengkapi berbagai fasilitas desa baik berupa pelayanan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Diantara fasilitas yang telah dilakukan secara merata adalah meliputi pembangunan dan rehab kantor desa serta pembangunan poskesdes di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Banjar. Perkembangan jumlah kecamatan dan desa periode 2005-2009 dapat dilihat pada tabel 2.57 berikut ini:

Tabel 2.57. Perkembangan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009.

No.	Tahun	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	2005	16	288
2	2006	17	288
3	2007	17	288
4	2008	19	288
5	2009	19	290

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2005-2010

2.5.4 Sumber Daya Manusia

2.5.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Cukup tingginya pertumbuhan penduduk harus dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di samping fasilitas pendidikan dan kesehatan juga kemampuan masyarakat untuk memiliki keterampilan kerja. Gambaran mengenai status pencari kerja di Kabupaten Banjar tercermin pada kualifikasi pendidikan yang dimiliki sebagaimana termuat dalam tabel 2.58 berikut.

Tabel 2.58. Data Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Banjar Tahun 2009

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	51	245	296
2.	SMP	147	99	246
3.	SMA/SMK	1.018	623	1.641
4.	Sarjana Muda/	251	460	711
5.	Sarjana/Diploma IV	494	776	1270
Total		1.961	2.203	4.164

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2009

2.5.4.2 Tingkat Ketergantungan

Perkembangan penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2005 tercatat sebanyak 464.148 jiwa, sedangkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010 menunjukkan angka sebanyak 506.204 jiwa, ini berarti terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1,8 % per tahun.

Dilihat dari aspek distribusi penduduk menurut usia terlihat kecenderungan semakin tinggi pertumbuhan pada penduduk usia diatas 65 tahun dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk usia 0-14 tahun pada periode 2005 – 2009 seperti terlihat pada tabel 2.59. berikut ini:

Tabel 2.59. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (Jiwa) Tahun 2005-2009

Kelompok usia	2005	2006	2007	2008	2009
0 – 14 tahun	137.071	133.466	134.904	132.675	132.830
15 – 64 tahun	311.901	316.515	322.194	340.974	349.377
> 65 tahun	15.176	15.431	16.691	15.407	15.881
Jumlah	464.148	465.412	473.789	489.056	498.088

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2006-2010

Berdasarkan data diatas dapat diketahui jumlah penduduk usia kerja (PUK) dan jumlah penduduk diluar usia kerja (PDUK). PUK adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun sedangkan PDUK penduduk diluar usia 15 – 64. Berdasarkan PUK dan PDUK diketahui tingkat ketergantungan penduduk Kabupaten Banjar selama periode 2005-2009 menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan yaitu dari 67,20 % pada tahun 2005 menjadi 70,14% pada tahun 2009 seperti pada tabel 2.60 berikut:

Tabel 2.60. Penduduk Usia Kerja (PUK), Penduduk Di Luar Usia Kerja (PDUK) dan Rasio Beban/Tanggungans Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009.

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
PUK	311.901	316.515	322.194	340.974	349.377
PDUK	152.247	148.897	151.595	148.082	148.711

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
Penduduk	464.148	465.412	473.789	489.056	498.088
Rasio beban Penduduk	67,20%	68%	68%	69,72%	70,14%

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2006-2010

2.6 Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14, Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 tahun 2008 tentang urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Peraturan Pemerintah Nomor

38 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjar . Tujuan peletakan urusan dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Banjar adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan demokratisasi dan penghormatan budaya lokal dengan memerhatikan potensi dan keragaman budaya daerah.

2.7 Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan

Pada sisi perencanaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana sesuai dengan jadwal penyusunan perencanaan secara bertahap dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa pada bulan Januari dan dilanjutkan rapat kerja pembangunan di tingkat kecamatan pada bulan Pebruari. Pada tahapan selanjutnya

bulan Maret diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten.

Sebagai tindak lanjut dari tahapan yang sudah dilakukan di atas pada bulan April sampai dengan Mei Pemerintah Kabupaten Banjar menyiapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD. Pada tahun 2006 – 2010 RPJMD ditetapkan berdasar Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006.

Dalam lingkup perencanaan ini disamping penetapan RPJMD dan RKPD masing-masing SKPD harus menyiapkan Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD dan Renja SKPD sebagai penjabaran RKPD. setelah disusun RKPD pada bulan Juni sampai dengan Juli Pemerintah Kabupaten menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Daftar beberapa dokumen menurut jadwal waktu yang harus dipenuhi dalam penyusunan perencanaan terlihat pada tabel 2.61 di bawah ini:

Tabel 2.61. Tabel jadwal waktu yang harus dipenuhi dalam penyusunan perencanaan.

No.	Dokumen	Jadwal Waktu
1.	RPJMD	6 Bulan setelah Pelantikan Kepala Daerah
2.	Renstra SKPD	3 Bulan setelah Pelantikan Kepala SKPD
3.	RKPD	April - Mei
4.	KUA PPAS	Juni - Juli

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banjar Tahun 2010

Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar dilakukan dalam dua ranah, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Secara internal pengawasan

tersebut dilakukan secara berjenjang oleh pejabat yang membawahi langsung aparatur di bawahnya, serta melalui peran Inspektorat Daerah.

Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh beberapa pihak, seperti DPRD Kabupaten Banjar, BPK RI, BPKP, bahkan KPK dalam ranah tertentu. Dalam konteks pengawasan eksternal pula, publik semestinya harus mengawasi kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar.

Dalam upaya membuka ruang pengawasan publik, saat ini Pemerintah Kabupaten Banjar sedang mempersiapkan keterbukaan informasi kinerja yang bisa dipantau secara langsung oleh masyarakat melalui mekanisme hak mendapatkan informasi, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara dan beberapa aspek informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketentuan dalam UU ini mengharuskan setiap SKPD di Pemerintah Kabupaten memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) yang berperan untuk melayani, sekaligus memberikan penjelasan atas permintaan dan keluhan publik pada layanan SKPD yang bersangkutan.

Selain itu dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat dalam kerangka sistem pengawasan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pelaksanaan PP ini mesti diaplikasikan dengan baik dan praktis, sehingga publik dapat mengetahui apa, bagaimana dan kapan program-program kerja

Pemerintah Kabupaten Banjar yang direpresentasikan dari akuntabilitas kinerja setiap SKPD yang ada.

Pengelolaan keuangan daerah secara kelembagaan pada tahun 2005 – 2008 di dalam koordinasi Bagian Keuangan yang berada di bawah Sekertaris Daerah. Dalam rangka peningkatan pembinaan, seiring dengan kewenangan yang dilimpahkan dan kompleksnya penanganan masalah pengelolaan keuangan sehingga diperlukan peningkatan status kelembagaan dengan menggabungkan Bagian Keuangan, Bagian Perbekalan dan Peralatan serta Dinas Pendapatan menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Persoalan mendasar pengelolaan keuangan daerah ini adalah masih terbatasnya sumber-sumber penerimaan khususnya pendapatan asli daerah sehingga diperlukan upaya lebih keras dan kreatif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dimaksud. Sementara itu dari sisi belanja besaran dana yang terserap pada belanja tidak langsung memerlukan suatu perhatian khusus dalam pengalokasian belanja langsung yang berkaitan dengan kepentingan publik.

2.8 Lokasi Perkantoran

Dalam sejarah keberadaan Kabupaten Banjar, pada tahun 2000 dengan dibentuknya Banjarbaru sebagai kota maka resmi adanya pemisahan antara daerah Kabupaten Banjar sebagai kabupaten induk dengan Banjarbaru sebagai kota daerah pemekaran. Beberapa implikasi dari pemisahan ini masih menyisakan beberapa persoalan yang hingga kini belum dilakukan penyelesaian proses khususnya

mengenai perkantoran, masih terdapat beberapa SKPD Kabupaten Banjar yang berada di daerah Kota Banjarbaru.

Persoalan di atas memerlukan perhatian khusus mengingat untuk penyelesaiannya memerlukan penyediaan lokasi baru dan pendanaan yang cukup tidak sedikit. Guna menyikapi hal ini pada periode RPJM selanjutnya perlu dilakukan langkah-langkah relokasi kantor-kantor pemerintahan yang masih berada di Kota Banjarbaru ke dalam lokasi baru di Kabupaten Banjar. Berikut jumlah dan nama SKPD yang perlu dilakukan relokasi sebagaimana tabel 2.62.

Tabel 2.62. Tabel daftar SKPD yang perlu di relokasi

No	Nama SKPD
1.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.	Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika
4.	PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banjar Tahun 2010

2.9 Kepegawaian Daerah

Menciptakan sumber daya aparatur yang berkualitas menjadi satu keharusan guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Secara terstruktur jumlah pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Banjar menunjukkan kecenderungan tingkat pendidikan PNS mengarah ke kualitas jenjang pendidikan tinggi. Searah dengan perkembangan dimaksud, peningkatan kualitas pendidikan aparatur berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik. Sesuai dengan struktur kepegawaian yang ideal adalah berbentuk pyramid. Dalam kondisi ini jumlah pegawai golongan yang

lebih rendah lebih banyak sehingga dapat dilakukan pola pelaksanaan kegiatan secara terkendali. Perkembangan terakhir sebagai akibat dari peningkatan pendidikan PNS ternyata struktur menurut golongan lebih banyak kepada golongan yang lebih tinggi yaitu golongan III dan golongan IV. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh kepada teknis pelaksanaan kegiatan yang dirasakan pada sebagian besar SKPD yang mengalami kekurangan unsur staf. Struktur ketimpangan golongan dimaksud tercermin pada tabel 2.63 di bawah ini.

Tabel 2.63. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	IV	161	161	162	152	152
2.	III	1.166	1.166	1.441	1.325	1.325
3.	II	330	330	541	463	503
4.	I	5	5	52	62	62
Total		1.662	1.662	2.196	2.002	2.042

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 3

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Mencermati perkembangan kondisi ril selama tahun 2011-2012 dan keterkaitan antar program baik Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, maka perlu dilakukan analisis kembali terhadap isu-isu strategis yang berkembang saat ini, khususnya dalam rangka mengaitkan dengan isu-isu strategis yang bersifat nasional maupun regional.

Oleh karena itu isu-isu strategis bersifat nasional dan regional yang berkembang saat ini serta apa yang telah dimuat dalam gambaran umum daerah pada bab sebelumnya, dilakukan beberapa ekstrapolasi pengembangan analisis sebagai bahan untuk merumuskan alternatif kebijakan yang akan diambil.

Hasil analisis terhadap perkembangan kondisi tersebut di atas dirumuskan dalam isu-isu strategis yang perlu disikapi dalam penjabaran visi misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam RPJMD periode 2011-2015.

3.1. Sosial Budaya Daerah

3.1.1. Kependudukan

a. Peluang

- 1) Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,8% per tahun merupakan peluang untuk memudahkan manajemen kependudukan.
- 2) Dukungan kebijakan pemerintah dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- 3) Daya dukung lahan yang cukup besar.

b. Tantangan

1. Masih kurangnya pemerataan penyebaran penduduk.
2. Daya dukung lingkungan yang semakin dinamis

c. Isu Strategis

Penataan Sistem Administrasi kependudukan untuk mendukung kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Tabel 3.1. Proyeksi Penduduk Kabupaten Banjar (Jiwa) Tahun 2011–2015

2011	2012	2013	2014	2015
515.316	524.592	534.035	543.648	553.434

Sumber : BPS Kabupaten Banjar Tahun 2010

3.1.2. Ketenagakerjaan

a. Peluang

- 1) Berkembangnya sektor industri pengolahan dan jasa yang berpotensi menyerap tenaga kerja.
- 2) Perkembangan kawasan penyangga ibukota provinsi.

b. Tantangan

- 1) Perluasan lapangan kerja.
- 3) Ketersediaan angkatan kerja trampil dan terdidik.
- 4) Pengurangan pengangguran.

c. Isu Strategis

- 1) Perluasan kesempatan kerja.
- 2) Penyediaan angkatan kerja berkualitas dan terdidik.
- 3) Perlindungan tenaga kerja

Tabel 3.2. Proyeksi Pencari Kerja Yang Ditempatkan Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Prosentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan
1.	2011	4.141	1.263	30,5
2.	2012	4.151	1.349	32,5
3.	2013	5.465	1.913	35
4.	2014	6.004	2.132	35,5
5.	2015	7.120	2.848	40

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2010

3.1.3. Transmigrasi

a. Peluang

- 1) Belum meratanya persebaran penduduk di wilayah kabupaten.
- 2) Tersedianya lahan untuk pengembangan program transmigrasi
- 3) Berkembangnya sektor informal yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat transmigrasi.
- 4) Menguatnya kerjasama antar pemerintah daerah dalam pengembangan transmigrasi.

b. Tantangan

- 1) Semakin berkurangnya daerah tujuan transmigrasi seiring dengan berjalannya alih fungsi lahan dan telah ditetapkannya RTRW sesuai rencana masing-masing daerah
- 2) Berkurangnya warga transmigran yang tinggal di lokasi transmigrasi.

c. Isu Strategis

- 1) Pola pengembangan transmigrasi untuk pengembangan wilayah.
- 2) Optimalisasi pemanfaatan lahan guna peningkatan kesejahteraan.
- 3) Mengembangkan sektor informal sebagai alternatif pengembangan pendapatan masyarakat transmigrasi.

3.1.4. Kesejahteraan Sosial

a. Peluang

- 1) Banyaknya sektor informal tumbuh di masyarakat.
- 2) Kebijakan pemerintah mendorong kemandirian masyarakat.
- 3) Perhatian pemerintah terhadap peningkatan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial.
- 4) Kemitraan dengan Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin

b. Tantangan

- 1) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan sumber daya ekonomi.

- 2) Menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat melalui sektor formal maupun informal.

c. Isu Strategis

- 1) Penurunan jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah akesejahteraan sosial lainnya.
- 2) Pembinaan Lembaga kemasyarakatan untuk mendorong pemberdayaan khususnya masyarakat miskin

Mengenai proyeksi presentase penduduk miskin di Kabupaten Banjar sebagai berikut:

Tabel 3.3. Proyeksi Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015

Tahun	Persentase Penduduk Miskin
2011	5,10
2012	4,72
2013	4,13
2014	3,73
2015	3,54

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banjar Tahun 2010

3.1.5. Kesehatan

a. Peluang

- 1) Ketersediaan sarana prasarana, dan sumberdaya kesehatan memadai.
- 2) Upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu, polindes, desa siaga, poskestren, dan lain-lain telah berkembang dan berjalan dengan baik.

- 3) Peran masyarakat dan swasta dalam penyediaan pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan berkembang.
- 4) Sumberdaya manusia bidang kesehatan yang semakin membaik kuantitas dan kualitasnya.

b. Tantangan

- 1) Meningkatnya tuntutan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
- 2) Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat relatif masih rendah.
- 3) Belum meratanya SDM dan sarana pelayanan kesehatan.
- 4) Belum maksimalnya peran serta dan kemitraan LSM, lembaga pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kesehatan.
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan kesehatan.

c. Isu Strategis

- 1) Derajat Kesetaraan:
 - a. Kesetaraan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Banjar dibandingkan tingkat nasional.
 - b. Permasalahan kesehatan ibu dan balita di Kabupaten Banjar.
 - c. Permasalahan Status Gizi Balita Kabupaten Banjar.

- d. Potensi endemisitas berbagai penyakit menular di Kabupaten Banjar masih tinggi.
- 2) Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan:
 - a. Akses terhadap pusat layanan kesehatan.
 - b. Mutu pelayanan kesehatan.
 - c. Sinergitas dan harmonisasi pembangunan kesehatan.
 - d. Kesiapsiagaan bencana dalam bidang kesehatan.
 - e. Kemandirian dan peran serta masyarakat masih belum optimal.
 - 3) Peningkatan SDM kesehatan :
 - a. Kualitas SDM kesehatan masih rendah.
 - b. Rasio tenaga medis masih belum ideal.
 - c. Pendistribusian tenaga medis belum merata di semua pelayanan kesehatan.

3.1.6. Pendidikan

- a. Peluang
 - 1) Potensi Kabupaten Banjar sebagai kota pendidikan santri.
 - 2) Interaksi sosial yang cukup intensif di masyarakat.
 - 3) Ketersediaan Sarana Teknologi Informasi.
 - 4) Apresiasi Masyarakat terhadap pendidikan cukup tinggi.
- b. Tantangan
 - 1) Dampak negatif dari adanya interaksi sosial dan globalisasi.

- 2) Masih rendahnya partisipasi dalam pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- 3) Adanya kecenderungan orientasi bisnis dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 4) Masih rendahnya rasio sekolah/guru terhadap murid pada jenjang pendidikan menengah.

c. Isu Strategis

- 1) Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan menengah.
- 2) Peningkatan pemerataan distribusi guru dan mutu pendidikan.
- 3) Peningkatan mutu lulusan dan kompetensi pendidik yang berbasis pada kearifan dan budaya lokal.
- 4) Penguasaan teknologi dan informasi dalam rangka mewujudkan hasil pendidikan berdaya saing tinggi.

3.1.7. Kebudayaan

a. Peluang

- 1) Kabupaten Banjar memiliki keragaman budaya yang dapat dikembangkan.
- 2) Pengembangan budaya banjar melalui pelestarian dan pembangunan situs budaya
- 3) Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk penggalian dan Pelestarian budaya.
- 4) Pemanfaatan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai media membangun jejaring global dan internasional.

b. Tantangan

- 1) Minimnya informasi dan penggalian sejarah budaya Banjar.
- 2) Antisipasi dampak negatif dari pesatnya perkembangan sistem informasi dan teknologi.

c. Isu Strategis

- 1) Peningkatan ketahanan budaya.
- 2) Pengembangan budaya daerah.

3.1.8. Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Remaja

a. Peluang

- 1) Potensi SDM perempuan dalam pembangunan.
- 2) Keberhasilan program keluarga berencana memberi kesempatan bagi perempuan usia produktif untuk berperan luas dalam pembangunan.
- 3) Kebijakan pemerintah dalam fasilitasi dan mediasi pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender*.
- 4) Banyak Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, memiliki perhatian terhadap masalah pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dan remaja.

b. Tantangan

- 1) Membangun strategi pemberdayaan yang meminimalkan konflik peran.
- 2) Pengarusutamaan *gender* yang diikuti dengan penyempurnaan dan perubahan peraturan perundangan yang tidak bias *gender* dan tidak mendiskriminasikan kaum perempuan.

- 3) Menghindarkan pengaruh buruk terhadap anak dan remaja dari berbagai faktor yang merusak masa kecilnya, baik secara fisik maupun psikis.
- 4) Menciptakan lingkungan, sarana-prasarana, serta pendampingan yang kondusif dan nyaman bagi anak juga remaja.

c. Isu Strategis

- 1) Peningkatan dan perluasan kesetaraan *gender* yang dititikberatkan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan serta di semua sektor dan bidang kehidupan lainnya.
- 2) Peningkatan kesadaran dan kepekaan *gender* melalui pengembangan jejaring (*networking*) berbagai elemen masyarakat yang sadar dan peka *gender*.
- 3) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan remaja.
- 4) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
- 5) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dalam rangka optimalisasi peran perempuan.

3.1.9. Pemuda dan Olahraga

a. Peluang

- 1) Pemuda sebagai sumberdaya pembangunan.
- 2) Semakin berkembangnya industri pengolahan dan jasa, merupakan peluang membangun kewirausahaan pemuda dalam rangka kemandirian ekonomi.
- 3) Semangat olahraga yang dimiliki masyarakat secara turun-temurun

- 4) Keberadaan Gelanggang Olahraga untuk pusat kegiatan olahraga masyarakat.
- b. Tantangan
- 1) Menciptakan lingkungan serta penyediaan prasarana dan sarana untuk mengembangkan keterampilan dan kemandirian serta meminimalkan dampak negatif globalisasi bagi pemuda.
 - 2) Menciptakan lingkungan serta prasarana dan sarana publik untuk memperluas budaya olahraga di kalangan masyarakat.
- c. Isu Strategis
- 1) Peningkatan kemandirian sosial dan ekonomi pemuda dalam pembangunan.
 - 2) Pemasyarakatan olahraga, peningkatan ruang publik untuk olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga.

3.1.10. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- a. Peluang
- 1) Tingginya minat masyarakat yang potensial bagi pengembangan IPTEK.
 - 2) Semakin berkembangnya usaha pemanfaatan Teknologi Informatika.
 - 3) Semakin berkembangnya pengelola jasa TI.
- b. Tantangan
- 1) Membangun kemandirian pengembangan IPTEK.
 - 2) Mengefektifkan penyebaran dan komunikasi hasil pengembangan IPTEK.

c. Isu Strategis

- 1) Pengembangan IPTEK untuk kegiatan pendidikan.
- 2) Pengembangan pembelajaran berbasis TI.

3.1.11. Penanggulangan Bencana

a. Peluang

- 1) Terbukanya sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat terhadap penanggulangan bencana.
- 2) Masih hidupnya nilai-nilai kerukunan, kerjasama dan gotong royong dalam menghadapi risiko bencana.
- 3) Adanya kajian penanganan dan penanggulangan bencana.

b. Tantangan

- 1) Meningkatkan peran kelembagaan dan masyarakat dalam mencegah, menghadapi dan menanggulangi bencana alam yang akan terjadi.
- 2) Mengarusutamakan pengurangan resiko bencana dengan kelembagaan yang kuat.
- 3) Melakukan identifikasi, mengkaji, memantau resiko bencana serta menerapkan system peringatan dini.
- 4) Mengurangi cakupan resiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

c. Isu Strategis

- 1) Pengurangan resiko bencana serta penguatan kelembagaan penanggulangan bencana.

- 2) Pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun keselamatan dan ketahanan.
- 3) Pengurangan faktor-faktor penyebab resiko bencana.
- 4) Penguatan kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat.

3.2. Perekonomian Daerah

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

a. Peluang

- 1) Kinerja perekonomian Kabupaten Banjar yang positif selama beberapa tahun terakhir dipicu oleh kenaikan pertumbuhan pada semua sektor secara variatif.
- 2) Kinerja pemerintahan yang positif dan profesional berdampak positif terhadap perkembangan dunia usaha.
- 3) Trend meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun, menunjukkan kemandirian pemerintah daerah; akan berpengaruh positif terhadap kemampuan belanja pemerintah, terutama dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas bagi aksesibilitas perekonomian daerah.
- 4) Keberadaan terminal regional dan insfratraktur diharapkan dapat menunjang aktivitas perekonomian.
- 5) Keberadaan pasar sebagai sarana pengembangan ekonomi lokal

b. Tantangan

- 1) Optimalisasi perumusan arah kebijakan perekonomian Kabupaten Banjar.

- 2) Belum berkembangnya sektor industri pengolahan dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi.
- 3) Masih lemahnya daya saing produk lokal berdampak pada kemampuan daya saing di tingkat regional.
- 4) Pembinaan pengembangan produk unggulan.

c. Isu Strategis

- 1) Kinerja PDRB perlu diperkuat dengan pergeseran dari sektor pertanian mengarah sektor industri dan jasa.
- 2) Pengembangan pasar lokal dan regional untuk menyerap produk unggulan
- 3) Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi secara berkualitas.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2015

TAHUN	2011	2012	2013	2014	2015
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,94	7,05	7,21	7,29	7,41

Sumber : BPS Kabupaten Banjar Tahun 2010

3.2.2. Investasi

a. Peluang

- 1). Spesifikasi keunggulan lokal Kabupaten Banjar di bidang pertanian, perdagangan dan jasa.

- 2). Komitmen Pemerintah Daerah mendorong pertumbuhan investasi dan perkenomian masyarakat .
 - 3). Ketersediaan sumberdaya alam yang besar.
 - 4). Dukungan Pusat atas pengembangan komoditas unggulan karet dan minapolitan
- b. Tantangan
- 1) Investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/riil.
 - 2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif.
 - 3) Peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya.
 - 4) Peningkatan kerjasama penanaman modal.
 - 5) Peningkatan peran masyarakat dalam mendukung masuknya investasi
- c. Isu Strategis
- 1) Peningkatan keunggulan bersaing.
 - 2) Perwujudan investasi yang mengarah pada keunggulan lokal.
 - 3) Sistem pelayanan investasi satu pintu dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 3.5. Proyeksi Penanaman Modal Tahun 2011-2015

Tahun	Proyeksi Penanaman Modal (Rp. Juta)
2011	937.747.670.701
2012	1.037.711.572.398
2013	1.148.331.626.016
2014	1.270.743.777.349
2015	1.406.205.064.014

Sumber: Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Banjar Tahun 2010

3.2.3. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro.

a. Peluang

- 1) Ketersediaan potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan untuk industri dan perdagangan.
- 2) Dukungan pemerintah terhadap Koperasi & UKM.
- 3) Biaya produksi sektor Koperasi & UKM yang relatif terjangkau.
- 4) Ketersediaan pasar yang menampung hasil produksi Koperasi & UKM.

b. Tantangan

- 1) Optimalisasi potensi ekonomi daerah untuk pengembangan Koperasi & UMKM.
- 2) Belum dimilikinya database UKM sehingga menyulitkan dalam merumuskan kebijakan pembinaan UKM.
- 3) Peningkatan daya saing Koperasi & UKM.
- 4) Kualitas SDM yang masih terbatas dalam mendukung industri.
- 5) Minimnya permodalan dan aksesibilitas terhadap permodalan.

c. Isu Strategis

- 1) Penyusunan database UKM
- 2) Perkuatan basis ekonomi kerakyatan dengan optimalisasi segenap potensi.
- 3) Penguatan jejaring informasi pasar bagi produk Koperasi & UKM.
- 4) Peningkatan asumsi unit usaha tenaga kerja dan nilai produksi di sektor Koperasi & UKM.

Tabel 3.6. Proyeksi Sektor Koperasi Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Koperasi	212	215	220	225	230
2.	Koperasi Aktif	110	115	120	125	135

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banjar tahun 2010

3.2.4. Pertanian

a. Peluang

- 1) Peningkatan daya saing produk pertanian.
- 2) Pengembangan komoditas yang punya nilai ekonomi tinggi.
- 3) Pengembangan varietas unggul daerah .
- 4) Kabupaten Banjar sebagai daerah lumbung padi (kindai limpuar).
- 5) Peningkatan nilai tambah produk pertanian.
- 6) Pengembangan pertanian berkelanjutan.
- 7) Potensi pasar kebutuhan daging sapi.

b. Tantangan

- 1) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
- 2) Tingkat kesejahteraan petani masih rendah, mempengaruhi pada minat bertani masyarakat.
- 3) Potensi perkembangan hama dan penyakit tanaman dan hewan.
- 4) Minimnya modal usaha petani.
- 5) Impor beberapa jenis komoditas pertanian.
- 6) Peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan petani.
- 7) Kemampuan petani pada akses permodalan.

8) Kabupaten Banjar sebagai daerah penyangga pangan nasional

c. Isu Strategis

- 1) Ketersediaan dan keterjangkauan saprodi (bibit, pupuk, obat-obatan).
- 2) Menurunnya daya dukung lahan dan air.
- 3) Krisis ekonomi yang berdampak pada krisis penyediaan pangan global.
- 4) Penurunan luasan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan
- 5) Pengembangan ternak sapi potong.
- 6) Proyeksi sektor pertanian relatif stabil dalam arti jumlah produksi akan meningkat seiring peningkatan produktivitas lahan pertanian dalam rangka mendukung program penyangga pangan nasional.
- 7) Peningkatan kesejahteraan hidup petani.

Proyeksi produksi komoditas pertanian secara relatif juga stabil mengingat intensitas pertanian di Kabupaten Banjar relatif dapat mempertahankan produktivitas lahan pertanian yang dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut ini:

**Tabel 3.7. Proyeksi Jumlah Produksi Sektor Pertanian (Ton)
Tahun 2011-2015**

No.	Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi	224.062	227.871	232.200	236.844	243.239
2	Jagung	1.731	1.817	1.999	2.299	2.759
3	Kacang Tanah	4.662	5.548	6.935	9.709	9.806
4	Kacang Hijau	32	41	47	49	51
5	Ubi Kayu	2.130	2.415	2.960	3.210	3.742
6	Ubi Jalar	573	751	864	983	1.251

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar Tahun 2010

Sementara itu, untuk proyeksi populasi ternak besar, kecil dan unggas di Kabupaten Banjar di tampilkan dalam tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.8. Proyeksi Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas (Ekor) Tahun 2011-2015

No	Jumlah Ternak	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Sapi	17.582	18.284	19.015	19.776	20.567	3,8
2.	Kerbau	1.382	1.438	1.495	1.555	1.617	3,9
3.	Kambing/Domba	13.500	14.040	14.602	15.186	15.793	4
4.	Ayam Buras	678.335	705.468	733.687	763.034	793.556	4
5.	Ayam Petelur	357.007	371.287	386.139	401.584	417.648	4
6.	Ayam Pedaging	6.634.724	6.900.113	7.176.117	7.463.162	7.761.688	4
7.	Itik	249.883	257.354	265.075	273.027	281.218	2,8

Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kab. Banjar

3.2.5. Ketahanan Pangan

a. Peluang

- 1) Pemenuhan ketersediaan bahan pangan masyarakat.
- 2) Pemerataan distribusi dan akses pangan bagi masyarakat.
- 3) Diversifikasi pangan berbasis potensi pangan lokal.
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG).
- 5) Kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan (ketenagaan, kelembagaan dan penyelenggaraan).

b. Tantangan

- 1) Peningkatan jumlah penduduk tidak seimbang dengan peningkatan produksi pangan.
 - 2) Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas (degradasi) lahan produktif.
 - 3) Ketergantungan pada bahan pangan/ baku import.
 - 4) Keterbatasan akses masyarakat terhadap bahan pangan.
 - 5) Masih terbatasnya konsumsi pangan berimbang, beragam, dan bergizi.
 - 6) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh.
- c. Isu Strategis
- 1) Masih adanya desa-desa yang berpotensi rawan pangan yang disebabkan kemiskinan dan berbagai bencana.
 - 2) Ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok.
 - 3) Bahan *addictive* pada makanan yang berpengaruh pada keamanan pangan.
 - 4) Beredarnya produk pangan yang sudah kadaluwarsa.
 - 5) Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen masih kurang.
 - 6) Sarana prasarana penyuluh belum memenuhi standar.
 - 7) Masih adanya peredaran makanan yang mengandung bahan tambahan pangan dan cemaran yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat.

3.2.6. Kehutanan dan Perkebunan

a. Peluang

- 1) Optimalisasi lahan pekarangan, kebun dan lahan kering yang potensial untuk hutan rakyat.
- 2) Multifungsi hutan bagi kehidupan manusia meliputi fungsi ekonomi, ekologi dan sosial.
- 3) Terbukanya peluang pengembangan agribisnis perkebunan.
- 4) Terbukanya pangsa pasar produk kehutanan dan perkebunan.
- 5) Terbukanya peluang kerja dan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan kebun.
- 6) Terbukanya peluang pengembangan komoditas unggulan.

b. Tantangan

- 1) Rendahnya pendapatan masyarakat/petani sekitar hutan.
- 2) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kehutanan dan perkebunan rendah.
- 3) Kelembagaan masyarakat kehutanan dan perkebunan belum berkembang secara produktif.
- 4) Terjadinya kebakaran hutan dan gangguan keamanan hutan serta pelestarian sumberdaya alam akibat tekanan masyarakat sekitar hutan.
- 5) Daya saing produk perkebunan primer maupun hasil olahannya belum mampu bersaing.

6) Peredaran benih hutan/perkebunan yang belum bersertifikat/ berlabel masih tinggi.

c. Isu Strategis

- 1) Rendahnya daya saing produk kehutanan/perkebunan.
- 2) Peranan kehutanan dan perkebunan di dalam mendukung mengurangi kemiskinan bagi petani hutan/kebun serta peningkatan peluang kerja dan usaha.
- 3) Peningkatan nilai tambah/pendapatan bagi petani hutan/kebun sesuai tuntutan pembangunan.
- 4) Pengendalian tingkat kerusakan sumberdaya hutan.
- 5) Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

3.2.7. Perikanan dan Kelautan

a. Peluang

- 1) Potensi perikanan budidaya masih terbuka
- 2) Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan dari Kabupaten Banjar dan luar daerah.
- 3) Adanya tempat-tempat pendaratan ikan dan PPI.
- 4) Pemasaran produk perikanan domestik.

b. Tantangan

- 1) Peningkatan kualitas dan keanekaragaman alat tangkap ikan.
- 2) Keterbatasan modal usaha bagi pembudidaya ikan dan nelayan.
- 3) Stabilisasi harga produk perikanan.

- 4) Teknologi budidaya dan pengolahan hasil tangkapan ikan.
 - 5) Minimalisasi hama dan penyakit pada perikanan budidaya.
- c. Isu Strategis
- 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir/nelayan.
 - 2) Pengembangan usaha perikanan budi daya dan tangkap.
 - 3) Proyeksi jumlah ikan dan lainnya diperkirakan akan terus meningkat mengingat besarnya potensi dan peluang yang tersedia.
 - 4) Pengembangan pengolahan hasil perikanan dan perluasan akses pasar.

Berikut ini ditampilkan target pembangunan perikanan dan kelautan di Kabupaten Banjar.

Tabel 3.9. Target Pembangunan Perikanan dan Kelautan Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Produksi (Ton)					
	• Perikanan Budidaya	35.785,26	39.109,71	42.743,00	46.713,82	53.987,17
	• Perikanan Tangkap	11.457,02	11.836,24	11.964,08	12.068,16	12.307,11
2.	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	37,32	39,18	41,14	43,20	45,36

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar

3.2.8. Energi dan Sumber daya Mineral

a. Peluang

- 1) Sumberdaya mineral atau bahan tambang yang ada di Kabupaten Banjar, khususnya bahan galian golongan C yang jumlahnya melimpah belum diusahakan secara optimal.
- 2) Ketersediaan sumberdaya alam dalam hal ini air, matahari yang melimpah merupakan potensi yang baik bagi pengembangan energi ketenagalistrikan.
- 3) Potensi sumberdaya alam untuk pengembangan energi terbarukan.

b. Tantangan

- 1) Pemanfaatan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan bagi eksploitasi bahan galian.
- 2) Terbatasnya penelitian dan teknologi energi terbarukan.
- 3) Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah guna mendorong pemerataan pembangunan.
- 4) Rentang pengawasan terhadap eksploitasi SDA yang terbatas.

c. Isu Strategis

- 1) Pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam eksploitasi bahan galian.
- 2) Pemerataan kebutuhan energi listrik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 3) Pengawasan terhadap eksploitasi pertambangan.

3.2.9. Pariwisata

a. Peluang

- 1) Pengembangan potensi wisata daerah.
- 2) Pengembangan Kawasan Kelampayan /religi.
- 3) Pengembangan wisata permata center.
- 4) Pusat kerajinan dan perdagangan batu permata terkenal di tingkat nasional.
- 5) Kabupaten Banjar sebagai salah satu tujuan wisata di Kalsel.

b. Tantangan

- 1) Peningkatan berkelanjutan kreativitas dan inovasi pengelolaan pariwisata.
- 2) Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung.
- 3) Peningkatan kualitas SDM Pariwisata.
- 4) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam kepariwisataan daerah.

c. Isu Strategis

Mengembangkan manajemen pariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal.

Proyeksi kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Banjar diperkirakan akan mengalami peningkatan pada tahun 2010 dan tahun-tahun mendatang dengan asumsi bahwa kondisi dan situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dalam situasi kondusif.

3.3. Prasarana dan Sarana Daerah

3.3.1. Transportasi

a. Peluang

- 1) Keberadaan terminal regional tipe A
- 2) Pengembangan jaringan transportasi lingkaran selatan, lingkaran utara dan mataraman - sungai ulin, guna pengembangan modal transportasi.
- 3) Peningkatan kondisi jalan poros desa ke ibukota kecamatan.

b. Tantangan

- 1) Kurangnya prasarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman.
- 2) Aksesibilitas wilayah dalam provinsi yang belum merata dan masih banyaknya tempat-tempat wisata yang belum terjangkau oleh pelayanan transportasi.
- 3) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengendalian ruang manfaat jalan (rumaja) untuk kegiatan di luar kegiatan transportasi.
- 4) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan fasilitas keselamatan jalan guna mengendalikan dan mengarahkan pergerakan lalu lintas jalan.

c. Isu Strategis

- 1) Pemanfaatan penyediaan pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman dan murah.
- 2) Peningkatan jaringan jalan berikut fasilitas keselamatan guna pengembangan wilayah.

- 3) Pengembangan pola transportasi angkutan massal, melalui penyusunan manajemen transportasi.
- 4) Peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan transportasi yang menunjang keamanan dan kenyamanan pemakai jalan.
- 5) Pengembangan prasarana terminal regional Kabupaten Banjar
- 6) Pengembangan infrastruktur angkutan barang.

3.3.2. Sumber Daya Air

a. Peluang

- 1) Pemberlakuan otonomi daerah membuka peluang optimalisasi kerjasama antar Pemerintah Daerah, dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) untuk keperluan konservasi SDA, pendayagunaan air dan pengendalian kerusakan.
- 2) Potensi dukungan masyarakat dalam pengelolaan SDA.
- 3) Tingginya curah hujan di Kabupaten Banjar yang merupakan potensi bagi penyediaan air untuk keperluan pertanian secara luas maupun domestik di perkotaan dan perdesaan.

b. Tantangan

- 1) Perlu segera melakukan penyusunan pola pengelolaan SDA yang berbasis wilayah sungai dengan mendasarkan pada data-data yang ada dalam Sistem Informasi SDA.
- 2) Dalam melakukan konservasi SDA, Pemerintah Daerah menghadapi tantangan yang berasal dari pengelola maupun dari alam. Tantangan dari

- pihak pengelola SDA adalah kurangnya koordinasi antar wilayah dan sektor dalam pengelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal.
- 3) Masih belum tercapainya efisiensi sarana dan prasarana irigasi yang mengakibatkan masih belum maksimalnya daerah irigasi untuk mendapat layanan irigasi.
 - 4) Tindakan-tindakan merusak lingkungan menimbulkan dampak negative khususnya berkaitan dengan penyediaan air, pencemaran air, termasuk kontrol yang lebih ketat terhadap alih fungsi lahan.

c. Isu Strategis

- 1) Pengelolaan SDA terpadu.
- 2) Pemberdayaan petani pemakai air.
- 3) Efisiensi sarana dan prasaran irigasi.
- 4) Manajemen sumberdaya air yang profesional dan efektif.
- 5) Mengurangi bahaya banjir dan kekeringan.

3.3.3. Air Minum / Air Bersih

a. Peluang

- 1) Adanya kerjasama antar daerah dan pihak swasta dalam pengembangan dan pengelolaan air minum/air bersih.
- 2) Adanya utilitas produksi dan jaringan air minum/air bersih.

- 3) Dimungkinkannya pengelolaan air minum secara regional.
- 4) Ketersediaan SDA untuk air baku yang kontinyu dan handal
- 5) Dukungan pemerintah pusat dan provinsi

b. Tantangan

- 1) Ketersediaan sumber-sumber air yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Belum optimalnya kualitas pelayanan baik distribusi, manajemen operasional maupun kualitas dan kuantitas hasil produksi.
- 3) Manajemen SDA untuk air baku PDAM secara regional.
- 4) Cakupan pelayanan target MDGs bidang air bersih/ minum.

c. Isu Strategis

- 1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum/air bersih di perkotaan dan perdesaan.
- 2) Pengembangan penyediaan sumber-sumber air dan optimalisasi sumber-sumber air yang sudah ada.
- 3) Peningkatan pengelolaan air minum.
- 4) Peningkatan peran pemerintah melalui SPAM untuk meningkatkan pelayanan PDAM.
- 5) Pencapaian target MDGs bidang pelayanan air bersih/minum.

3.3.4. Air Limbah/Sanitasi

a. Peluang

- 1) Adanya infrastruktur pengelolaan air limbah
- 2) Kerjasama pengelolaan air limbah/sanitasi

b. Tantangan

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.
- 2) Infrastruktur pengelolaan air limbah yang belum mencakup seluruh wilayah perkotaan dan perdesaan.
- 3) Target MDGs fasilitas sanitasi layak.

c. Isu Strategis

- 1) Pengelolaan air limbah yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di perkotaan dan perdesaan.
- 2) Optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi prasarana dan sarana air limbah.
- 3) Pencapaian target MDGs fasilitas sanitasi layak.

3.3.5. Persampahan dan Drainase

a. Peluang

- 1) Kerjasama pengelolaan persampahan.
- 2) Pengelolaan sampah oleh masyarakat dan swasta.
- 3) Teknologi pengelolaan sampah.

4) Adanya saluran drainase dan penerapan sumur resapan air hujan sebagai bagian dari sistem makro.

5) Ketersediaan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

b. Tantangan

1) Penggunaan sungai dan anak sungai sebagai penerima air buangan.

2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pemeliharaan jaringan drainase.

3) Sarana dan prasarana yang belum optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

4) Belum ada ketegasan fungsi sistem drainase.

c. Isu Strategis

1) Peningkatan sarana dan prasana pengelolaan persampahan.

2) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan drainase.

3) Peningkatan manajemen persampahan yang baik.

4) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan persampahan yang baik.

3.3.6. Perumahan dan Permukiman

a. Peluang

1) Dukungan pemerintah dalam penyediaan perumahan layak huni.

2) Ketersediaan lahan yang cukup untuk perumahan.

3) Peran swasta dalam pembangunan perumahan.

b. Tantangan

- 1) Terdapat *backlog* yang cukup besar antara kebutuhan dan penyediaan rumah yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Tumbuhnya permukiman padat dan kumuh di daerah perkotaan.

c. Isu Strategis

- 1) Pembangunan Perumahan yang layak huni bagi masyarakat.
- 2) Pembangunan rusunawa/rusunami di perkotaan.
- 3) Penanganan daerah kumuh perkotaan.

3.3.7. Listrik

a. Peluang

- 1) Adanya sumberdaya air untuk pengembangan energi listrik mikrohydro.
- 2) Potensi untuk pengembangan energi alternatif (energi surya).
- 3) Dukungan pemerintah dalam pengembangan energi
- 4) Potensi kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah luar negeri untuk penciptaan sumber energi listrik.

b. Tantangan

- 1) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap penggunaan energi secara mandiri.
- 2) Kurangnya penemuan sumber energi listrik terbarukan.
- 3) Belum optimalnya penciptaan teknologi untuk mengolah sumber energi
- 4) Penghematan pemakaian listrik.

5) Masih adanya masyarakat yang belum menikmati aliran listrik.

c. Isu Strategis

1) Penyediaan listrik yang menjangkau sampai wilayah terpencil.

2) Pengembangan energi listrik baru

3) Penghematan energi listrik.

4) Pengembangan energi listrik berbasis kemasyarakatan.

5) Kerjasama dengan swasta dalam penyediaan energi listrik.

3.3.8. Komunikasi dan Informatika

a. Peluang

1) Terbukanya akses masyarakat terhadap informasi terkini.

2) Pemanfaatan kemajuan teknologi untuk pengembangan potensi daerah.

3) Optimalisasi pemberian pelayanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat.

4) Pengembangan internet sebagai media pendidikan.

b. Tantangan

1. Belum optimalnya perkembangan sektor komunikasi dan informatika

2. Biaya internet yang relative masih mahal.

5) Optimalisasi lembaga-lembaga komunikasi sosial dan lembaga media tradisional sebagai lembaga komunikasi strategis.

6) Ketersediaan data terbaru (*up to date*) masih kurang.

c. Isu Strategis

- 1) Pengembangan Digital Government Services E-gov.
- 2) Pengembangan infrastruktur jaringan.
- 3) Kesiapan daerah dalam program penyediaan internet murah dan internet masuk desa.
- 4) Sosialisasi dan desiminasi informasi publik.
- 5) Layanan komunikasi dan informasi secara terpadu.

3.4. Lingkungan Hidup

a. Peluang

- 1). Kondisi geografis Kabupaten Banjar yang sangat luas dan memiliki kekayaan SDA melimpah menjadikan sumber penghidupan bagi masyarakat.
- 2). Pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi pada peningkatan proses daur ulang sampah dan air limbah
- 3). Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

b. Tantangan

Dalam pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1). Kurangnya respon para pemangku kepentingan terhadap isu-isu lingkungan global (perubahan iklim, pemanasan global, penipisan lapisan ozon).

- 2). Dukungan Undang-undang untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan air limbah dengan menggunakan konsep *sanitary landfill*.
 - 3). Laju pencemaran/kerusakan lingkungan yang semakin meningkat setiap tahunnya terutama di wilayah perkotaan Kabupaten Banjar akibat dinamika kegiatan rumah tangga, ekonomi, transportasi dan pembangunan.
 - 4). Perlunya meningkatkan konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati serta pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana agar ketersediaan sumber air baik secara kualitas dan kuantitas dapat terjaga serta terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- c. Isu Strategis

Tantangan-tantangan tersebut di atas menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan isu-isu strategis untuk pengelolaan lingkungan hidup. Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain meliputi:

- 1). Pengelolaan sampah mandiri.
- 2). Pengembangan bio energi.
- 3). Pelaksanaan 3R (*Recycle, Reuse, Reduce*).
- 4). Penanaman sejuta pohon.
- 5). Pengelolaan ruang terbuka hijau.
- 6). Pencemaran air sungai oleh limbah cair, dan sampah.
- 7). Pencemaran udara dari kegiatan pertambangan.
- 8). Penurunan estetika lingkungan.

- 9). Pelanggaran tata ruang.
- 10). Penambahan liar.

3.5. Struktur dan Pola Tata Ruang

3.5.1. Struktur Tata Ruang Kabupaten Banjar

a. Peluang

- 1) Berpotensi mendorong perkembangan ekonomi sekitar Kabupaten Banjar
- 2) Perkembangan wilayah melalui pusat pengembangan.
- 3) Daya tarik Kabupaten Banjar dalam segala bidang pengembangan investasi.

b. Tantangan

- 1) Penanganan atas isu global dan tekanan internal.
- 2) Pesatnya perkembangan kegiatan sektoral yang memerlukan pengaturan penggunaan lahan (industri, perdagangan dan perumahan).
- 3) Daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumberdaya yang berlebihan.
- 4) Penataan ruang yang belum konsisten

c. Isu Strategis

- 1) Meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan pengembangan tata ruang.
- 2) Memantapkan struktur dan hirarki sistem pusat pertumbuhan.
- 3) Pengelolaan pertumbuhan wilayah yang terintegrasi antar sektor pembangunan.

- 4) Meningkatkan peran dunia usaha dan daya saing melalui penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan infrastruktur dan wilayah.
- 5) Mendorong penataan ruang kawasan untuk revitalisasi dan kelestarian lingkungan serta budaya.
- 6) Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pengawasan dan pengelolaan penataan ruang.
- 7) Mendorong pengembangan wilayah/kawasan yang saling memperkuat dan seimbang.

3.5.2. Pola Ruang Kabupaten Banjar

a. Peluang

- 1) Aksesibilitas yang baik dari segala penjuru.
- 2) Tersedianya lahan guna pengembangan wilayah.
- 3) Kondisi alam yang mendukung wisata agro.
- 4) Suasana kondusif.

b. Tantangan

- 1) Belum tersusunnya penataan ruang secara detail pada kawasan-kawasan strategis.
- 2) Berkurangnya lahan subur pertanian dan lahan resapan air.
- 3) Menurunnya produksi pertanian.
- 4) Konservasi lahan yang terus berlangsung.

c. Isu Strategis

- 1) Penguatan lembaga yang terkait dalam penataan ruang.
- 2) Pengembangan sarana dan prasarana wilayah.
- 3) Pencapaian proporsi lahan untuk kawasan lindung, baik kawasan hutan sebesar 30%.
- 4) Mempertahankan kawasan resapan air dan kawasan berfungsi hidrogeologis.

3.6. Pemerintahan, Hukum dan Politik

3.6.1. Pemerintahan

a. Peluang

- 1) Menguatnya tuntutan akan demokratisasi dan *good government*.
- 2) Tersusunnya laporan kinerja setiap SKPD.
- 3) Semakin kuatnya *civil society*.
- 4) Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.
- 5) Kerjasama antar daerah pemerintah Kabupaten Banjar dengan pemerintah daerah dan pihak lainnya.

b. Tantangan

- 1) Besarnya tuntutan masyarakat terhadap fungsi pelayanan pemerintah.
- 2) Menciptakan aparatur yang bersih, berwibawa dan bebas KKN.
- 3) Dinamisnya aspirasi masyarakat.
- 4) Semakin tingginya kompetisi dengan daerah lain.
- 5) Semakin kuatnya pengaruh globalisasi.
- 6) Peningkatan kualitas aparatur dalam penanganan kerjasama.

c. Isu Strategis

- 1) Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas dalam mewujudkan pelayanan yang prima.
- 2) Optimalisasi kapasitas aparatur daerah sebagai aparatur yang bersih, berwibawa dan bebas KKN.
- 3) Dibutuhkannya aparat yang memiliki kompetensi dan budaya kerja sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat, merespon isu-isu terkait globalisasi dan *civil society*.

3.6.2. Hukum

a. Peluang

- 1) Kebijakan penegakan hukum yang kuat
- 2) Nilai sosial budaya masyarakat yang diakomodasi oleh Peraturan Daerah .
- 3) Perencanaan Perundang-undangan Daerah.

b. Tantangan

- 1) Implementasi dari peneguhan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
- 2) Penegakan Hukum dan Perundang-undangan Daerah.

c. Isu Strategis

Penanaman pola hidup patuh hukum mendukung terwujudnya aparatur yang bersih, bebas KKN dan masyarakat yang adil dan responsife terhadap hukum.

3.6.3. Politik

a. Peluang

- 1) Banyaknya lembaga penyalur aspirasi memudahkan masyarakat dalam menentukan lembaga penyalur aspirasi yang sesuai dengan kehendak masyarakat.
- 2) Berkembangnya lembaga pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Banjar.
- 3) Penyelenggaraan Sosialisasi berkaitan pemilu/ pemilukada.
- 4) Tingkat pengaduan penyelenggaraan pemilu /pemilukada relatif rendah.

b. Tantangan

- 1) Terwujudnya & terpeliharanya kondisi politik yg dinamis, aman dan damai.
- 2) Upaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
- 3) relarif kurangnya sarana dan prasaran pemilu.

c. Isu Strategis

- 1) Mewujudkan sinergi antar pelaku politik.
- 2) Penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan advokasi kebijakan publik.
- 3) Penguatan peran partai politik.
- 4) Peningkatan kesadaran politik masyarakat.

BAB 4

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Gambaran pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta capaian kinerja guna mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pembaharuan subyek pengelolaan anggaran yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah dikedepankannya asas transparansi, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, baik dari segi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Fokus dari pembaharuan tersebut bermakna untuk mempertajam esensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam pengelolaan keuangan publik. Pembaharuan tersebut berpengaruh terhadap prinsip pengelolaan, mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pendapatan daerah dan belanja daerah Kabupaten Banjar adalah komponen pembentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Banjar, yaitu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang penganggarannya dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Banjar dengan DPRD Kabupaten Banjar untuk setiap tahun anggaran, dan pengesahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didalamnya (Pasal 157) menguraikan bahwa komponen-komponen pembentuk APBD terdiri dari :

1. Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
2. Bagian Dana Perimbangan yang terdiri dari dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Sedangkan Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung, yang dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
2. Belanja Langsung, yang dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Beberapa kriteria umum yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

1. Pendapatan daerah adalah batas maksimal yang harus dicapai oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan, sedangkan penetapan target pendapatan harus didasarkan pada data potensi yang akurat dengan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.
2. Belanja adalah batas maksimal yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung terlaksananya program-program pembangunan
3. Pembiayaan adalah partisipasi pemerintah daerah dalam investasi di daerah yang bersifat produktif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik dan kontribusi pendapatan asli daerah serta untuk menutup defisit.

4.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam hal perolehan pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banjar menggiatkan berbagai langkah dalam rangka perolehan pendapatan yang makin tinggi. Perolehan yang ingin dicapai tentu saja dengan tetap memerhatikan kondisi perkembangan ekonomi di masyarakat, yang lebih diarahkan untuk semakin memperkuat ekonomi daerah tanpa menambah beban bagi kegiatan perekonomian di masyarakat. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banjar menggiatkan upaya mencari sumber-sumber dana pembangunan yang berasal dari APBN dan Provinsi. Diharapkan dengan menggiatkan upaya ini akan semakin meningkatkan alokasi dana yang diberikan ke Kabupaten Banjar, selain itu pula diharapkan akan semakin banyak proyek-proyek yang dibiayai pemerintah

pusat dan provinsi dilaksanakan di Kabupaten Banjar yang akan semakin memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat dan infrastruktur daerah.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan, selama periode 2005 - 2010 menempati proporsi yang paling besar terhadap daerah, yakni rata-rata sebesar 84,53 %, sedangkan sumber pendapatan utama daerah yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan proporsi dibawah 8,33 % dari total pendapatan daerah.

Kontribusi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang, yang perlu disikapi dengan usaha keras, agar komposisi perimbangan peran PAD dan pendapatan dari pemerintah pusat mencapai titik keseimbangan (equilibrium).

Tabel 4.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2010 (Rp. Juta)

Tahun	Komponen Pendapatan			Total Pendapatan
	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	
2005	13.890,02	277.122,81	10.644,80	301.657,64
2006	38.903,77	399.622,80	28.722,12	467.248,68
2007	44.263,39	461.362,40	28.515,97	534.141,76
2008	34.563,54	560.209,18	47.955,92	642.728,64
2009	37.364,16	621.701,11	76.956,59	736.021,86
2010	36.858,28	558.489,24	119.423,38	714.770,89

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013

Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama dari PAD dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi. Namun demikian dalam pelaksanaannya tentu saja selalu memperhitungkan kondisi ekonomi lokal dan nasional. Hal ini dimaksudkan agar

upaya peningkatan perolehan PAD tidak akan memacu tingkat inflasi serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat. Sehingga diharapkan peningkatan perolehan PAD merupakan dampak dari semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di masyarakat dan merupakan suatu sinergitas dengan peningkatan ekonomi lokal dan nasional. Peningkatan PAD terutama yang berasal dari pajak dibarengi dengan upaya untuk semakin memproteksi lingkungan dan penciptaan keadilan di dalam masyarakat. Peningkatan retribusi daerah dibarengi dengan upaya peningkatan mutu pelayanan yang diberikan.

Secara lebih rinci, berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah, diarahkan pada:

1. Mengembangkan/meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan penggalian sumber-sumber PAD baru dengan tidak memberatkan masyarakat (retribusi parkir, terminal, galian C dan lain-lain) serta mengupayakan pengembangan peran sumbangan dari pihak ke tiga.
2. Meningkatkan pelayanan Perpajakan dan Retribusi Daerah dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mekanisme administrasi pelayanan.
3. Mendorong peran serta pihak ketiga sebagai sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
4. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat meningkatkan dan menghasilkan penerimaan PAD.

5. Memobilisir potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata.
6. Meningkatkan kinerja perusahaan daerah terutama kinerja keuangannya, sebagai sumber PAD dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Meskipun dalam kondisi serba keterbatasan, termasuk keterbatasan pendapatan daerah yang tercermin dalam APBD, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya serta upaya melaksanakan pembangunan daerah di semua aspek kehidupan masih tetap terjaga. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, keamanan dan ketertiban, dan lain-lain), mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar untuk semakin mengupayakan peningkatan pendapatan daerah dengan memberikan penekanan yang semakin besar pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa hasil dari komponen PAD sepenuhnya dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah membiayai pelayanan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ditetapkan daerah. Kebijakan memacu peningkatan PAD mencerminkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru dan mengintensifkan pemungutan sumber-sumber yang sudah ada. Peluang itu terbuka luas bagi daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan pelayanan masyarakat dan pembiayaan pembangunan daerah untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Banjar, maka kedepan Pemerintah Kabupaten Banjar wajib berupaya menggali segala potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru untuk terus dikembangkan. Upaya peningkatan dimaksud dilaksanakan melalui kebijakan revitalisasi pemungutan dari sumber/potensi pendapatan yang sudah ada, penciptaan sumber/potensi baru, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah. Dengan langkah tersebut yang disertai dengan kerja keras seluruh aparat, bukan tidak mungkin sasaran tersebut dapat dicapai.

Berbagai cara dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk memanfaatkan peluang dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dan pada gilirannya akan menjadi upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah, termasuk peningkatan kinerja/penyehatan Badan Usaha Milik Daerah, seperti PDAM Kabupaten Banjar, PD Baramarta, dan PT. Banjar Intan Mandiri, atau kemungkinan pembentukan BUMD lainnya serta dari sumber-sumber PAD lainnya yang sah.

Berdasarkan proyeksi indikator makro ekonomi pada pembahasan Bab terdahulu dan realisasi pendapatan daerah selama lima tahun terakhir, maka proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Banjar dalam lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 (Rp. Juta)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pendapatan Asli Daerah	96.413,69	147.228,98	165.519,36	174.664,55	183.809,74
2	Dana Perimbangan	679.227,25	869.312,88	793.934,84	819.292,54	879.533,62
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	173.250,77	215.288,56	192.242,10	196.000,00	216.595,02
	Total	948.891,71	1.231.830,42	1.151.696,30	1.189.957,09	1.279.938,38

Sumber: Hasil Analisis Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2013.

Berdasarkan tabel 4.2. diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan PAD disesuaikan dengan perkembangan realisasi hingga tahun 2012 yang telah menembus nilai nominal hampir 150 milyar rupiah. Perkiraan pertumbuhan PAD setiap tahun tersebut diperoleh dari perkiraan pertumbuhan masing-masing bagian dari PAD, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah masing-masing ditargetkan dengan kecendrungan meningkat yang mampu semakin memperkuat kemampuan keuangan daerah. Perkiraan pertumbuhan masing-masing bagian dari Dana Perimbangan, yaitu Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dana Perimbangan dari Bagi Hasil yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada Pemerintah Pusat. Sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat erat kaitannya dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Secara komulatif pendapatan daerah telah mampu mencapai nilai nominal diatas 1 trilyun rupiah pada tahun 2012, dan terus ditargetkan meningkat hingga tahun 2015 akhir dari periode rencana pembangunan jangka menengah ini.

4.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan pendapatan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dengan memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan. Belanja daerah menurut kelompok belanja, terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, dimana kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 4.3. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009

No	Tahun	Belanja Aparatur/Belanja Tidak Langsung			Belanja Pelayanan Publik/Belanja Langsung			Jumlah		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2005	175,933,672,925.00	166,847,481,856.00	94.84%	115,785,358,955.00	104,684,672,423.00	90.41%	291,719,031,880.00	271,532,154,279.00	93.08%
2	2006	222,256,765,532.00	204,489,621,921.60	92.01%	265,501,071,531.92	203,723,296,816.57	76.73%	487,757,837,063.92	408,212,918,738.17	83.69%
3	2007	269,336,798,986.00	249,858,382,915.00	92.77%	337,189,307,290.00	287,541,906,305.00	85.28%	606,526,106,276.00	537,400,289,220.00	88.60%
4	2008	332,623,083,459.00	327,018,155,427.00	98.31%	371,193,399,212.00	317,956,769,928.78	85.66%	703,816,482,671.00	644,974,925,355.78	91.64%
5	2009	379,237,139,382.00	367,325,673,516.00	96.86%	433,563,617,480.00	396,950,135,509.00	91.56%	812,800,756,862.00	764,275,809,025.00	94.03%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013.

Pada tabel 4.3 diatas, realisasi belanja daerah Kabupaten Banjar pada tahun 2005, 2006 dan tahun 2008 lebih banyak dikontribusikan untuk belanja aparatur/ belanja tidak langsung, sedangkan pada tahun 2007 dan 2009 lebih banyak dikontribusikan untuk belanja pelayanan publik/belanja langsung.

Pada Tahun Anggaran 2005, jumlah belanja (belanja aparatur/belanja tidak langsung dan belanja pelayanan publik/ belanjalangsung) ditargetkan sebesar Rp. 291,719,031,880,- dan terealisasi sebesar Rp.271,532,154,279,- atau 93,08%, pada Tahun Anggaran 2006 jumlah belanja terealisasi sebesar Rp.408,212,918,738.17 dari yang ditargetkan sebesar Rp.487,757,837,063.92 atau 83,69%. Tahun Anggaran 2007, jumlah belanja ditargetkan sebesar Rp.606,526,106,276,-dan terealisasi sebesar Rp.537,400,289,220,-atau 88,60%. Pada Tahun Anggaran 2008, jumlah belanja yang dapat direalisasikan sebesar Rp.644,974,925,355,- dari target sebesar Rp.703,816,482,671 atau 91,64%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2009, jumlah belanja terealisasi sebesar Rp.764,275,809,025,- dari Rp. 812,800,756,862,- yang ditargetkan atau 94,03%.

Pada perkembangan Tahun Anggaran 2012, realisasi belanja daerah hampir mencapai nominal 1 trilyun rupiah, atau tepatnya Rp.994.554.783.483,95 ,-. Hal ini memberikan satu kesimpulan bahwa percepatan pembangunan daerah guna mencapai visi misi pembangunan daerah berjalan dengan baik. Pencapaian realisasi ini berada jauh dari yang telah diperkirakan pada asumsi awal dengan target hanya 912 milyar rupiah lebih pada perkiraan penyusunan tahun 2011, sebagaimana yang termuat dalam dokumen awal rpjmd.

Berdasarkan pada perkembangan tersebut, perkiraan belanja daerah hingga tahun 2015 yang akan datang diperkirakan sebagaimana yang termuat pada tabel berikut, tentang proyeksi belanja daerah Kabupaten Banjar tahun 2011 – 2015, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.4 .

Tabel 4.4 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 (Rp. Juta)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Belanja Tidak Langsung	509.144,00	554.896,89	596.074,49	623.950,33	646.402,67
2.	Belanja Langsung	335.589,87	439.647,89	600.06.138	621.522,71	647.763,93
Total		844.733,87	994.544.78	1.196.724,27	1.245.473,04	1.294.166,60

Sumber: Hasil Analisis Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2013.

4.3 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan daerah. Secara keseluruhan dalam perjalanan hingga tahun 2012 dan semester pertama penyelenggaraan tahun 2013, kemampuan pembiayaan daerah dapat dikendalikan dengan baik, dengan memperhatikan keterkaitan antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Daerah, bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran Daerah, dianggarkan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran hutang pokok dan pemberian pinjaman daerah.

Untuk proyeksi APBD tahun 20011 – 2015 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

**Tabel 4.5. Proyeksi Pebiayaan Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015
(Rp. Juta)**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Pendapatan Daerah					
1. Pendapatan Asli Daerah	96.413,69	147.228,98	165.519,36	174.664,55	183.809,74
2. Dana Perimbangan	679.227,25	869.312,88	793.934,84	819.292,54	879.553,62
3. Lain2 Pendapatan Yang Sah	173.250,77	215.288,56	192.242,10	196.000,00	215.595,02
JUMLAH	948.891,71	1.231.830,42	1.151.696,30	1.189.957,09	1.279.938,38
Belanja Daerah					
1. Belanja Tidak Langsung	509.144,00	554.896,89	596.074,49	623.950,33	646.402,67
2. Belanja Langsung	335.589,87	439.647,89	600.06.138	621.522,71	647.763,93
JUMLAH	844.733,87	994.544,78	1.196.724,27	1.245.473,04	1.294.166,60
Surplus/Defisit	104.157,84	237.285,64	(45.027,97)	(22.674,82)	(14.228,22)
Pembiayaan Daerah					
1. Penerimaan Pembiayaan	8.094,60	98.461,30	315.004,05	99.458,32	55.458,32
2. Pengeluaran Pembiayaan	7.941,25	20.742,89	8.000,00	44.000,00	25.000,00
Pembiayaan Netto	153,35	77.718,41	281.004,05	55,458,32	30.458,32

Sumber: Hasil Analisis Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2013.

BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Dasar Filosofi

Hal yang menjadi dasar filosofi Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar adalah, Baiman Bauntung Batuah, yang menjadi nilai luhur untuk diimplementasikan kedalam tata nilai kehidupan budaya masyarakat. Kalimat tersebut berarti Membangun daerah dalam suasana kehidupan yang relegius Islami sebagai perwujudan Martapura Kota Serambi Mekah; Mewujudkan kesejahteraan rakyat di segala bidang dan dengan senantiasa mengharapkan berkah dan ridho Allah S.W.T.

RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011 - 2015 secara substansi tidak terlepas dari motto daerah untuk mencerminkan tekad dan semangat yang tinggi dari masyarakat Kabupaten Banjar dalam ikut serta dan berperan aktif melanjutkan dan meningkatkan pembangunan daerah Banjar dengan tetap dilandasi Iman dan Takwa, semangat Kekeluargaan dan Kegotong-royongan.

Tekad dan semangat yang tinggi tersebut tercermin dalam lambang daerah Kabupaten Banjar dengan motto : BARAKAT, yang maknanya adalah :

- BARAKAT = dalam arti kata BERKAH
- BARAKAT = singkatan dari BARKAT MUFAKAT (RAKAT MUFAKAT)
- BARAKAT = singkatan dan kepanjangan BARATAAN RAKYAT RAKAT
- BARAKAT = singkatan dan kepanjangan BERKAL ALLAH, RASUK ATAS KARYA, AHLAK DAN TAKWA.

5.2 Visi

Visi Kabupaten Banjar adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera, Mandiri, dan Islami”, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Sejahtera;** Sejahtera dalam pengertian ini adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.
- 2. Mandiri;** Mandiri yang dimaksud adalah kemampuan dan ketahanan masyarakat untuk memenuhi setiap aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya.
- 3. Islami;** adalah bersifat keislaman (akhlak), untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat madani.
- 4. Sejahtera; Mandiri Dalam Nuansa Kehidupan Islami,** mengandung arti kehidupan masyarakat Kabupaten Banjar yang terpenuhi kehidupan material dan spiritual dan berbudaya serta terwujudnya masyarakat madani **“Negeri yang baik dan diampuni Tuhan”** atau **“Baldatun thoyibatun warabbun ghafuur”**.

5.3 Misi

1. Memantapkan suasana kehidupan masyarakat yang madani.
2. Memantapkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia.
3. Memantapkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan mendorong iklim investasi.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
5. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan prima.

5.4 Tujuan dan Sasaran

Misi Kesatu: Memantapkan suasana kehidupan yang madani.

Tujuan:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat.
- 2) Menerapkan nilai-nilai kehidupan beragama dalam aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sasaran:

- 1) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang madani.
- 2) Terwujudnya penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Misi Kedua: Memantapkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlaq mulia.

Tujuan:

- 1) Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan dan berkualitas.
- 2) Mewujudkan masyarakat yang sehat.
- 3) Meningkatkan kemampuan kepemudaan, prestasi olahraga dan pelestarian seni budaya.
- 4) Mewujudkan manajemen pembangunan SDM berkualitas.

Sasaran:

- 1) Terwujudnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan.
- 2) Terwujudnya peningkatan sarana prasarana dan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat.
- 3) Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat.
- 4) Terwujudnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar serta rujukan bagi masyarakat.
- 5) Terwujudnya peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
- 6) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat.
- 7) Terwujudnya peningkatan pengawasan komoditas produk pangan dan obat.
- 8) Terwujudnya pengembangan kebijakan manajemen kesehatan.
- 9) Terwujudnya keluarga berencana yang mandiri dan sejahtera.
- 10) Terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga.
- 11) Terwujudnya pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya.
- 12) Terwujudnya manajemen penyelenggaraan pembangunan SDM yang berkualitas.

Misi Ketiga: Memantapkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan mendorong iklim investasi.

Tujuan :

- 1) Mewujudkan masyarakat yang berkompetensi kerja dan berdaya saing.
- 2) Mewujudkan stabilitas perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan.
- 3) Menciptakan iklim investasi yang sehat untuk memperluas lapangan kerja.

Sasaran :

- 1) Terwujudnya usaha perekonomian masyarakat yang berdaya saing tinggi.
- 2) Terwujudnya ketersediaan energi untuk masyarakat dan pengembangan energi terbarukan.
- 3) Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat
- 4) Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif.
- 5) Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.
- 6) Pengembangan daya tarik kepariwisataan.
- 7) Perluasan kesempatan kerja, produktivitas dan perlindungan ketenagakerjaan dan pengembangan wilayah transmigrasi.
- 8) Terwujudnya ketersediaan infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas.

Misi Keempat: Meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

Tujuan :

- 1) Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan dan air limbah yang berwawasan lingkungan.

- 2) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sasaran :

- 1) Terwujudnya pembangunan daerah berwawasan lingkungan.
- 2) Terwujudnya pengelolaan persampahan dan air
- 3) Terwujudnya perlindungan, pemanfaatan dan rehabilitasi sumber daya lahan dan hutan.
- 4) Terwujudnya pengelolaan perikanan dan kelautan yang berorientasi aquabisnis yang ramah lingkungan.
- 5) Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan

Misi Kelima: Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan prima.

Tujuan :

- 1) Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik.
- 2) Mengoptimalkan Pelayanan publik.
- 3) Meningkatkan Kualitas pelayanan publik.

Sasaran :

- 1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif akuntabel dan transparan.
- 2) Terwujudnya kapasitas kelembagaan & pemerintah serta pegawai daerah yang efisien.

- 3) Meningkatnya pembinaan dan kesadaran hukum di daerah.
- 4) Terwujudnya mekanisme pengawasan dan penyerapan aspirasi publik yang baik.
- 5) Terwujudnya pelayanan publik terintegrasi yang mudah dan cepat.
- 6) Terwujudnya Penataan Kependudukan yang tepat dan efektif.
- 7) Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah.
- 8) Terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana.
- 9) Terwujudnya ketertiban dan keamanan yang kondusif.
- 10) Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
- 11) Terwujudnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi.
- 12) Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 13) Terwujudnya Struktur Organisasi Pemerintah Daerah yang efisien.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 6

SASARAN DAN STRATEGI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi Umum

Upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan menuju Kabupaten Banjar Yang Sejahtera, Mandiri, dan Islami diperlukan perubahan yang mendasar, terencana, dan terukur.

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui Strategi dan Arah Kebijakan.

Strategi umum yang akan dilaksanakan Kabupaten Banjar tahun 2011-2015, antara lain:

1. Strategi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan.
2. Strategi peningkatan efektivitas kualitas belanja pemerintah daerah.
3. Strategi penguatan peran dan kapasitas aparatur dan kelembagaan daerah.
4. Strategi penguatan sinergitas dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Penjelasan keempat strategi di atas, sebagai berikut:

(1) Strategi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan.

Dalam rangka memperoleh hasil pembangunan yang lebih optimal perlu diwujudkan dengan menerapkan percepatan pembangunan melalui pusat-pusat pertumbuhan. Disamping hal tersebut diatas dalam rangka lebih memacu perkembangan pembangunan daerah dilakukan dengan membuka daerah-daerah yang dianggap terbelakang dari sisi penyediaan fasilitas umum sehingga dapat dicapai keselarasan dan pemerataan bagi masyarakat secara menyeluruh.

(2) Strategi peningkatan efektivitas kualitas belanja pemerintah daerah.

Mengingat besarnya keperluan anggaran daerah sangat diperlukan ketepatan alokasi anggaran dalam rangka memaksimalkan capaian hasil yang diinginkan sesuai dengan target dan sasaran pembangunan. Permasalahan yang terjadi adalah masih kurangnya kemampuan untuk memaduserasikan antara capaian terhadap sasaran yang diinginkan dengan keperluan pendanaan.

(3) Strategi penguatan peran dan kapasitas aparatur dan kelembagaan daerah.

Strategi penguatan peran dan kapasitas kelembagaan aparatur ini dimaksudkan lebih menggiatkan lagi kemampuan jajaran pemerintahan dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa guna lebih maksimal dalam

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dengan metode pelaksanaan kewenangan sesuai dengan jenjang pemerintahan yang ada dengan lebih memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan.

(4) Strategi penguatan sinergitas dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Mengingat besarnya keperluan pendanaan dan diperlukannya sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah dengan pemerintah di tingkat atas, oleh karenanya sangat diperlukan kesamaan pemahaman dan informasi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Guna lebih mendukung percepatan pencapaian target pembangunan sangat diperlukan suatu kerja sama dan sinergitas antara Pemerintrah Daerah Kabupaten Banjar dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat termasuk dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

6.2. Strategi Pencapaian Misi

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan tersebut melalui strategi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Misi Kesatu: *Memantapkan suasana kehidupan yang madani.*

Sasaran:

- 1) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang madani.

- 2) Terwujudnya penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Strategi :

- 1) Pengembangan kehidupan beragama masyarakat.
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana ibadah.
- 3) Menumbuhkembangkan pemanfaatan kebudayaan daerah dan apresiasi seni budaya yang bernuansa agamis
- 4) Mewujudkankan suasana tertib, nyaman dan harmonis yang menunjang aktivitas keagamaan.

Misi Kedua: *Memantapkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlaq mulia.*

Sasaran:

- 1) Terwujudnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan.
- 2) Terwujudnya peningkatan sarana prasarana dan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat.
- 3) Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat.
- 4) Terwujudnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar kesehatan serta rujukan bagi masyarakat.
- 5) Terwujudnya peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
- 6) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat.

- 7) Terwujudnya peningkatan pengawasan komoditas produk pangan dan obat.
- 8) Terwujudnya pengembangan kebijakan manajemen kesehatan.
- 9) Terwujudnya Keluarga Berencana yang mandiri dan sejahtera
- 10) Terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga.
- 11) Terwujudnya pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya.
- 12) Terwujudnya manajemen penyelenggaraan pembangunan SDM yang berkualitas.
- 13) Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat.

Strategi :

- 1) Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional.
- 2) Peningkatan kuantitas serta kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- 3) Pemantapan pola pemberian subsidi pendidikan
- 4) Pemenuhan sarana prasarana pendidikan.
- 5) Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.
- 6) Peningkatan mutu kesehatan masyarakat.
- 7) Peningkatan infrastruktur kesehatan.
- 8) Mendorong budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PBHS).
- 9) Pengurangan risiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana.
- 10) Peningkatan Upaya Sertifikasi Pengolahan komoditas produk pangan dan obat-obatan.
- 11) Peningkatan kualitas Manajemen Kesehatan.

- 12) Peningkatan Kualitas kehidupan keluarga, perempuan dan anak.
- 13) Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga.
- 14) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya.
- 15) Sinergi penyelenggaraan pembangunan bidang sosial budaya antar pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta.

Misi Ketiga: *Memantapkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan mendorong iklim investasi.*

Sasaran :

- 1) Terwujudnya usaha perekonomian masyarakat diberbagai sektor yang berdaya saing tinggi.
- 2) Terwujudnya ketersediaan energi dan pemerataan pelayanan kelistrikan untuk masyarakat.
- 3) Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.
- 4) Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif, adaptif dan iklim investasi yang kondusif.
- 5) Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.
- 6) Pengembangan daya tarik kepariwisataan.
- 7) Perluasan kesempatan kerja , produktivitas dan perlindungan ketenagakerjaan dan pengembangan wilayah transmigrasi.

- 8) Terwujudnya ketersediaan infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas maupun kualitas.

Strategi

- 1) Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil.
- 2) Peningkatan kualitas hasil olahan dan tata niaga atau pemasaran.
- 3) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur dan pemerataan pelayanan kelistrikan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat dan perempuan.
- 5) Revitalisasi pertanian.
- 6) Pengembangan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan.
- 7) Pengembangan eksplorasi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap daerah pesisir.
- 8) Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K).
- 9) Optimalisasi penyelenggaraan pembangunan kehutanan secara lestari melalui pemantapan perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan SDH serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
- 10) Peningkatan sumberdaya penyuluh melalui diklat fungsional dan teknis.
- 11) Penguatan permodalan usaha tani/ nelayan dan sarana produksi pertanian.
- 12) Pembangunan ekonomi perdesaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
- 13) Penciptaan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan investasi.

- 14) Memacu berkembangnya produk wisata (termasuk tempat wisata religius) disertai dengan memperluas jaringan promosi secara efisien dan efektif.
- 15) Perbaiki iklim ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- 16) Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana fasilitas pelayanan publik.
- 17) Pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah.
- 18) Revitalisasi sarana perhubungan.
- 19) Memperlancar jasa distribusi orang dan barang.

Misi Keempat: *Meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.*

Sasaran :

- 1) Terwujudnya pembangunan daerah berwawasan lingkungan.
- 2) Terwujudnya pengelolaan persampahan dan air
- 3) Terwujudnya perlindungan, pemanfaatan dan rehabilitasi sumberdaya lahan dan hutan.
- 4) Terwujudnya pengelolaan perikanan dan kelautan yang berorientasi aquabisnis yang ramah lingkungan.
- 5) Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.

Strategi :

- 1) Perbaiki Kualitas lingkungan hidup terutama pencemaran air dan udara secara berkelanjutan.

- 2) Penanganan pengelolaan persampahan dan penanganan air limbah dengan memerhatikan aspek lingkungan.
- 3) Konservasi sumber daya lahan dan hutan.
- 4) Penegakan hukum perairan dan kelautan.
- 5) Pengawasan terhadap pengusaha pertambangan tak berijin.

Misi Kelima: *Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan prima.*

Sasaran :

- 1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif akuntabel dan transparan.
- 2) Terwujudnya kapasitas kelembagaan & pemerintah serta pegawai daerah yang efisien.
- 3) Meningkatnya pembinaan dan kesadaran hukum di daerah.
- 4) Terwujudnya peningkatan kualitas perempuan, peranserta dan kesetaraan gender.
- 5) Terwujudnya mekanisme pengawasan dan penyerapan aspirasi publik yang baik.
- 6) Terwujudnya pelayanan publik terintegrasi yang mudah dan cepat.
- 7) Terwujudnya penataan kependudukan yang tepat dan efektif.
- 8) Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah.
- 9) Terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana.
- 10) Terwujudnya ketertiban dan keamanan yang kondusif.
- 11) Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
- 12) Terwujudnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi.

- 13) Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 14) Terwujudnya Struktur Organisasi Pemerintah Daerah yang efisien.

Strategi :

- 1) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah.
- 2) Memantapkan dan mengembangkan penerapan E-Gov (DGS)
- 3) Peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan hingga tingkat desa
- 4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- 5) Peningkatan kapasitas dan kompetensi PNS.
- 6) Pelayanan perijinan yang tepat waktu.
- 7) Pembentukan produk hukum yang semakin aspiratif dan desa sadar hukum.
- 8) Tertib administrasi kependudukan yang reliabel.
- 9) Peningkatan kualitas kehidupan dan peran serta perempuan dan kesetaraan gender.
- 10) Pembangunan daerah sesuai RTRW.
- 11) Penanganan dan pengurangan resiko bencana.
- 12) Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 13) Peningkatan perlindungan perempuan disertai dengan peningkatan peran perempuan, keluarga berencana mandiri dan sejahtera .
- 14) Pemberdayaan masyarakat miskin dan peningkatan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- 15) Peningkatan dan pengembangan sarana / prasarana fasilitas pelayanan publik.
- 16) Pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 7

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Kebijakan Umum

Kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Banjar periode tahun 2011-2015 dijadikan dasar untuk mengarahkan dan memperkuat visi, misi pembangunan yang akan dijabarkan ke dalam RKPD setiap tahun, diuraikan dalam mewujudkan setiap misi pembangunan, sebagai berikut:

1. Memantapkan suasana kehidupan yang madani.
2. Memantapkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia.
3. Memantapkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan mendorong iklim investasi.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
5. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan prima.

Misi Kesatu : *Memantapkan suasana kehidupan yang madani.*

Arah Kebijakan:

- 1) Peningkatan nuansa beragama dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Bantuan langsung sarana prasarana, kelembagaan, kemasyarakatan dan kegiatan sosial keagamaan.

- 3) Pengembangan rasa cinta terhadap seni dan budaya daerah yang bernuansa agamis.
- 4) Meningkatkan upaya pembinaan kehidupan beragama yang harmonis.

Misi Kedua : *Memantapkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia.*

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan manajemen mutu lembaga pendidikan secara merata.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikasi.
3. Memantapkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan.
5. Mengembangkan kualitas dan kuantitas layanan, SDM kepastakaan dan sarana prasarana perpustakaan.
6. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.
7. Meningkatkan mutu pelayanan serta informasi kesehatan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
8. Mengoptimalkan upaya kesehatan masyarakat
9. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
10. Mengoptimalkan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya ke arah kesehatan mandiri.
11. Meningkatkan pencegahan , penanggulangan penyakit dan pengembangan lingkungan sehat.

12. Meningkatkan pengawasan obat dan perbekalan kesehatan.
13. Mengembangkan sistem surveilans, sistem informasi, manajemen dan administrasi kesehatan.
14. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
15. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan di semua sektor.
16. Mendorong peningkatan kegiatan olahraga andalan daerah serta peningkatan sarana dan prasarananya
17. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan.
18. Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan kawasan budaya dan benda cagar budaya.
19. Meningkatkan perlindungan dan mendukung upaya penghargaan dan hak atas hasil karya budaya lokal.
20. Koordinasi Perencanaan Penyelenggaraan pembangunan bidang sosial dan budaya.

Misi Ketiga : *Memantapkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan mendorong iklim investasi.*

Arah Kebijakan:

- 1) Meningkatkan fasilitasi terhadap pengembangan usaha ekonomi kerakyatan.
- 2) Memfasilitasi model pelatihan dan dukungan modal kepada masyarakat.
- 3) Mengembangkan sentra-sentra usaha dan industri mikro, kecil dan menengah.
- 4) Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan produk lokal.

- 5) Memberdayakan dan meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat.
- 6) Menkuatkan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin berkembangnya aktivitas usaha khususnya ekonomi kreatif
- 7) Mengembangkan sarana pelayanan kelistrikan yang semakin merata.
- 8) Meningkatkan ekonomi kerakyatan.
- 9) Pembangunan Perdesaan.
- 10) Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif bagi perempuan.
- 11) Mengembangkan ekonomi lokal daerah (PELD/REDS)
- 12) Meningkatkan peran masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian.
- 13) Membuka jejaring dan kemitraan untuk meningkatkan distribusi dan pemasaran hasil perkebunan.
- 14) Meningkatkan sumberdaya ternak
- 15) Menkuatkan peran serta pemerintah dalam pengaturan, pembinaan dan penguatan modal masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian.
- 16) Menyiapkan, Mempertahankan lahan abadi dalam rangka ketahanan pangan dan konservasi sumberdaya air.
- 17) Mengembangkan ketahanan pangan dan agribisnis pertanian guna mewujudkan kedaulatan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dalam jumlah yang memadai, tersedia di setiap waktu, beragam, bergizi seimbang, bermutu, aman, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- 18) Meningkatkan pengembangan wilayah minapolitan dan perikanan budidaya.
- 19) Meningkatkan tata niaga produk perikanan.

- 20) Mengembangkan perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
- 21) Meningkatkan peran sumberdaya pesisir.
- 22) Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan hasil hutan.
- 23) Memanfaatkan lahan hutan dan kebun secara optimal dengan menanam jenis produk unggulan serta melibatkan peran aktif masyarakat
- 24) Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petani melalui kegiatan Satu Desa Satu Penyuluh (*one man one village*).
- 25) Optimalisasi peran BPP dalam pembinaan kelompok petani/ nelayan.
- 26) Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.
- 27) Menyediakan aturan hukum yang mendukung terciptanya iklim usaha.
- 28) Meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi melalui promosi kemudahan prosedur dan fasilitas pendukung.
- 29) Memperbaiki pola kerjasama dan kemitraan pemerintah, dan antar pemerintah daerah.
- 30) Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak.
- 31) Pengembangan pemasaran dan destinasi wisata.
- 32) Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan ketenagakerjaan dan masyarakat secara luas.
- 33) Membangun tata kelola hubungan kerja antara pemerintah, pengusaha dan pekerja yang lebih saling menguntungkan dan manusiawi.

- 34) Meningkatkan penyelenggaraan transmigrasi yang menjamin keberhasilan usaha dan perbaikan ekonomi guna pengembangan ekonomi wilayah.
- 35) Meningkatkan partisipasi masyarakat/ swasta dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur ekonomi.
- 36) Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan.

Misi Keempat : *Meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.*

Arah Kebijakan :

- 1) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- 2) Menata kembali dan mengembangkan hutan taman kota.
- 3) Penanganan pengelolaan persampahan dengan menggunakan sistem *sanitary landfill*
- 4) Peningkatan mutu air sesuai baku mutu lingkungan melalui penggunaan teknologi pengolahan air.
- 5) Memantapkan pengelolaan hutan secara lestari & mengembangkan kehutanan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat.
- 6) Peningkatan pengawasan dan pengendalian masyarakat dan aparaturnya terhadap sumberdaya perairan kelautan.
- 7) Mengembangkan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang ramah lingkungan.

Misi Kelima: *Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih.*

Arah Kebijakan:

- 1) Menjalin jejaring yang lebih efektif secara teknis antar lembaga pemerintah.
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelayanan berbasis Digital Government Services (DGS) pada semua sektor pemerintah daerah.
- 3) Pemantapan otonomi desa.
- 4) Meningkatkan kapasitas kebijakan publik yang proporsional dengan melibatkan peranserta swasta, perguruan tinggi dan partisipasi masyarakat.
- 5) Meningkatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik, fungsi kontrol, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- 6) Implementasi Struktur Organisasi yang efektif dan efisien.
- 7) Penerapan Peraturan daerah secara efektif dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum.
- 8) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan disemua sektor.
- 9) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan melekat terhadap hasil pembangunan dan perbaikan regulasi.
- 10) Penerapan ISO-9000 dalam pelayanan perijinan.
- 11) Meningkatkan pembangunan pelayanan publik secara lebih merata di seluruh wilayah.
- 12) Penerapan e-KTP, KK dan Akta kelahiran.
- 13) Mengoptimalkan peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

- 14) Mengimplementasikan manajemen penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana.
- 15) Peningkatan status sosial masyarakat miskin dan penyandang PMKS melalui penyediaan sarana prasarana dan diklat.
- 16) Meningkatkan kualitas SDM, kesejahteraan dan peran aktif para pengabdian kesejahteraan sosial.

7.2 Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Misi Pembangunan

7.2.1 Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Misi Pertama

Dalam upaya mewujudkan Misi Kesatu maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- *Urusan Pemerintahan Umum* , Beberapa program dan kegiatan pada *Belanja Tidak Langsung* dalam bentuk *Bantuan Sosial*, dengan program-program sebagai berikut :
 1. Program Bantuan kegiatan Majelis Taqlim..
 2. Program Bantuan Sosial keagamaan.
 3. Program bantuan kesehatan Ulama dan Tokoh Masyarakat.
 4. Program Pembinaan Mental Kerohanian PNS.
 5. Program Pemeliharaan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- *Urusan Budaya*, dengan Program sebagai berikut :
 1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

7.2.2 Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Misi Kedua

Dalam upaya mewujudkan Misi Kedua, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- *Urusan Pendidikan*, dengan program-program sebagai berikut :
 1. Program Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
 3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
 4. Program Pendidikan Menengah.
 5. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 6. Program Pendidikan Nonformal.
 7. Program Pendidikan Luar Biasa.
- *Urusan Perpustakaan*, dengan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- *Urusan Kesehatan*, dengan program-program sebagai berikut :
 1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 2. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.
 3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
 4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
 5. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
 6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut.

7. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas Pustu dan Jaringannya.
 8. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata.
 9. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata.
 10. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
 11. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
 13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
 14. Program Obat dan perbekalan Kesehatan.
 15. Program Pengawasan Obat dan Makanan.
 16. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia.
 17. Program Pengawasan dan pengendalian Kesehatan Makanan.
 18. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
- *Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera*, dengan program-program sebagai berikut :
1. Program Keluarga Berencana.
 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
 3. Program Pelayanan Kontrasepsi.
 4. Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.

5. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.
 6. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
 7. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/AIDS.
 8. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaantumbuh kembang anak.
 9. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.
 10. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu.
- *Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, dengan program-program sebagai berikut :
 1. Program keserasian kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak.
 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
 4. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan.
 - *Urusan Pemuda dan Olahraga*, dengan program-program sebagai berikut :
 1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.
 3. Program Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga.
 4. Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda.
 5. Program Peningkatan peran serta Kepemudaan.

6. Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.
 7. Program Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- *Urusan Kebudayaan*, dengan program-program sebagai berikut :
 1. Program Pengembangan Nilai Budaya.
 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
 4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.
 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan.
 - *Urusan Perencanaan Pembangunan*, dengan Program Perencanaan Sosial dan Budaya.

7.2.3 Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam upaya mewujudkan Misi Ketiga, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah :

- *Urusan Koperasi dan UMKM*, dengan program-program sebagai berikut :
 1. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro, Kecil yang Kondusif.
 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil.
 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil.
 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- *Urusan Perindustrian*, dengan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
 2. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.
 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
 4. Program Peningkatan kapasitas IPTEK sistem Produksi
 5. Program Penataan Struktur Industri.
- *Urusan Perdagangan*, dengan program-program sebagai berikut :
1. Program Peninmgkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.
 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
 3. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
 4. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan.
 5. Program Pembinaan Pedagang Kaki aLima dan Asongan.
- *Urusan Energi dan sumberdaya Mineral*, dengan program-program sebagai berikut :
1. Program pembinaan dan pengembangan bidang kelistrikan.
 2. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan.
- *Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*, dengan program-program sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaaan.
 2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
 3. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
 4. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan.

5. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan.
- *Urusan Pertanian*, dengan program-program sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.
 4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
 5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
 6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.
 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
 8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
 9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.
 10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
 11. Program Pengembangan agribisnis.
 12. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan (APBN)
- *Urusan Kelautan dan Perikanan*, dengan program-program sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
 2. Program Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.
 3. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
 4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
 5. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.
 6. Program Pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan.

7. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
 8. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam pendayagunaan Sumberdaya laut.
 9. Program Peningkatan Kegiatan Budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat.
 10. Program Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut.
- *Urusan Kehutanan*, dengan program-program sebagai berikut:
 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan.
 2. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.
 3. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.
 4. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri
 - *Urusan Perencanaan Pembangunan*, dengan program-program sebagai berikut:
 1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
 2. Program perencanaan prasarana wilayah dan Sumber daya Alam.
 3. Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar.
 4. Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
 - *Urusan Penanaman Modal*, dengan program-program sebagai berikut :
 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
 3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana daerah.

- *Urusan Pariwisata*, dengan program-program sebagai berikut :
 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
 3. Program Pengembangan Kemitraan.
- *Urusan Tenaga Kerja*, dengan program-program sebagai berikut :
 1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
 2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 3. Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- *Urusan Transmigrasi*, dengan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
 1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
 2. Program Trasmigrasi lokal.
- *Urusan Pekerjaan Umum*, dengan program-program sebagai berikut :
 1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan.
 2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 3. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
 4. Program pembangunan Turap/talud/ Bronjong.
 5. Program rehabilitasi / Pemeliharaan Turap/ talud dan Bronjong
 6. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan.
 7. Program tanggap darurat jalan dan jembatan.
 8. Program pembangunan Sistem Informasi/ data base jalan dan Jembatan
 9. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.

10. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, Danau dan Sumber daya Air lainnya.
 11. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
 12. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi Sungai, Danau dan sumberdaya lainnya.
 13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
 14. Program Pengendalian Banjir.
 15. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan wilayah cepat tumbuh.
 16. Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan.
 17. Program Pembangunan, Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan.
 18. Program Pengaturan Jasa Konstruksi.
 19. Program Pelayanan Jasa Pengujian.
 20. Program Pelayan Jasa Pengujian.
- *Urusan Perumahan*, dengan program-program sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Perumahan.
 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
 3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
 4. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/ sosial.
 5. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
 6. Program pengelolaan areal pemakaman.
 7. Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh.

- *Urusan Perhubungan*, dengan program-program sebagai berikut :
 1. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
 2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan.
 3. Program Peningkatan pelayanan angkutan.
 4. Programn Peningkatan manajemen dan rekayasa lalulintas.
 5. Program Peningkatan kalayakan pengoperasian kendaraan bermotor.
 6. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

7.2.4. Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Misi Keempat

Dalam upaya mewujudkan Misi Keempat, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- *Urusan Lingkungan Hidup*, dengan program-program sebagai berikut :
 1. Progam pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)
 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.
 4. Program rehabilitasi dan cadangan sumber daya alam
 5. Program peningkatan pengendalian polusi.
 6. Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
 7. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
- *Urusan Perencanaan Pembangunan*, dengan Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

- *Urusan Kehutanan*, dengan program-program sebagai berikut :
 1. Program rehabilitasi hutan dan lahan.
 2. Program Perlindungan konservasi sumber daya hutan.
- *Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral*, dengan program-program sebagai berikut: Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.

7.2.5 Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Misi Kelima

Dalam upaya mewujudkan Misi Kelima, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- *Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi keuangan* dengan program-program sebagai berikut :
 1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
 2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
 5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
 6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
 7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
 9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
 10. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
 11. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah Daerah.
 12. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
 13. Program penataan daerah otonomi baru.
 14. Program Peningkatan Kapasitas & Penataan Kelembagaan Daerah
 15. Program Penunjang Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 16. Program Fasilitasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
- *Urusan Komunikasi dan Informatika*, dengan program-program sebagai berikut:
1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
 2. Program Kerjasama Informasi dengan Mediamasa.
 3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan mediamasa.
 4. Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi.
 5. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.
 6. Program Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian, Pos Telekomunikasi dan Frekuensi.
- *Urusan Pertanahan*, dengan program-program sebagai berikut :
1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

2. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.
 3. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan.
- *Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*, dengan program-program sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.
 3. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
 5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.
- *Urusan Statistik*, dengan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
- *Urusan Perencanaan Pembangunan*, dengan program-program sebagai berikut:
1. Program Pengembangan Data/Informasi.
 2. Program Kerjasama Pembangunan.
 3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.
 4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- *Urusan Kearsipan*, dengan program-program sebagai berikut :
1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
 2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
 3. Program Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan.

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
- *Urusan Kepegawaian*, dengan program-program sebagai berikut :
 1. Program pendidikan Kedinasan.
 2. Program peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur.
 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
 4. Program peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pembinaan Kelembagaan.
 5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 6. Program Fasilitas Pindah/ Purna tugas PNS.
 - *Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil*, dengan Program Penataan Administrasi Kependudukan.
 - *Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri*, dengan program sebagai berikut :
 1. Program pendidikan Politik Masyarakat.
 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
 3. Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat.
 - *Urusan Penanganan dan Penanggulangan dampak Bencana*, dengan program-program sebagai berikut :
 1. Program Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
 2. Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
 3. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

- *Urusan Keamanan dan Ketertiban masyarakat*, dengan program-program sebagai berikut :
 1. Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman Ketertiban dan Pencegahan tindak kriminal.
 2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
 3. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
 4. Program Peningkatan Pemeberantasan penyakit Masyarakat (PEKAT).
- *Urusan Penataan Ruang*, dengan program sebagai berikut :
 1. Program Perencanaan Tata Ruang.
 2. Program Pemanfaatan Ruang.
 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- *Urusan Sosial*, dengan program-program sebagai berikut :
 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
 2. Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
 3. Program Pembinaan Anak Terlantar.
 4. Program Pembinaan Penyandang Cacat & Trauma.
 5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
 6. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba & Penyakit Sosial lainnya).
 7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 8

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Guna menyelenggarakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dimana berbagai kemungkinan dapat terjadi yang akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Hal-hal yang dapat memengaruhi tersebut antara lain adalah kondisi makro ekonomi nasional dan regional seperti pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi yang mengalami penurunan dan kondisi eksisting lainnya.

Penyusunan indikasi program prioritas didasarkan pada visi misi dan program kerja Kepala daerah. Sedangkan untuk keperluan pendanaan didasarkan pada hasil evaluasi dan prediksi kondisi atas potensi dan kebutuhan pembangunan tahunan, mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dan perubahannya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Dalam rangka menjaga konsistensi pencapaian visi dan misi secara terstruktur dirumuskan indikator makro pembagunan daerah Kabupaten Banjar. Beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran terhadap pencantuman beberapa indikator dimaksud yaitu sinkronisasi dan sinergitas dengan sasaran yang ingin dicapai secara nasional dan regional Provinsi Kalimantan Selatan mencakup:

1.) Triple Track Strategy terdiri dari :

- a. *pro growth* (mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi).
- b. *pro jobs* (mendukung penyerapan tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran).
- c. *pro poor* (menurunkan tingkat kemiskinan) .

2.) Melakukan upaya pencapaian MDG's meliputi:

- a. memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim
- b. mewujudkan pendidikan dasar untuk semua
- c. mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- d. menurunkan angka kematian anak
- e. meningkatkan kesehatan ibu.
- f. memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya.
- g. Memastikan kelestarian lingkungan.
- h. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Dalam rangka konsistensi dan sinergitas tersebut di atas dengan mempertimbangkan perubahan kondisi makro ekonomi dan kondisi eksisting pada tahun 2011-2012, menjadikan perlunya menyesuaikan target-target indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Banjar pada akhir periode RPJMD pada tahun 2015, sebagai gambaran secara makro tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan.

Beberapa indikator kinerja makro yang menjadi ukuran pencapaian visi dan misi sebagaimana disebut di atas dimuat pada tabel 8.1.

Tabel 8.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Banjar

No.	Uraian	Kabupaten Banjar	
		Kondisi Awal	Target 2015
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,18	6,11
2.	PDRB per kapita (Harga Berlaku) (Rp. Juta)	12.344.904	21.717.000
3.	Indeks gini (%)	0,27	0,29
4.	Tingkat pengangguran terbuka (indeks)	4,15	2,18
5.	Tingkat kemiskinan (%)	5,1	2,54
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)	70,52	73,86
7.	Tingkat pertumbuhan penduduk (per tahun)	1,7	1,5

Sumber: Target Analisis BAPPEDA Kabupaten Banjar

Secara umum beberapa ukuran yang ditetapkan sebagai target capaian pada tahun 2015 pada tabel 8.1 dapat diartikan berada dalam kondisi yang lebih baik dari angka rata-rata target capaian Provinsi Kalimantan Selatan.

8.1 Indikasi Program dan kegiatan Prioritas Menurut Misi

8.1.1 Indikasi Program dan Program Prioritas Misi Kesatu

Tabel 8.2. Indikasi Program Prioritas Misi Kesatu

URUSAN	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	SKPD PELAKSANA
<i>Pemerintahan Umum</i>	1. Program Pembinaan Keagamaan	a. Bantuan Sosial Keagamaan. b. Penerapan Pembelajaran baca tulis Al-Quran tingkat SD, SMP, SLTA (sederajat). c. Penyuluhan Agama. d. Penyuluhan Keluarga Sakinah. e. Penyuluhan Pekat dan Narkoba. f. Pembinaan Organisasi dan Kelompok Keagamaan melalui FKUB. g. Penerapan Nilai dan Norma Agama. h. Harmonisasi Kerukunan Keagamaan. i. Peningkatan Kualitas Pembinaan Keagamaan. j. Penegakan PERDA bernuanasa Islami. k. Pengajian Rutin Keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. l. Harmonisasi Kerukunan Keagamaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas pendidikan • Kantor Satpol PP • Kantor Kementerian Agama • Bagian Kesra • Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
<i>Budaya</i>	2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pengembangan Kebudayaan Daerah.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
<i>Pariwisata</i>	3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata b. Pengembangan obyek wisata unggulan daerah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dinas Pekerjaan Umum

8.1.2 Indikasi Program dan program Prioritas Misi Kedua

Tabel 8.3. Indikasi Program Prioritas Misi Kedua

URUSAN	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	SKPD PELAKSANA
<i>Pendidikan</i>	a. Program Pendidikan Anak Usia Dini. b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. c. Program Pendidikan Menengah. d. Program Pendidikan Luar Biasa. e. Program Pendidikan Nonformal. f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aksibilitas Pelayanan Pendidikan Kepada Masyarakat. g. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. h. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. i. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
<i>Pemuda dan Olahraga</i>	a. Program Peningkatan peran serta Kepemudaan. b. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda. c. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga. d. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda. e. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
<i>Komunikasi dan Informatika</i>	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan & Kominfo • Setda Bagian Humas
<i>Kebudayaan</i>	a. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. b. Program Pengembangan Nilai Budaya. c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya. d. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
<i>Perencanaan Pembangunan</i>	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Bappeda
<i>Kesehatan</i>	a. Program Obat dan perbekalan Kesehatan. b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita. d. Program Pengawasan Obat dan Makanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • RSUD Ratu Zalecha

URUSAN	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	SKPD PELAKSANA
	e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. j. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. k. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas Pustu dan Jaringannya.	
<i>Kesehatan</i>	l. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita. m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut. n. Program Pengawasan dan pengendalian Kesehatan Makanan. o. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. p. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasaran Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata. q. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.	
<i>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</i>	a. Program Keluarga Berencana. b. Program Pelayanan Kontrasepsi. c. Program Kesehatan Reproduksi Remaja. d. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri. e. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/AIDS. f. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.	BP3AKB
<i>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</i>	a. Program Pendidikan Politik Masyarakat. b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Badan Kesbangpol
<i>Pemberdayaan Perempuan</i>	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.	BP3AKB
<i>Pertanian</i>	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani.	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
<i>Ketahanan Pangan</i>	Program Pemberdayaan Penyuluhan	Badan Pelaksana Penyuluh
<i>Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</i>	a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan . b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. c. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan.	BP3AKB

URUSAN	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	SKPD PELAKSANA
	d. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak e. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.	

8.1.3 Indikasi Program dan program Prioritas Misi Ketiga

Tabel 8.4 Indikasi Program Prioritas Misi Ketiga

URUSAN	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	SKPD PELAKSANA
<i>Pariwisata</i>	a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. c. Program Pengembangan Kemitraan. d. Program Pengembangan Kepariwisata Daerah.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
<i>Koperasi dan UKM</i>	a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif. b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.	Dinas Koperasi dan UKM
<i>Perindustrian</i>	a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. b. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial. c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. d. Program Penataan Struktur Industri. e. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. f. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor g. Program Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri h. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<i>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i>	a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

URUSAN	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	SKPD PELAKSANA
	Perdesaan.	
<i>Penanaman Modal</i>	a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.	Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
<i>Perdagangan</i>	a. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.	Badan Perindustrian dan Perdagangan
<i>Tenaga Kerja</i>	a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja. c. Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. d. Program Perlindungan Tenaga Kerja.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
<i>Transmigrasi</i>	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
<i>Pemuda dan Olahraga</i>	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.	Dinas Budaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga
<i>Pertanian</i>	a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. b. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian. c. Program Pemberdayaan Petani. d. Program Sarana Produksi Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna. e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. f. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. g. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. h. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. j. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. k. Program Peningkatan Pemasaran Produksi Peternakan l. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan • Kantor Ketahanan Pangan • Badan Pelaksana Penyuluhan
<i>Ketahanan Pangan</i>	a. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan. b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.	Kantor Ketahanan Pangan
<i>Kehutanan dan Perkebunan</i>	a. Program Pengembangan Agribisnis. b. Program Peningkatan Pemasaran dan Distribusi Hasil Perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan • Dinas Pertanian Perkebunan

URUSAN	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	SKPD PELAKSANA
	c. Program Pemanfaatan Teknologi dan Peningkatan Produksi Perkebunan d. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan. e. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan. f. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.	
<i>Kelautan dan Perikanan</i>	a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan. c. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap. e. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan dan Kelautan • Badan Pelaksana Penyuluh
<i>Pekerjaan Umum</i>	a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. b. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan. c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. d. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya air lainnya. e. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya. f. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. g. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. h. Program Pengembangan Kawasan. i. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. j. Program Pembangunan, Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan. k. Program Pengaturan Jasa Konstruksi. l. Program Pelayanan Jasa Pengujian. m. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan wilayah cepat tumbuh.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air • Dinas Perumahan dan Permukiman
<i>Perumahan</i>	a. Program Pengembangan Perumahan. b. Program Lingkungan Sehat Perumahan. c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. d. Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh.	Dinas Perumahan dan Permukiman
<i>Perencanaan Pembangunan</i>	a. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. b. Program perencanaan prasarana wilayah dan	Bappeda

URUSAN	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	SKPD PELAKSANA
	<p>Sumber daya Alam.</p> <p>c. Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota menengah dan Besar.</p> <p>d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan wilayah cepat tumbuh.</p>	
<i>Perhubungan</i>	<p>a. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.</p> <p>b. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.</p> <p>c. Program Peningkatan Pelayanan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.</p> <p>d. Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ/Perhubungan.</p> <p>e. Program Peningkatan Kelaikan Pengoprasian Kendaraan Bermotor.</p> <p>f. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.</p>	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
<i>Energi dan Sumber Daya Mineral</i>	<p>a. Program Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikian.</p> <p>b. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Terbarukan.</p> <p>c. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Mineral Baru.</p>	Dinas Pertambangan dan Energi

8.1.4 Indikasi Program dan Program Prioritas Misi Keempat

Tabel 8.5 Indikasi Program Prioritas Misi Keempat

URUSAN	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	SKPD PELAKSANA
<i>Kebersihan dan Pertamanan</i>	<p>a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.</p> <p>b. Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.</p> <p>c. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).</p> <p>d. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Lingkungan Hidup • Dinas Perumahan dan Permukiman
<i>Kehutanan</i>	<p>a. Perlindungan konservasi sumberdaya hutan dan Lahan.</p> <p>b. Program rehabilitasi hutan dan lahan.</p>	Dinas Kehutanan
<i>Energi dan Sumberdaya Mineral</i>	<p>a. Program Pembinaan, dan Pengembangan bidang ketenaga listrikian</p> <p>b. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan</p> <p>c. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat</p>	Dinas Pertambangan dan Energi
<i>Perencanaan</i>	a. Program Perencanan pembangunan daerah rawan	Bappeda

URUSAN	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	SKPD PELAKSANA
<i>Pembangunan</i>	bencana b. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	
<i>Pekerjaan Umum</i>	a. Program pengendalian banjir	Dinas Bina Marga
<i>Lingkungan Hidup</i>	a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam. c. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah d. Program rehabilitasi dan cadangan sumber daya alam e. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan.	Badan Lingkungan Hidup

8.1.5 Indikasi Program dan program Prioritas Misi Kelima

Tabel 8.6 Indikasi Program Prioritas Misi Kelima

URUSAN	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	SKPD PELAKSANA
<i>Pemerintahan Umum</i>	a. Program Peningkatan Kapasitas dan Penataan Kelembagaan Daerah. b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. c. Program Penanganan dan Pengelolaan Keuangan Aset dengan Baik. d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. e. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. f. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. g. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. h. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. i. Program Peningkatan Kapasitas Kelembaga Perwakilan Rakyat Daerah. j. Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan. k. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. l. Program Fasilitasi dan Optimalisasi	<ul style="list-style-type: none"> • BPKAD • Dispeda • Bagian Organisasi • Sekretariat Daerah • Bappeda • KesbangLinmas • Inspektorat • BKD • Setda Bagian Hukum • Setda Bagian Pembangunan • Sekretariat DPRD • Sekretariat DP KORPRI • BKPMPT

URUSAN	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	SKPD PELAKSANA
	Penyelenggaraan Pemerintah. m. Program Pemeliharaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. n. Program Peningkatan Kapasitas & Penataan Kelembagaan Daerah o. Program Analisis Kebijakan Pembangunan. p. Program Penelitian dan Pengembangan. q. Program Pendidikan Kedinasan. r. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur s. Program Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. t. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. u. Program Pendidikan Kedinasan. v. Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pembinaan Kelembagaan. w. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS x. Program peningkatan disiplin aparaturnya y. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi z. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	
<i>Pertanahan</i>	a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. b. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.	Sekretariat Daerah
<i>Kependudukan dan Catatan Sipil</i>	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil
<i>Statistik</i>	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.	Bappeda
<i>Kearsipan</i>	a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
<i>Komunikasi dan Informatika</i>	a. Program Kerjasama Informasi dengan Media massa. b. Program Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian, Pos Telekomunikasi dan Frekuensi. c. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dengan Media Massa. d. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.	Dinas Perhubungan dan Kominfo

URUSAN	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	SKPD PELAKSANA
<i>Perencanaan Pembangunan</i>	a. Program Pengembangan Data/Informasi. b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. d. Program Kerjasama Pembangunan. e. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Setda Bagian Tapem
<i>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</i>	a. Program Pengendalian dan Penanganan Bencana. b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. d. Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat. e. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan tindakan kriminal. f. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. g. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. h. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT). i. Program Pendidikan Politik Masyarakat. j. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanggulangan Bencana • Badan Kesbangpol • Kantor Satpol PP
<i>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i>	a. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. b. Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan c. Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa d. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. f. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan. g. Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.	BPMPD
<i>Penataan Ruang</i>	a. Program Perencanaan Tata Ruang. b. Program Pemanfaatan Ruang. c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. d. Program Perencanaan Pembangunan.	Bappeda

URUSAN	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	SKPD PELAKSANA
<i>Perhubungan</i>	a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. d. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.	Dinas Perhubungan dan Kominfo
<i>Kesehatan</i>	a. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. b. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata. c. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit d. Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • RSUD Ratu Zalecha
<i>Pemuda dan Olahraga</i>	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
<i>Kebudayaan</i>	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
<i>Penanaman Modal</i>	a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Ekonomi Setda • BKPMP2T
<i>Sosial</i>	a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. b. Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. c. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba & Penyakit Sosial Lainnya). d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. e. Program Pembinaan Anak Terlantar. f. Program Pembinaan Penyandang Cacat & Trauma. g. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo. h. Program Pembinaan Penyandang Disabilitas/Cacat dan Eks Trauma.	Dinas Sosial

8.2. Kebutuhan Pendanaan Menurut Misi dan Urusan

Tabel 8.7 Kebutuhan Pendanaan Menurut Misi dan Program

Kode	Urusan	Kebutuhan Pendanaan (Rp.) (Juta)					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
I.	Misi Ke - 1						
1	Urusan Pemerintahan Umum	12.935,00	12.480,00	11.945,00	11.400,00	11.360,00	60.120,00
2	Urusan Kebudayaan	-	300,00	375,00	469,00	586,00	1.730,00
3	Urusan Pariwisata	-	300,00	350,00	300,00	350,00	1.300,00
4	Urusan Pendidikan	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	400,00
	Jumlah	13.005,00	13.155,00	12.750,00	12.254,00	12.386,00	63.550,00
II.	Misi Ke-2						
1	Urusan Wajib Pendidikan	68.147,00	102.735,00	37.262,00	48.725,00	48.220,00	305.089,00
2	Urusan Pemuda olahraga	563,00	621,00	4.669,00	2.970,00	3.020,00	11.843,00
3	Urusan komunikasi dan informatika	491,00	375,00	445,00	784,00	455,00	2.550,00
4	Urusan Kebudayaan	313,00	594,00	2.487,00	2.021,00	1.809,00	7.224,00
5	Urusan Kesehatan	8.055,00	13.023,00	13.800,00	19.250,00	10.791,65	64.919,65
6	Urusan Keluarga berencana dan Keluarga Berencana	626,00	456,00	1.002,00	1.132,00	1.009,00	4.225,00
7	Urusan Kesatuan bangsa dan politik Dalam Negeri	445,00	480,00	448,00	739,00	689,00	2.801,00
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan	633,00	737,00	1.496,00	1.705,00	2.236,00	6.807,00
	Jumlah	79.273,00	119.021,00	61.609,00	77.326,00	68.229,65	405.458,65
III.	Misi Ke-3						
1	Urusan Pariwisata	596,00	262,00	1.398,00	1.625,00	1.604,00	5.485,00
2	Urusan Koperasi dan UKM	1.186,00	807,00	2.166,00	2.672,00	3.964,00	10.795,00
3	Urusan Perindustrian	128,00	31,00	725,00	1.229,00	2.245,00	4.358,00
4	Urusan Pemberdayaan	1.450,00	709,00	1.729,00	2.112,00	1.647,00	7.647,00

Kode	Urusan	Kebutuhan Pendanaan (Rp.) (Juta)					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
	Masyarakat dan desa						
5	Urusan Penanaman Modal	105,00	209,00	461,00	963,00	1.182,00	2.920,00
6	Urusan Perdagangan	477,00	366,00	3.290,00	6.127,00	12.147,00	22.407,00
7	Urusan Tenaga Kerja	526,00	575,00	2.233,00	2.259,00	1.857,00	7.450,00
8	Urusan transmigrasi	410,00	78,00	436,00	400,00	257,00	1.581,00
9	Urusan Pemuda dan Olahraga	158,00	158,00	184,00	472,00	269,00	1.241,00
10	Urusan Pertanian	12.222,00	9.200,00	13.017,00	6.671,00	20.095,00	61.205,00
11	Urusan Ketahanan Pangan	8.766,00	7.130,00	10.497,00	1.028,00	13.150,00	40.571,00
12	Urusan Perencanaan Pembangunan	6.014,00	5.741,00	10.536,00	31.090,00	6.372,00	59.753,00
13	Urusan Pekerjaan Umum	31.338,00	39.604,00	67.246,00	67.693,00	72.327,00	278.208,00
14	Urusan Perumahan	0,00	8.673,00	2.778,00	3.430,00	5.839,00	20.720,00
15	Urusan Perikanan	6.448,00	7.890,00	4.601,00	4.851,00	781,00	24.571,00
	Jumlah	69.824,00	81.433,00	121.297,00	132.622,00	143.736,00	548.912,00
IV.	Misi Ke-4						
1	Urusan Kehutanan	2.167,20	1.881,11	2.469,93	2.652,54	3.416,83	12.587,60
2	Urusan energi dan Sumber daya Minerl	1.171,40	435,50	9.409,10	14.293,71	14.058,74	39.368,45
3	Urusan perencanaan pembangunan	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00
4	Urusan Pekerjaan umum	0,00	0,00	1.279,41	1.303,03	3.845,96	6.428,40
5	Urusan lingkungan hidup	3.778,25	4.912,31	13.109,95	9.813,78	17.189,33	48.803,61
	Jumlah	7.116,85	7.228,91	26.466,38	28.063,05	38.510,87	107386,0603
V.	Misi Ke-5						
1	Urusan Pemerintahan Umum,	26.007,99	25.339,48	37.242,65	46.709,83	68.237,71	203.537,66
2	Urusan Pertanahan	0	0	30.866,15	4.200,00	9.650,00	44.716,15
3	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	1.455,55	1.193,06	2.287,57	3.457,90	3.227,17	11.621,25
4	Urusan Statistik	1.076,00	675,60	3.252,41	3.429,38	3.081,04	11.514,43
5	Urusan Kearsipan	120,12	112,55	159,1	149,93	204,625	746,33
6	Urusan komunikasi dan	2.495,86	2.755,74	3.144,78	4.812,87	4.435,07	17.644,32

Kode	Urusan	Kebutuhan Pendanaan (Rp.) (Juta)					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
	imformatika						
7	Urusan Perencanaan Pembangunan	1.935,20	1.751,37	2.342,42	3.999,63	4.736,42	14.765,04
8	Urusan Kesatuan Bangsa dan politik dalam Negeri	2757,435	2723,727	8013,317	10994,7575	8861,9522	33.351,19
9	Urusan pemberdayaan Masyarakat Desa	340	276	782	780	1.148	3.327,46
10	urusan Penataan Ruang	639,52	3207,32	12696,66	2953,89	2381,6851	21.879,08
11	Urusan Perhubungan	1990,6	1194,81	2089,68	3936	3535,0016	12.746,09
12	Urusan Kesehatan	17.687,24	7.664,46	13.107,41	14.947,41	14.433,13	67.839,65
13	Urusan Penanaman Modal	242,3	550,85	903,38	1603,87	2002,8483	5.303,25
14	Urusan Sosial	1010,0768	1273,3	1302,8871	3015,88	2805,538	9.407,68
	Jumlah	57.758,34	48.718,67	118.190,61	104.991,35	128.740,60	458.399,56

8.3. Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Menurut Misi

8.3.1. Misi Kesatu

Misi Kesatu: *Memantapkan suasana kehidupan yang madani*, dengan indikasi rencana program prioritas dan pendanaan untuk tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 8.8 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kesatu (Memantapkan suasana kehidupan yang madani).

No	Program Prioritas	Kebutuhan Pendanaan (Rp. Juta)					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Program Pembinaan Keagamaan	12,420	12,000	11,500	11,000	10,000	56,920
2.	Bantuan kesehatan Ulama dan Tokoh Masyarakat	500	450	400	350	300	2,000
3.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		300	375	469	586	1,730

No	Program Prioritas	Kebutuhan Pendanaan (Rp. Juta)					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
4.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		300	350	300	350	1,300
5.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	15	30	45	50	60	200
6.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Pelatihan Guru Pembina Khatam Al Qur'an)	70	75	80	85	90	400
TOTAL		13,005	13,155	12,750	12,254	11,386	62,550

8.3.2. Misi Kedua

Misi Kedua: *Memantapkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia*, dengan indikasi rencana program prioritas dan pendanaan untuk tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 8.9. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kedua. (Memantapkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia)

No	Program Prioritas	Kebutuhan Pendanaan (Rp. Juta)					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini.	1.913,0	1.943,0	1.356,0	1.397,0	5.643,0	12.252,0
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.	57.479,0	87.466,0	23.816,0	23.037,0	19.633,0	211.431,0
3	Program Pendidikan Menengah.	2.390,0	4.468,0	4.541,0	5.317,0	8.162,0	24.878,0
4	Program Pendidikan Nonformal.	1.763,0	4.667,0	3.178,0	12.482,0	9.148,0	31.238,0
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	2.901,0	2.883,0	2.511,0	4.385,0	3.516,0	16.196,0
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.	1.637,0	1.222,0	1.678,0	2.057,0	1.893,0	8.487,0
7		64,0	86,0	182,0	50,0	225,0	607,0
8	Program Peningkatan peran serta Kepemudaan.	192,0	199,0	1.590,0	1.932,0	1.169,0	5.082,0
9	Program Pembinaan dan Masyarakat Olahraga.	371,0	422,0	3.079,0	1.038,0	1.851,0	6.761,0
10	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media	491,0	375,0	445,0	784,0	455,0	2.550,0

No	Program Prioritas	Kebutuhan Pendanaan (Rp. Juta)					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
	Massa.						
11	Program Pengembangan Nilai Budaya.	-	-	389,0	155,0	50,0	594,0
12	Program Pengelolaan Keragaman Budaya.	204,0	476,0	1.705,0	1.328,0	1.225,0	4.938,0
13	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.	109,0	118,0	393,0	538,0	534,0	1.692,0
14	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	254,0	218,0	1.162,0	1.224,0	608,0	3.466,0
15	Program Obat dan perbekalan Kesehatan.	2.628,0	3.024,0	3.233,0	4.201,0	3,7	13.089,7
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat.	2.633,0	4.799,0	4.889,0	4.026,0	135,0	16.482,0
17	Program Pengawasan Obat dan Makanan.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
18	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.	109,0	126,0	362,0	613,0	588,0	1.798,0
19	Program Perbaikan Gizi Masyarakat.	799,0	345,0	460,0	791,0	780,0	3.175,0
20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat.	17,0	14,0	24,0	30,0	20,0	105,0
21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.	497,0	557,0	789,0	1.007,0	1.134,0	3.984,0
22	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.	54,0	105,0	160,0	960,0	514,0	1.793,0
23	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.	41,0	33,0	83,0	69,0	55,0	281,0
24	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas Pustu dan Jaringannya.	1.171,0	3.914,0	3.421,0	7.177,0	7.394,0	23.077,0
25	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.	57,0	28,0	261,0	234,0	46,0	626,0
26	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut.	8,0	40,0	69,0	87,0	18,0	222,0
27	Program Pengawasan dan pengendalian Kesehatan Makanan.	16,0	13,0	24,0	30,0	25,0	108,0
28	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	25,0	25,0	25,0	25,0	79,0	179,0
29	Program Keluarga Berencana.	345,0	236,0	508,0	756,0	759,0	2.604,0
30	Program Pelayanan Kontrasepsi.	34,0	24,0	34,0	36,0	44,0	172,0
31	Program Kesehatan Reproduksi Remaja.	63,0	43,0	296,0	181,0	130,0	713,0
32	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/AIDS.	105,0	82,0	96,0	107,0	51,0	441,0
33	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	79,0	71,0	68,0	52,0	25,0	295,0
34	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	331,0	361,0	294,0	330,0	330,0	1.646,0
35	Program Pengembangan Wawasan	114,0	119,0	154,0	409,0	359,0	1.155,0

No	Program Prioritas	Kebutuhan Pendanaan (Rp. Juta)					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
	Kebangsaan.						
36	Program Peningkatan kemampuan lembaga Petani.	542,0	26,0	183,0	952,0	384,0	2.087,0
37	Program Pemberdayaan Penyuluhan	1.019,0	848,0	800,0	1.468,0	718,0	4.853,0
38	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	31,0	34,0	151,0	36,0	32,0	284,0
39	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.	20,0	2,0	30,0	35,0	98,0	185,0
40	Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan.	175,0	185,0	195,0	205,0	215,0	975,0
41	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak	218,0	225,0	337,0	430,0	431,0	1.641,0
42	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.	189,0	291,0	783,0	999,0	1.460,0	3.722,0
TOTAL		81.098,0	120.123,0	63.764,0	80.980,0	69.949,7	415.914,7

8.3.3. Misi Ketiga

Misi Ketiga: *Memantapkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan mendorong iklim investasi*, dengan indikasi rencana program prioritas dan pendanaan untuk tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 8.10. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Ketiga (Memantapkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan mendorong iklim investasi)

No	Program Prioritas	Kebutuhan Pendanaan (Rp. Juta)					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.	190,0	156,0	1.033,0	791,0	924,0	3.094,0
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.	366,0		271,0	501,0	175,0	1.313,0
3	Program Pengembangan Kemitraan.	40,0	106,0	94,0	333,0	505,0	1.078,0
4	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.	139,0	109,0	400,0	337,0	511,0	1.496,0
5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.	125,0	117,0	312,0	243,0	355,0	1.152,0
6	Program Peningkatan Kualitas	290,0	145,0	436,0	935,0	413,0	2.219,0

No	Program Prioritas	Kebutuhan Pendanaan (Rp. Juta)					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
	Kelembagaan Koperasi						
7	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.	632,0	436,0	1.018,0	1.157,0	2.685,0	5.928,0
8	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.	100,0	31,0	725,0	1.229,0	2.245,0	4.330,0
9	Program Penataan Struktur Industri.	28,0					28,0
10	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	65,0	46,0	110,0	110,0	189,0	520,0
11	Program Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri	355,0	260,0	2.910,0	5.646,0	11.091,0	20.262,0
12	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	57,0	60,0	270,0	371,0	867,0	1.625,0
13	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.	679,0	179,0	245,0	297,0	284,0	1.684,0
14	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.	771,0	530,0	1.484,0	1.815,0	1.363,0	5.963,0
15	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.	105,0	209,0	461,0	963,0	1.182,0	2.920,0
16	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	134,0	130,0	260,0	643,0	315,0	1.482,0
17	Program Peningkatan Kesempatan Kerja.	220,0	217,0	1.596,0	1.156,0	1.102,0	4.291,0
18	Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	172,0	228,0	377,0	460,0	440,0	1.677,0
19	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.	410,0	78,0	436,0	400,0	257,0	1.581,0
20	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.	158,0	158,0	184,0	472,0	269,0	1.241,0
21	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.	646,0	96,0	544,0	1.344,0	767,0	3.397,0
22	Program Peningkatan Ketahanan Pangan.	8.766,0	7.130,0	10.497,0	1.028,0	13.150,0	40.571,0
23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	78,0	63,0	148,0	249,0	129,0	667,0
24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	235,0	125,0	272,0	464,0	189,0	1.285,0
25	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	126,0	7,0	21,0	176,0	831,0	1.161,0
26	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.	75,0	500,0	196,0	239,0	1.367,0	2.377,0
27	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.	359,0	316,0	250,0	419,0	1.838,0	3.182,0
28	Program Peningkatan Pemasaran Produksi Peternakan	376,0	89,0	106,0	332,0	722,0	1.625,0
29	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.	115,0	77,0	67,0	66,0	50,0	375,0
30	Program Pengembangan Budidaya Perikanan.	374,0	163,0	242,0	362,0	218,0	1.359,0
31	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.	240,0	2.056,0	1.376,0	1.974,0	370,0	6.016,0

No	Program Prioritas	Kebutuhan Pendanaan (Rp. Juta)					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
32	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	5.719,0	5.594,0	2.916,0	2.449,0	143,0	16.821,0
33	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.	283,0	404,0	1.499,0	2.004,0	2.559,0	6.749,0
34	Program perencanaan prasarana wilayah dan Sumber daya Alam.			663,0	1.877,0	681,0	3.221,0
35	Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota menengah dan Besar	355,0	387,0	1.494,0	1.857,0	2.640,0	6.733,0
36	Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.	5.376,0	4.950,0	6.880,0	25.352,0	492,0	43.050,0
37	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.	7.475,0	6.157,0	12.390,0	3.799,0	15.525,0	45.346,0
38	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.	18.750,0	25.486,0	41.683,0	46.840,0	36.110,0	168.869,0
39	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya.	3.500,0	6.506,0	7.158,0	11.580,0	11.987,0	40.731,0
40	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.	1.128,0	915,0	1.107,0			3.150,0
41	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.			3.753,0	4.305,0	7.536,0	15.594,0
42	Program Pengaturan Jasa Konstruksi.	485,0	540,0	1.155,0	1.169,0	1.169,0	4.518,0
43	Program Pengembangan Perumahan.		8.673,0	2.778,0	3.430,0	5.839,0	20.720,0
TOTAL		59.497,0	73.429,0	109.817,0	129.174,0	129.484,0	501.401,0

8.3.4. Misi Keempat

Misi Keempat: *Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan*, dengan indikasi rencana program prioritas dan pendanaan untuk tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 8.11. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Keempat (Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan)

No	Program Prioritas	Kebutuhan Pendanaan (Rp. Juta)					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1.926,6	2.598,5	6.661,4	5.056,1	12.709,4	28.952,0
2	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	346,2	346,5	4.496,1	3.435,8	2.836,6	11.461,1
3	Program Perlindungan konservasi sumberdaya hutan	85,0	46,0	59,4	113,3	138,3	442,0
4	Program rehabilitasi hutan dan lahan	1.501,2	1.530,1	2.099,5	2.211,2	2.792,5	10.134,6
5	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan.	581,0	305,0	311,0	328,0	486,0	2.011,0
6	Program Pembinaan, dan Pengembangan bidang ketenaga listrikan	620,5	266,5	6.209,3	10.536,3	10.899,1	28.531,7
7	Program Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan	258,7	0,2	1.053,7	1.708,7	708,8	3.730,2
8	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat	292,2	168,8	2.146,2	2.048,6	2.450,8	7.106,5
9	Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	-	-	198,0	-	-	198,0
10	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.	-	-	1.279,4	1.303,0	3.846,0	6.428,4
11	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.	1.485,5	1.942,4	1.892,4	1.204,1	1.352,1	7.876,5
12	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.	20,0	25,0	60,0	117,8	291,2	514,0
TOTAL		7.116,8	7.228,9	26.466,4	28.063,0	38.510,9	107.386,1

8.3.4. Misi Kelima

Misi Kelima: *Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan prima*, dengan indikasi rencana program prioritas dan pendanaan untuk tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 8.12. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kelima (Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan prima)

No	Program Prioritas	Kebutuhan Pendanaan (Rp. Juta)					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	6.484,1	6.484,1	8.198,0	15.326,1	17.159,2	53.651,4
2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	2.313,5	2.292,9	3.019,9	3.023,0	3.587,4	14.236,7
3	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.	13,5	46,9	18,6	32,8	88,3	200,1
4	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.	422,5	391,5	906,1	1.320,1	1.495,3	4.535,4
5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.	33,1	167,6	223,1	298,3	320,2	1.042,2
6	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.	99,5	-	20,0	18,0	11,8	149,3
7	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.	7.718,6	8.171,9	11.377,0	11.707,8	12.069,6	51.045,0
8	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.	1.825,7	1.475,0	2.337,5	2.708,7	2.676,7	11.023,5
9	Program Pemeliharaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	625,0	187,3	1.556,3	2.097,4	1.838,6	6.304,6
10	Program Pendidikan Kedinasan.	1.314,2	1.353,2	2.075,5	2.582,8	2.453,4	9.779,1
11	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	4.451,8	3.502,0	4.904,0	4.774,0	5.902,9	23.534,6
12	Program Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.	85,0	487,5	1.701,4	2.543,3	2.685,8	7.502,9
13	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pembinaan Kelembagaan.	77,9	672,8	1.128,1	1.668,2	1.899,6	5.446,6
14	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	49,0	42,5	215,0	-	112,5	419,1
15	Program peningkatan disiplin aparatur	949,0	481,5	1.188,9	1.507,2	1.547,8	5.674,5

No	Program Prioritas	Kebutuhan Pendanaan (Rp. Juta)					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
16	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	-	50,0	83,2	87,8	105,6	326,6
17	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.	-	-	30.866,1	4.200,0	9.650,0	44.716,1
18	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.455,6	1.193,1	2.287,6	3.457,9	3.227,2	11.621,2
19	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.	1.076,0	675,6	3.252,4	3.429,4	3.081,0	11.514,4
20	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.	107,4	97,3	144,1	40,5	74,9	464,2
21	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.	12,7	15,3	15,0	109,4	129,7	282,1
22	Program Kerjasama Informasi dengan Massmedia.	2.495,9	2.755,7	3.144,8	4.812,9	4.435,1	17.644,3
23	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.	1.210,0	1.313,8	1.239,9	2.408,1	3.135,6	9.307,3
24	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.	517,5	255,0	301,2	1.050,9	991,2	3.115,8
25	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	207,7	182,6	801,4	540,7	609,6	2.341,9
26	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.	85,0	487,5	1.701,4	2.543,3	2.685,8	7.502,9
27	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	625,0	109,8	1.556,3	2.097,4	1.838,6	6.227,1
28	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	109,6	94,1	125,0	125,0	699,0	1.152,6
29	Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman Ketertiban Nasional dan Pencegahan tindakan kriminal	1.852,9	1.544,9	2.929,3	3.685,7	952,9	10.965,6
30	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.	70,4	57,3	250,0	390,0	275,4	1.043,1
31	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	579,7	501,7	1.180,3	1.065,0	18.516,8	21.843,5
32	Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	270,1	219,1	532,2	390,0	873,0	2.284,4
33	Program Perencanaan Tata Ruang.	535,5	2.343,0	10.131,0	1.846,4	1.453,3	16.309,3
34	Program Pemanfaatan Ruang.	80,0	119,3	1.645,0	-	-	1.844,3
35	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.	24,0	745,0	920,7	1.107,5	928,4	3.725,5
36	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.	664,8	389,2	283,7	1.458,0	2.060,2	4.855,9
37	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.	297,7	141,5	160,6	-	-	599,8
38	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.	-	-	-	-	359,3	359,3
39	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.	12,5	163,8	1.236,9	1.313,8	468,3	3.195,4

No	Program Prioritas	Kebutuhan Pendanaan (Rp. Juta)					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
40	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.	1.015,6	500,4	408,5	1.164,2	647,2	3.735,8
41	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.	1.171,2	3.914,5	3.421,3	7.177,4	7.394,5	23.078,8
42	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.	6.250,0	3.750,0	9.686,2	7.400,0	6.123,7	33.209,8
43	Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit	10.266,0	-	-	370,0	915,0	11.551,0
44	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	91,8	297,3	234,4	640,8	820,5	2.084,8
45	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	105,0	208,7	669,0	963,1	1.182,4	3.128,1
46	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	45,5	44,9	-	-	-	90,4
47	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.	177,9	94,4	298,5	499,8	747,8	1.818,4
48	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	452,7	553,5	416,0	838,3	945,8	3.206,3
49	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba & Penyakit Sosial Lainnya.	105,0	177,2	165,1	265,2	142,5	855,0
50	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan	154,2	398,0	368,2	885,8	593,8	2.400,0
51	Program Pembinaan Anak Terlantar	58,2	-	-	71,0	62,1	191,2
52	Program Pembinaan Penyandang Cacat & Trauma	62,0	50,3	49,2	190,0	313,6	665,1
53	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	-	-	5,8	265,8	-	271,6
TOTAL		58.707,3	49.200,2	119.379,5	106.498,5	130.288,4	464.074,0

BAB 9

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Satu hal yang menjadi salah satu evaluasi dalam penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahap pertama yakni adalah belum jelasnya penetapan indikator atau tolok ukur sasaran yang harus dicapai pada penyelenggaraan program.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas sebagai salah satu keharusan yang wajib dilakukan adalah menetapkan berbagai indikator yang harus dicapai dalam penyelenggaraan urusan melalui berbagai program yang menjadi kewenangan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan jajaran Pemerintah di Kabupaten Banjar.

Setiap Misi Pembangunan Daerah akan dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran hingga program dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi kewajiban jajaran pelaksana pemerintahan untuk mencapainya melalui beberapa upaya penyelenggaraan program disertai dengan pendanaan masing-masing.

Secara rinci berikutini, dirumuskan berbagai indikator program secara tegas kedalam kelompok Misi Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

9.1 Indikasi Program dan Kegiatan Prioritas Menurut Misi

9.1.1 Indikasi Program dan Program Prioritas Misi Kesatu

Indikator Kinerja Misi Kesatu yaitu "Memantapkan suasana kehidupan masyarakat yang madani" adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 9.1 berikut.

Tabel 9.1. Indikator Kinerja Program Misi Kesatu (Memantapkan suasana kehidupan yang madani).

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			KONDISI AWAL 2011	KONDISI AKHIR 2015
1. Program Bantuan Sosial Keagamaan.	Tingkat Penerapan Nilai dan Norma Agama	Kondisi	Baik	Baik
	a. Penerapan norma agama dalam kehidupan sehari-hari b. Lembaga sosial keagamaan (Majelis Taqlim, Kelompok Maulid Habsyi dan Sinoman Hadrah, Jumlah TPA) meningkat.	Kondisi	Baik	Kegiatan lembaga terfasilitasi
2. Program pengelolaan keragaman budaya.	Harmonisasi Kerukunan Keagamaan	Kondisi	Baik	Kerukunan antar umat beragama terjaga
3. Pengelolaan Kekayaan Budaya.	Pengembangan Kebudayaan Daerah	Kondisi	Ada	Terpelihara
4. Program Pemeliharaan Ketrantibmas .	Penegakan PERDA bernuansa Islami	Pelaksanaan	Ada	Terlaksana
5. Program Pembinaan mental kerohanian PNS.	Pengajian Rutin Keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.	Kegiatan	Ada	Terlaksana

9.1.2 Indikasi Program dan Program Prioritas Misi Kedua

Indikator Kinerja Misi Kedua yaitu "Memantapkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia" adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 9.2 berikut

Tabel 9.2. Indikator Kinerja Program Misi Kedua (Memantapkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia).

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
Program Pendidikan WAJAR 9 Tahun	1. Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,25	7,27	7,29	7,31	7,33
	2. SD/MI/SMP/MTS	Tahun	9,10	9,09	9,07	9,07	9,05
	3. SMA/MA/SMK	Tahun	3,38	3,24	3,04	3,03	3,02
	4. Angka Partisipasi Kasar:						
	a. SD/MI/SDLB	Persen	99,84	100,00	105,00	107,00	108,00
	b. SLTP/MTs/SMPLB	Persen	88,0	88,50	89,00	89,50	90,00
	5. Angka Partisipasi Murni						
	a. SD/MI/SDLB	Persen	89,04	90,22	98,00	98,25	98,37
	b. SLTP/MTs/SMPLB	Persen	82,00	83,00	84,50	85,00	86,00
	6. Angka Kelulusan:						
	a. SD/MI/SDLB	Persen	100,00	100,00	100	100	100
	b. SLTP/MTs/SMPLB	Persen	86,71	99,00	99,56	100	100
	7. Nilai UAN rata-rata :						
	a. SD/MI/SDLB	Nilai/angka	6,75	6,82	6,90	6,95	7,25
	b. SLTP/MTs/SMPLB	Nilai/angka	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50
	8. Angka Putus Sekolah :						
a. SD/MI/SDLB	Persen	1,20	1,10	0,95	0,60	0,30	
b. SLTP/MTs/SMPLB	Persen	1,66	1,50	1,25	1,00	0,75	
Program Pendidikan Menengah	a. Angka Partisipasi Kasar	Persen	61,00	61,99	65,49	68,19	71,19
	b. Angka Partisipasi Murni	Persen	34,16	54,26	60,11	62,12	64,62
	c. Angka Kelulusan SMU/MA/SMK/PLB	Persen	99,5	99,69	99,73	100	100
	d. Nilai UAN Rata-rata	Persen Nilai/angka	6,50	6,50	7,00	7,25	7,50

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
	e. Angka Putus Sekolah SMU/MA/SMK/PLB	Persen	0,75	0,67	0,60	0,50	0,40
	f. Jumlah Sekolah Standar Nasional: SMU/MA/SMK/PLB	Persen	5,00	7,00	8,00	10,00	12,00
Program pendidikan Non formal	Angka Melek Huruf	Persen	96,03	95,11	95,50	96,07	98,05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aksibilitas Pelayanan Pendidikan Kepada Masyarakat	1. Rasio ketersediaan kelas terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar	Rasio	33,18	32,00	30,00	28,00	26,00
	2. Rasio ketersediaan kelas terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan Menengah	Rasio	32,00	30,00	28,00	26,00	24,00
	3. Perpustakaan Sekolah	Unit	560	568	576	578	580
Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan	1. Jumlah Perpustakaan :						
	a. Perpustakaan Umum	Unit	1	1	1	1	1
	b. Perpustakaan Desa	Unit	14	17	20	23	26
	2. Jumlah pengunjung Perpustakaan per tahun	orang	6.700	7.400	8.250	9.150	10.000
	3. Jumlah anggota per tahun	orang	322	244	250	275	300
Program Upaya kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	65,68	-	66	66,81	67,36
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1. Angka Kematian Balita	Per 1000 (KH)	2	1,6	1,3	1,1	2,4
	2. Angka Kematian Bayi	Per 1000 (KH)	10,5	10,9	1,3	10	9,6
Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Per 100.000 (KH)	140,2	136,6	1,3	117	107

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
& anak							
a. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin b. Program Perbaikan gizi masyarakat	Prevalensi Gizi Buruk	Persen	2,4	4,35	4	3,5	3,1
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.	Persen	60	65	70	75	80
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.	Peningkatan Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.	Persen	70	75	80	80	90
Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit	Terpeliharanya peralatan alat kesehatan rumah sakit	Persen	80	80	90	90	90
Program peningkatan pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan rawan jalan dan rawat inap	Kunjungan	80	85	90	90	95
Program Keluarga Berencana	Angka laju pertumbuhan penduduk	Persen	2,26	2,24	2,21	2,19	2,17
Program Pelayanan	Rasio Akseptor KB	Persen	25,97	24,18	22,97	17,02	15,66

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
Kontrasepsi.	Cakupan Akseptor Aktif	Persen	61,69	62,01	64,14	65,97	67,67
Program Kesehatan Reproduksi Remaja.	Persentase pasangan usia subur di bawah 20 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi	persen	5,90	6,10	6,39	6,30	6,25
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yg mandiri.	Persentase keluarga pra sejahtera dibandingkan jumlah total keluarga	Persen	6,44	6,20	6,15	6,10	6,09
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Adanya Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	kelompok	28	32	32	32	32
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual Termasuk HIV/AIDS	Tertanggulangnya Kasus Narkoba, Penyakit Menular Seksual Termasuk HIV/AIDS melalui penyuluhan	orang	300	240	180	330	720
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	64,60	65,08	65,56	65,58	65,60
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.	1. Indeks Pemberdayaan Gender (G3EM)	Persen	68,17	70,31	70,41	70,47	70,54
	2. Rasio KDRT	Persen	0,012	0,026	0,007	0,006	0,006
Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rasio Siswa perempuan dibanding laki-laki	Persen	103,41	95,01	93,84	93,90	94,02

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak.	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan	Persen	2	4	4	6	8
	Partisipasi perempuan dilembaga swasta	Persen	18,2	18,2	26	30	35
Program Pembinaan & Pemasyarakatan Olahraga	Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat nasional	Persen	3,3	3,3	6,7	6,7	10
	Jumlah atlet daerah yang dikirim ke event olahraga di luar negeri	orang	1	1	1	1	1
	Jumlah Pembinaan Olahraga	Cabang Olahraga	12	16	21	26	30
	Jumlah fasilitas olahraga	Buah	34	36	39	43	45
Program Pengelolaan kekayaan	Jumlah Jupel	Orang	20	20	21	22	23
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kegiatan	kegiatan	0	0	0	2	2
Program Pengembangan nilai budaya	Jumlah situs budaya	Buah	21	21	22	23	24
Program pengelolaan keragaman budaya	Jumlah kegiatan/pertunjukan kebudayaan	kegiatan	10	10	11	12	13
	Jumlah Group kesenian aktif	group	20	20	21	22	23
	Jumlah kelompok budaya yang diberikan pembinaan	kelompok	5	10	11	12	13
Program Pengembangan dan keserasiaan kebijakan Pemuda.	jumlah kebijakan nasional bidang pemuda yang telah ditindaklanjuti	Jumlah	5	6	7	7	7
Program Peningkatan peran serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	Organisasi	10	11	12	13	14
	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	7	14	14	14	14

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah wirausahawan muda	kelompok	4	5	6	8	9

9.1.3. Indikasi Program dan Program Prioritas Misi Ketiga

Indikator Kinerja Misi Ketiga yaitu “Memantapkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan mendorong iklim investasi” adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 9.3 berikut.

Tabel 9.3. Indikator Kinerja Program Misi Ketiga (Memantapkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan mendorong iklim investasi).

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
Program peningkatan kualitas kelemagaan koperasi	Pesentase Koperasi aktif	Persen	48	55	58	60	70
Program pengembangan kewirausahaan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Jumlah anggota koperasi pada koperasi aktif	Orang	13.800	14.090	14.340	14.467	14.988
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Jumlah KUMKM yang melakukan pameran dan promosi di luar daerah	Orang/Koperasi	2	4	6	6	6
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.	1. Peningkatan Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah	Unit	6.502	6.939	7.799	7.820	7.943

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
	2. Peningkatan Jumlah Produk Industri Kecil Dan Menengah	(Rp.000) rupiah	358.948.511	382.726.721	369.379.380	408.813.375	422.211.153
	3. Nilai Investasi Industri Kecil Dan Menengah	(Rp.000) rupiah	90.394.437	95.752.122	100.710.799	100.029.572	106.379.900
	4. Peningkatan Jumlah Bahan Baku Industri Kecil Dan Menengah	(Rp.000) rupiah	180.925.223	203.320.176	210.326.522	217.244.314	224.089.709
	5. Jumlah IKM yang melakukan pameran dan promosi di luar daerah	IKM	12	16	18	21	23
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.	1. Unit Usaha industri kecil dan menengah yang menggunakan teknologi industri	Unit	15	20	30	40	50
	2. Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mendapat pembinaan teknologi industri	Orang	125	135	165	180	200
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.	Peningkatan Jumlah produk sertifikasi yang diterbitkan	Buah	543	1.384	2.309	3.234	4.500
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah nilai ekspor barang dan jasa	USD	480.436.107.4	489.414.074.01	217.893.155.21	239.682.470.73	263.650.717.81
Program Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri	1. Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perdagangan	Jumlah	547	556	576	597	615

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
	2. Peningkatan Sarana Perdagangan	Jumlah	1	1	1	2	2
	3. Jumlah Distribusi Barang Beredar	Jumlah	4	4	4	5	5
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	1. Pengawasan Barang Beredar	Kasus	26	26	24	20	17
	2. Penertiban alat ukur unit takar, timbang dan peralatannya	Kali	2	3	3	4	5
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Kelompok Desa /Kelurahan	48 LSP-BM				
Program pemberdayaan penyuluh pertanian	1. Peningkatan Kualitas Penyuluh yang mengikuti diklat teknis	Orang	10	30	40	70	80
	2. Peningkatan Kualitas Penyuluh bersertifikasi	Orang	0	5	10	16	20
Program pemberdayaan petani	1. Jumlah petani sebagai penyuluh swadaya	Orang	20	30	40	60	100
	2. Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan	Orang	39	82	131	191	251
	3. Peningkatan kemampuan kelas kelompok	Kelompok	20	50	80	100	200
Program Sarana Produksi Teknologi Pertanian /Perkebunan Tepat Guna.	Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan pada balai Penyuluhan Kecamatan	BPP/BP3K	17	18	19	20	1

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.	Nilai Tukar Petani	Persen	108	109	110	111	112
Program Peningkatan Ketahanan Pangan.	Produksi tanaman pangan (Padi)	Ton	244.805	284.829	270.154	284.202	299.265
	Laju Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persen	1,8	16,35	5,1	5,2	5,3
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	Persen	21	22	22,5	23	23,5
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.	Bertambahnya jumlah pengelolaan padi yang telah menggunakan teknologi	Kelompok	2	3	3	3	4
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.	Meningkatnya produktivitas pertanian (Padi)	Kw/Ha	37,66	39,50	40,48	41,50	42,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.	Jumlah serangan penyakit ternak	Persen	0,47	0,41	0,38	0,33	0,32
	Peningkatan Populasi Ternak	Persen	2	2,9	3,2	3,5	4
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.	Peningkatan Volume hasil daging (sapi)	Persen	6,51	8,9	11	13,7	14,5
	Peningkatan Populasi Ternak	Persen	2	2,9	3,2	3,5	4
Program Peningkatan Ketahanan Pangan.	1. Tersedianya Pangan berdasarkan Nilai Gizi OPT: • Ketersediaan Energi • Ketersediaan Protein	K.kal/kap/h r	3.035	3.035	3.035	5.000	6.000
		Gr/kap/hr	80	80	100	150	200
	2. Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan	Rasio	1,50	1,53	1,53	1,53	1,55

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2011	2012	2013	2014	2015	
	3. Penguatan Lembaga Distribusi (LUEP dan LDPM)	LUEP	10	8	9	10	12	
		LDPM	7	16	16	18	18	
	4. Persentase desa yang telah memenuhi swasembada pangan	Persen	72	72	74	74	75	
	5. Terbangunnya Lumbung Pangan Desa	Unit	7	7	9	11	13	
	6. Terbinanya Peningkatan Mutu Konsumsi Pangan:	K.kal/kap/hr Gr/kap/hr Persen	• Konsumsi Energi	1.836	1.720	1.850	1.900	2.000
			• Konsumsi Protein	51	55	52	52	52
• Skor PPH			86,7	85,3	87,5	88,4	89,3	
Program Pengembangan Agribisnis.	Kualitas Hasil Perkebunan (Karet)	Persen	10	20	30	45	60	
Program Peningkatan Pemasaran dan Distribusi Hasil Perkebunan.	Pendapatan rata-rata per tahun petani kebun (karet)	Rupiah/KK/th	20.155.200,00	20.640.000,-	21.840.000,-	23.280.000,-	25.500.000,-	
Program Pemanfaatan Teknologi dan Peningkatan Produksi Perkebunan	Tingkat produktivitas kebun	persen	1,17	1,50	1,70	1,90	2,00	
		Kg/Ha	801	846	920	950	1200	
Program Pemfaatan potensi sumber daya kehutanan	Terbinanya ijin pemanfaatan kawasan hutan dan industri hasil hutan	Unit usaha	8	8	8	10	12	
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persen	55	65	75	85	95	

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
Program Pengembangan Budidaya Perikanan.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	33.559,13	34.074,03	35.096,25	37.552,9	40.181,70
Program Pengembangan Perikanan Tangkap.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	11.457,02	14.321,27	15.446,97	16.219,38	17.030,34
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Konsumsi Ikan per Kapita	Kg/Kapita/tahun	40,80	41,20	45	47	50
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.	Tercapainya kemitraan antara pengusaha besar, menengah kecil, dan mikro	Persen	10	50	60	70	80
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	45	29	143	250	300
	Pertumbuhan Investasi (Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN)	Persen	10	50	60	70	80
	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	Na	Na	2,4	2,5	2,6
Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	kunjungan wisata	Persen	630.0407 83.972	650.050 813.906	700.070	730.090	750.100
			124 %	125%.	137%	132%	173%
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Profil Tenaga Kerja Kab. Banjar	Dokumen	-	-	-	2	0

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
	2. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi	Persen	40,00	41,00	42,71	59,96	75,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	2,25	2,50	2,58	10,00	17,36
	2. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis kemasyarakatan	Persen	20	21,86	27,23	39,51	59,69
	3. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	Persen	30	35	35,08	47,33	60,00
	4. Angka pengangguran	Persen	4,15	4,10	4,05	4,02	4,00
Program Perlindungan Tenaga Kerja	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Persen	30	35	40	45	50
	Besaran tenaga kerja atau buruh yang menjadi peserta jamsostek	Persen	86	88	89	90	91
	Besaran pemeriksaan perusahaan	Persen	19,61	22,99	30,46	40	45
	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	Persen	22,72	30,02	35	45	50

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.	Rasio Pendapatan Per Kapita Transmigran Terhadap Pendapatan Per Kapita Kabupaten	Rasio	-	0,62	0,63	0,64	0,65
a. Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan yang terbangun	Km	-	-	-	-	13,9
b. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan.	Jumlah desa yang tidak dapat dijangkau kendaraan roda 4	Desa	61	22	20	20	20
	Jumlah desa yang telah memiliki jalan aspal	Desa	123	133	143	153	163
c. Program Rehabilitasi/Peeliharaan Jalan dan Jembatan.	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi mantap: - Jalan Kabupaten	Persen	63,13	63,21	63,70	64,19	65,06
	Persentase Jembatan dalam kondisi baik : - Jembatan Kabupaten	Persen	69	71	72	73	75
d. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase panjang jalan dalam Kondisi mantap: - Jalan Desa	Persen	60,0	62,0	65,0	68,0	70,0
	Persentase Jembatan dalam kondisi baik : - Jembatan Desa	Persen	53	55	56	58	60
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya.	Persentase Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi	Persen	76,8	79,5	80	80	80
	Rasio jaringan irigasi	Rasio	7,49	8,70	9,00	9,50	9,90
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air	Persentase pemenuhan air baku untuk air	Persen	100	100	100	100	100

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
Baku.	minum/air bersih						
Program Pematangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi IUJK	Persen	60	70	80	90	100
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum/Air Bersih : - Perpipaan	Persen	19	20,32	22	26	30
	- Non perpipaan	persen	15,5	18,38	18,73	20	23
	Tersedianya System Air Limbah Skala Komunal / Kawasan/ Kota	Persen	0	0,026	0,123	0,213	0,7
	Persentase RT yang memiliki akses terhadap Air Limbah	Persen	0	39	41,91	42,15	42,45
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur	kawasan	1	2	5	5	5
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong.	Tersedianya system jaringan drainase Skala Kawasan dan Skala Kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari > 30 cm selama 2 Jam dan tidak lebih kurang dari 2 x setahun	Persen	9,157	12,857	20,545	30,859	46,733

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
Program Pembangunan, Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan.	Terbangunnya gedung perkantoran yang representatif	Persen	20	40	55	75	100
a. Program Pengembangan Perumahan. b. Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan	Persen	-	4,83	7,59	11,72	12,41
Program Pengembangan Perumahan.	jumlah Rumah Layak Huni	Unit	-	130.992	133.758	136.621	136.821
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.	Rasio ijin trayek	Rasio	0,001335	0,001311	0,001287	0,0001264	0,001242
	Kepemilikan KIR angkutan umum	Rasio	26	25	24	23	22
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1. Jumlah terminal angkutan darat yang dibangun	Lokasi	7	7	8	9	10
	2. Jumlah terminal dermaga angkutan sungai yang dibangun	lokasi	12	12	13	15	16
Program Peningkatan Pelayanan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas.	1. Jumlah Titik kemacetan yang ditangani	Lokasi	1	1	2	3	4
	2. Peningkatan rasio volume/kapasitas	Indeks	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60
	3. Peningkatan kecepatan	km/jam	20	30	40	50	60
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ/ Perhubungan.	Pemasangan Rambu-rambu	Buah	45	336	170	160	180
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian	Pengujian kendaraan bermotor	Unit	4.193	4.865	4.980	5.540	6.094

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
Kendaraan Bermotor.							
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.	Rata-rata kecelakaan Lalu-Lintas yang menyebabkan kematian atau luka parah per-100.000 penduduk per tahun	Rasio	15,29	16,33	17,16	16,12	15,12
Program Pengembangan bidang ketenaga listrikan.	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik	Persen	-	-	80	85	90
	Jumlah Pengembangan Energi Terbarukan	Jenis	-	-	1	2	3
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase peningkatan pengelolaan pertambangan dengan tertib	Persen	50	56	60	65	70

9.1.4. Indikasi Program dan Program Prioritas Misi Keempat

Indikator Kinerja Misi Keempat yaitu "Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan" adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 9.4 berikut.

Tabel 9.4. Indikator Kinerja Program Misi Keempat (Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan).

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas lahan ruang terbuka hijau (luasan RTH)	M2	82.739,19	82.739,19	82.939,19	93.409,40	95.909,40
	Tersedianya luasan RTH publik sebesar	Persen	1,283	1,283	1,286	1,449	1,488

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
	20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan						
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Tingkat Pencemaran Udara dan Air:						
	a. Air Sungai :						
	Sungai Martapura	BOD (mg/lit)	18,4	4,63	6,1	2	1,8
		COD (mg/lit)	17,3	9,44	11,6	10	9,8
		TSS (mg/lit)	36	38,6	55,6	50	48
	Sungai Riam Kanan	BOD (mg/lit)	6,82	13,05	4,1	2	1,8
		COD (mg/lit)	13,99	7,34	3	9,0	9,0
		TSS (mg/lit)	30,05	32,25	11	20	48
	Sungai Riam Kiwa	BOD (mg/lit)	12,7	4,6	5,7	2	1,8
		COD (mg/lit)	5,85	9,77	9,3	9,3	9,2
		TSS (mg/lit)	39,5	38	38	38	48
	b. Udara:						
	Transportasi Umum	SO ₂ (µg/m ³)	140,2	64,3	134	132	300
		NO ₂ (µg/m ³)	-	1,4	75	75	150
		CO (µg/m ³)	1.590	1.522	1.600	1.600	10.000
	Permukiman	SO ₂ (µg/m ³)	54,2	56,4	57	57	300
		NO ₂ (µg/m ³)	-	-	75	75	150
		CO (µg/m ³)	721	572	1.000	1.000	10.000
	Perkantoran	SO ₂ (µg/m ³)	72,4	94,1	100	100	300
		NO ₂ (µg/m ³)	-	-	75	75	150
CO (µg/m ³)		983,2	755	1.000	1.000	10.000	
Industri	SO ₂ (µg/m ³)	-	14,6	100	100	300	
	NO ₂ (µg/m ³)	140,2	-	75	75	150	
	CO (µg/m ³)	1590	755	2.000	2.000	10.000	
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Adanya Sekolah Adiwiyata	Buah	1	3	4	8	12

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Perusahaan yang Memiliki Dokumen AMDAL/dokumen lingkungan	Buah	10	10	15	18	20
	Persentase perusahaan yang telah mempunyai sistem pengelolaan limbah (IPAL)	Buah	4	4	10	13	18
	Persentase perusahaan yang berpotensi mengganggu lingkungan hidup dan telah memiliki AMDAL	Persen	60	60	33,33	27,78	10
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Terciptanya Taman Keanekaragaman Hayati	persen	0	0	0	5	10
	Motivasi berperilaku ramah lingkungan	Desa/kecamatan	0	0	19	19	20
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1. Porsentase Penanganan Sampah	Persen	21,72	18,3	20,54	25	26,37
	2. Rata-rata produksi sampah yang tidak terangkut per hari	Persen	71,25	71,13	64,23	59,44	52,93
Program Perlindungan konservasi sumber daya hutan dan lahan	Penurunan Luas Kerusakan kawasan hutan dan Lahan	Ha	10.019	9.494	7.259	5.538	3.348
Program rehabilitasi hutan dan lahan	Rehabilitasi Hutan dan lahan Kritis	Ha	525	2.235	1.721	2.190	770
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Penurunan Kasus Peti (dalam areal pertambangan yang berijin)	Kasus	2	0	0	0	0
	Persentase Reklamasi Lahan Pertambangan	Persen	-	-	-	17,5	20

9.1.5. Indikasi Program dan Program Prioritas Misi Kelima

Indikator Kinerja Misi Kelima yaitu "Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan prima" adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 9.5 berikut.

Tabel 9.5. Indikator Kinerja Program Misi Kelima (Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan prima)

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
Program Peningkatan Kapasitas & Penataan Kelembagaan Daerah	1. SKPD yang Melaporkan pelaksanaan SPM	Persen	67	70	80	100	100
	2. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	30	60	70	80	90
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.	1. Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik bidang perijinan yang telah ditindaklanjuti	Persentase	4	7	8	8	8
	2. Penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase	35	42	50	60	75
	3. Indeks Kepuasan masyarakat bidang pelayanan perijinan	Indeks	81	82	81,48	83,5	84
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.	Ketersediaan Produk Hukum Daerah (PERDA)	Produk Hukum	15	18	10	20	20
	Jumlah RAPERDA yang diusulkan	Buah	13	28	29	24	25
	Waktu rata-rata penyelesaian RAPERDA	Bulan	3	3	3	2 bulan, 3 minggu	2 bulan, 2 minggu
	Rencana aksi HAM	Keg	-	1	3	3	4

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Persentase permasalahan hukum yang dapat diselesaikan	Persen	100 %	50%	100%	100%	100%
	Daftar perencanaan penyusunan peraturan perundang undangan daerah	Buah	13	28	29	24	25
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perwakilan Rakyat Daerah.	Jumlah Raperda (inisiatif) yang diusulkan	Buah	0	4	10	10	10
	Waktu rata-rata pembahasan RAPERDA menjadi PERDA	Bulan	3	3	3	3	3
	Jumlah rata-rata dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan PERDA	Kegiatan setiap raperda	3	3	3	3	3
Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.	Peningkatan Kualitas Pengendalian Pembangunan	Persen	40	50	60	70	80
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Waktu Penetapan Perda APBD	Ketepatan waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
	Tingkat capaian kinerja pengelolaan keuangan	Persen	60	65	70	75	80
	Rasio belanja modal terhadap APBD	Persen	20	21	22	23	24
	Jumlah pajak dan retribusi daerah	Rupiah (milyar)	24,854	36,144	37,240	39,523	40,220
	Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD	Persen	10,12	11,93	14,39	9,65	10,25
	Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD pemungut	Persen	100	100	100	100	100
Program Penanganan dan Pengelolaan Aset Dengan Baik	Terkelolanya Aset Daerah dengan baik	Persen	50	60	70	80	90
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.	Jumlah aparatur Desa yang mengikuti Diklat	orang	50	110	375	375	400
	Jumlah Anggota BPD yang dilatih se Kabupaten Banjar	orang	-	-	-	1.000	943
Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	a. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	Persen	1,80	2,52	2,58	3,61	5,77
	b. Jumlah pertemuan	Kegiatan	19	290	290	290	290

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
	aparatur desa dengan masyarakat						
	c. Persentase kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa	Persen	-	-	20	20	20
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Rasio	290	300	310	325	337
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Rasio	277	277	277	277	277
Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan	Pelatihan perempuan perdesaan di bidang usaha ekonomi produktif	Orang	0	35	50	50	75
Program penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase kelengkapan aparat desa	Persen	100	100	100	100	100
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.	Jumlah SKPD yang arsipnya sudah ditata	SKPD	8	8	12	12	12
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah.	Ketersediaan Informasi dalam Bentuk Digital terhadap Data dan Informasi Keseluruhan	berkas	-	-	25	84	135
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.	Jumlah Peserta Sosialisasi	orang	50	50	100	100	150
Program Pendidikan Kedinasan.	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis	Orang	64	111	80	150	100
	Jumlah PNS yang mengikuti diklat penjenjangan struktural	Orang	39	52	59	93	55
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	Persen	83,93	84,13	84,50	85,00	85,20
	Persentase PNS yang mendapatkan hukuman Disiplin	Persen	0,16	0,12	0,10	0,09	0,08
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	0	0	0	100	100
	Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan hukum	Orang	0	0	2	3	4

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
Program Perencanaan Tata Ruang.	Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang	Persen	30	70	90	100	100
Program Perencanaan Pembangunan	Porsi usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD dengan total RKPD	Persen	25	25	30	30	30
Program Pemanfaatan Ruang.	Kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persen	-	20	30	40	50
	Rasio bangunan ber-IMB per satuan : - Bangunan rumah tinggal ber IMB	Persen	-	12	15	17	20
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.	a. Jumlah Keluarga Miskin yang punya Keterampilan Berusaha (KUBE)	Kelompok	2	2	3	13	16
	b. Jumlah Keluarga Miskin Punya Rumah Layak Huni	Rumah	0	0	10	20	40
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	a. Jumlah PMKS yang Terdata	Orang	42.809	26.003	26.003	15.051	15.051
	b. Jumlah Korban Bencana yang Terbantu	Persen	100	100	100	100	100
Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Tertangani	Orang	0	0	0	30	40
Program Pembinaan Penyandang Disabilitas/ Cacat dan Eks Trauma	Penyandang Disabilitas yang mendapat pembinaan	Orang/ tahun	15	20	40	55	55
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	a. Panti Jompo	Orang	60	60	60	60	60
	b. Jumlah Jompo Yang Mendapat Pengayoman	Orang	0	0	0	25	50
	c. Panti Asuhan	Orang	419	419	419	389	389
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Masyarakat Lainnya)	a. Jumlah penyandang PMKS (Narapidana) yang Terbina	Orang	30	30	30	30	30
	b. Jumlah Korban Narkoba dan PMKS yang Tertangani	Orang	60	60	65	90	90
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	a. Jumlah Keluarga Miskin (PKH) yang terayomi	RTSM/KSM	4.061	3.811	3.791	4.100	4.100
	b. Jumlah Anggota Vetean yang	Orang	135	135	135	150	150

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Terayomi						
Program Penataan Administrasi Kependudukan.	1. Kepemilikan KTP	Persen	60	76	80	85	90
	2. Rasio Bayi berakte Kelahiran	Rasio	0,60	0,66	0,70	0,75	0,80
	3. Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk	Persen	15	18	22	25	30
Program Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Rasio	3	3	3	4	5
	Rata-rata kejadian gangguan tran dan ketertiban/tahun/1.000 jumlah penduduk	Laporan pengaduan	2	7	6,9	7,6	8,1
	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100
	Jumlah Demo	kali	5	6	3	7	8
Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan.	Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan	Rasio	5	7	3	5	5
	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	Rasio	32	32	85	132	132
	Jumlah Linmas yang mengikuti Bintek	Orang	1450	60	120	180	240
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar	Opini Nilai	WDP C	WDP C	WDP C	WTP B	WTP A
	Terselesaikannya Temuan Hasil Pemeriksaan dan Pengembalian Uang Negara/Daerah	Persen	80	80	80	80	80
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksaan dan Apartur Pengawasan.	Peningkatan Sumber Daya Manusia di Inspektorat	Persen	50	60	65	70	75
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur Inspektorat	Persen	100	100	100	100	100
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.	Terselesaikannya Kasus-Kasus Pengaduan Masyarakat	Persen	80	80	80	80	80
Program	Terlaksananya	Persen	11,63	25,58	65,12	86,36	100

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
pengembangan komunikasi dan informasi dengan media massa	pengembangan website Domain dan Sub Domain di seluruh SKPD						
Program kerjasama informasi dengan media massa	Terlaksananya Pengembangan Dan pemberdayaan Media Interpersonal Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kecamatan	0	5	10	15	20
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Persentase penduduk yang menggunakan internet	persen	16,04	32,08	46,12	60,16	74,20
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.	Jumlah masalah/kejadian terkait ketahanan bangsa	Kasus	8	6	6	6	6
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.	Jumlah kampanye dan sosialisasi ketahanan bangsa	Kegiatan	20	34	42	31	41
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).	Jumlah kasus pelanggaran penyakit masyarakat	Kasus	20	20	20	20	20
	Persentase kasus penyakit masyarakat yang tertangani	Persen	18	18	18	18	18
Program Pendidikan Politik Masyarakat.	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	18	21	17	28	39
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	4	4	5	8	8
Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat.	Terbentuknya FKDM /FKUB tingkat kab/kec/desa dan kelurahan	Jumlah	8	13	17	22	32
	Jumlah kejadian masalah tentang perbedaan budaya	Kasus	4	4	3	3	3
Program Pengendalian dan Penanganan Bencana	1. Jumlah Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana	kali	2	10	23	25	29
	2. Tertanganinya Darurat Bencana Pada Wilayah Bencana	Kali	4	2	1	3	2

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
	3. Penanganan Darurat Bencana Terhadap Daerah Rawan Bencana	Persen	150	100	51	45	45
	4. Pemulihan Pasca Bencana	Persen	20	40	60	80	100

Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2006-2010 telah memberikan hasil yang positif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tergambar dari beberapa indikator, namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti terutama di dalam menghadapi tantangan daerah pada periode berikutnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Banjar yang terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2010. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 adalah tahapan lima (5) tahun kedua dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar tahun 2005-2025. RPJMD juga merupakan

pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara terpadu dan komprehensif, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari *top down* serta *bottom up*, yakni proses hasil rumusan antara pemerintah dan masyarakat.

Amanat pasal 19 pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ayat (2) mengatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sementara itu pasal 150 ayat (3) huruf c pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Terkait dengan hal ini, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan jangka waktu penetapannya paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik.

Tahun 2013 merupakan tahun ketiga pelaksanaan dari RPJMD 2011-2015 yang berarti setidaknya telah dua tahun pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar

Nomor 5 tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 pasal 155 bahwa dalam rangka menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah dan terjaganya konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW serta antara RKPD dan RPJMD, maka pemerintah Daerah telah melakukan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan, pelaksanaan rencana dan hasil rencana pembangunan daerah tersebut.

Selanjutnya untuk melihat sejauhmana pelaksanaan dari RPJMD tahun 2011-2015 di atas, maka berdasarkan pasal 274 (1), (2) dan (5), Pemerintah Daerah telah melakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD tahun 2010-2015 yang dilakukan melalui penilaian terhadap hasil pelaksanaan RPJMD tersebut yang dilaksanakan sekali yaitu pada tahun ketiga selama periode RPJMD tahun 2011-2015 dengan menggunakan evaluasi hasil RKPD selama tahun 2011-2012.

Hasil Evaluasi dimaksud meliputi indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut disimpulkan bahwa terjadi perubahan mendasar dalam indikator kinerja makro pembangunan daerah yang meliputi :

- a. Perubahan kondisi makro, nasional dan regional mengakibatkan perlunya menyesuaikan indikator pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita, pada akhir periode RPJMD;
- b. Akan dicapainya indikator indeks tingkat pengangguran terbuka dan indikator tingkat kemiskinan pada tahun 2013 ini, sehingga perlunya menetapkan target baru yang disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- c. Terjadinya peningkatan yang signifikan dalam realisasi PAD dan APBD pada tahun 2011-2013, sehingga meningkatnya sumber-sumber dana pembangunan yang diharapkan mampu menimbulkan percepatan hasil pelaksanaan dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2011-2015.

Berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi tersebut di atas, maka sesuai dengan pasal 282 (1) huruf c, perlu dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dan sesuai amanat pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 54 Tahun 2010, perlunya dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2011 sebagai dasar bagi Revisi RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015.

9.1 Maksud dan Tujuan

Revisi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 mempunyai maksud dan tujuan yang dijelaskan sebagai berikut:

1.2.1. Maksud

Revisi terhadap RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar selama periode

2011-2015 yang telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan, indikasi program prioritas dan indikator-indikator kinerja program yang akan dilaksanakan oleh SKPD-SKPD sampai tahun 2015. Perubahan dimaksud tetap menyajikan rumusan strategi, arah kebijakan program pembangunan yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu yang diharapkan terjadinya percepatan terwujudnya visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Banjar serta dengan memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah Kabupaten Banjar.

RPJMD Kabupaten Banjar juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menyesuaikan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus sebagai acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Banjar secara berjenjang.

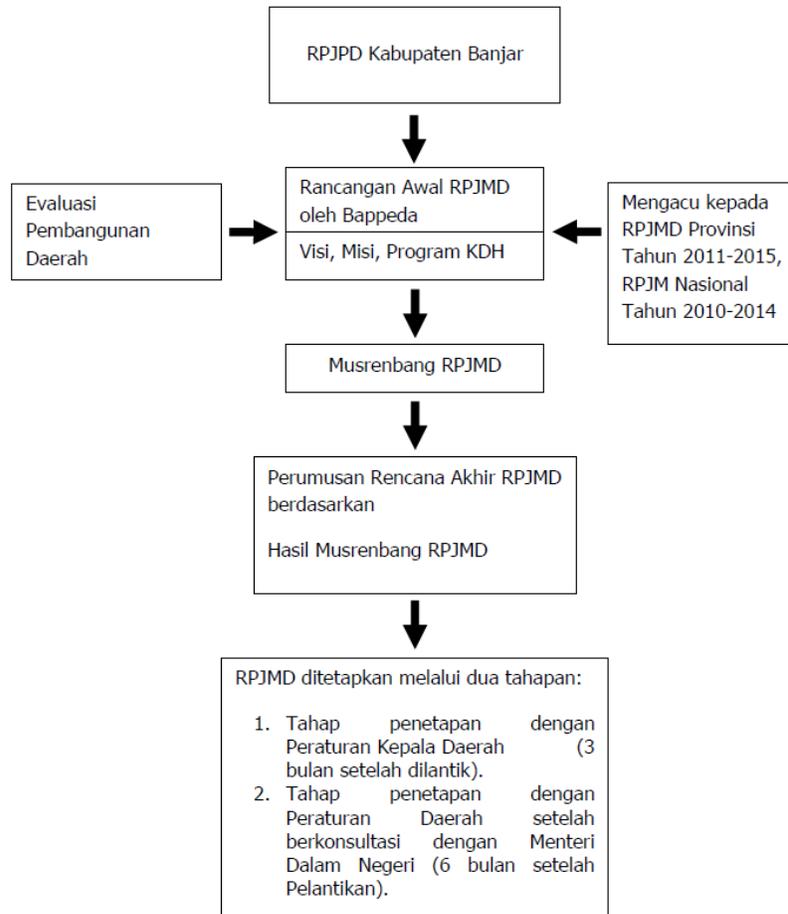
1.2.2. Tujuan

Tujuan Revisi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati Banjar ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang telah terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

- 2) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Banjar, APBD Provinsi Kalimantan Selatan, APBN dan sumber dana lainnya.
- 3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar Pemerintah Kabupaten Banjar, dengan Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Pusat.
- 4) Menyediakan tolok ukur yang lebih realistis sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, digunakan untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
- 5) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan segenap komponen masyarakat.

Tahapan proses penyusunan, secara diagramatis dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015

Sumber :

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004
- Undang undang Nomor 32 Tahun 2004
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

9.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015, Peraturan Perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

- 1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4410);
 - 6). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 7). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137), sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 10). Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- 11). Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 13). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- 14). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 15). Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 16). Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- 17). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 18). Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
- 19). Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
- 20). Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peratusran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.

9.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari manajemen pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1). RPJMD dan RPJPD Kabupaten Banjar.

RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 merupakan RPJMD kedua dari tahapan pelaksanaan RPJP Kabupaten Banjar tahun 2005-2025. Oleh sebab itu dalam penyusunan RPJMD selain menjabarkan juga memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Banjar masa bakti tahun 2010-2015.

2). RPJMD dan RTRW Kabupaten Banjar.

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan pola dan struktur tata ruang yang sedang dalam proses ditetapkan pada RTRW Kabupaten Banjar.

3). RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis dari RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis

operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banjar.

4). RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Banjar yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Selanjutnya Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Banjar yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga tingkat Kabupaten.

9.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Pendahuluan, berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dilakukannya perubahan atas RPJMD tahun 2011-2015, landasan hukum dan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.

2. Gambaran umum kondisi daerah, adalah penjelasan tentang:
 - Kondisi Geografis (uraian potensi pengembangan kawasan budidaya), letak & kondisi, topologi, geologi, hidrologi, klimatologi, dan penggunaan lahan.
 - Sosial Budaya Daerah meliputi Kependudukan, Agama, Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perpustakaan.
 - Perekonomian daerah berisikan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pendapatan perkapita, ketahanan pangan, ketimpangan kemakmuran dan pemerataan pendapatan, ketenagakerjaan, investasi dan kemiskinan.
 - Prasarana dan sarana darat berisikan mengenai data jalan dan jembatan, irigasi, air bersih, listrik, transportasi, informasi dan telekomunikasi.
 - Lingkungan hidup berisi uraian penanganan sampah, pertambangan, kehutanan, wilayah rawan bencana.
 - Kualitas Lingkungan Hidup.
 - Penataan Ruang.
 - Pemerintahan.
3. Analisis Isu-isu Strategis, berisi penjelasan permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi dalam pembangunan daerah.
4. Gambaran Pengelolaan Keuangan serta Kerangka Pendanaan, berisi penjelasan tentang Pendapatan Daerah, Pajak, Retribusi Daerah, Dana pertimbangan dan sumber pendapatan daerah lainnya, Belanja Daerah, baik Belanja Langsung maupun Tidak Langsung, Pembiayaan Daerah, Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan Daerah (SILPA), Pinjaman Daerah dan Investasi serta Penyertaan Modal Daerah dan Neraca Daerah (tentang kekayaan/aset daerah, kewajiban dan ekuitas daerah). Tergambar juga realisasinya selama tahun 2011-2012.

5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisi penjelasan tentang Visi pembangunan, Misi pembangunan dan Agenda Pembangunan Daerah.
6. Sasaran dan Strategi Program Pembangunan Daerah, berisi penjelasan tentang sasaran dan strategi Pembangunan Daerah.
7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, memuat rumusan kebijakan umum dan arah kebijakan setiap misi dan program pembangunan mewujudkan misi pembangunan yang menjadi acuan SKPD dalam menyusun Renstra.
8. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan, memuat penjelasan tentang program prioritas, target capaian yang terukur, SKPD penanggung jawab, disertai kebutuhan/ kerangka pendanaan yang bersifat indikatif menurut bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Penetapan Indikator Kinerja Daerah.
10. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

BAB 10

KAJIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

10.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Banjar, dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar setiap tahunnya.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Kabupaten Banjar dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
- 2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Kabupaten Banjar dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Banjar.
- 3) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 dengan sebaik- baiknya.
- 4) Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, dan Biro, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi,

Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015.

- 5) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar.
- 6) Penyusunan RKPD Kabupaten Banjar harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten/Kota.
- 7) RKPD Kabupaten Banjar harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja.
- 8) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Banjar merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- 9) Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
- 10) Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015, setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Banjar, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil.

- 11) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD.
 - b. Kepala Bappeda Kabupaten Banjar menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
 - c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.
 - d. Kepala Bappeda Kabupaten Banjar menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- 12) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Banjar dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan

kepada DPRD Kabupaten Banjar untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Banjar untuk masa bakti 2016-2020, maka dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 dapat disusun rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan.

Tabel 10.1. Program Utama Transisi

No.	Program Utama	Sasaran	Indikator
1.	Program Pengembangan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan menengah dan tinggi 2. Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar, menengah dan tinggi sesuai dengan standar nasional dan internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka partisipasi sekolah 2. Angka kelulusan 3. Angka melek huruf
2.	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan 2. Meningkatnya mutu layanan kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kematian bayi 2. Angka kematian ibu
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Angka harapan hidup 4. Angka kecukupan 5. Persentase balita bergizi buruk

3.	Program peningkatan infrastruktur daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase kualitas jalan dan jembatan yang baik. 2. Prosentase kualitas kantor pemerintah daerah yang baik.
4.	Program Pembangunan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produktivitas pertanian 2. Meningkatnya pendapatan petani 3. Terwujudnya swasembada pangan dan lumbung pangan 4. Meningkatnya ekspor pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat produktivitas pertanian 2. Pendapatan petani 3. Cadangan Pangan 4. Nilai ekspor hasil pertanian
5.	Program Pembangunan Sumber daya Energi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan energi 2. Meningkatnya pendapatan daerah 3. Terjaganya lumbung energi 4. Meningkatnya penerimaan ekspor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pasokan energi 2. Jumlah desa mandiri energi 3. Pendapatan daerah sektor sumber daya energi 4. Nilai ekspor
6.	Pembangunan Industri Pengolahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produktivitas industri manufaktur 2. Meningkatnya pendapatan pekerja dan pengusaha 3. Meningkatnya ekspor hasil industri pengolahan 5. Meningkatnya pendapatan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Produktivitas industri pengolahan 2. Pendapatan pekerja 3. Penerimaan pengusaha 4. Nilai ekspor hasil industri pengeolahan Pendapatan daerah sektor Industri Pengolahan
7.	Program Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya angka kemiskinan 2. Berkurangnya desa tertinggal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan persentase penduduk miskin 2. Jumlah desa tertinggal

8.	Program Kerjasama Ekonomi, dan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya saing daerah 2. Meningkatnya daya tarik daerah 3. Meningkatkan Investasi domestik (PMDN) dan investasi asing (PMA) 4. Meningkatnya kinerja perusahaan daerah 5. Meningkatnya kesempatan kerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai investasi PMDN 2. Nilai investasi PMA 3. Jumlah tenaga kerja dari investasi PMDN 4. Jumlah tenaga kerja dari investasi PMA 5. Meningkatnya asset perusahaan daerah.
9.	Program Pembangunan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur 2. Meningkatnya mutu layanan publik 3. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kecepatan layanan 2. Tingkat ketepatan layanan 3. Tingkat kepuasan